



**KEPENTINGAN RUSIA DIBALIK PENJUALAN ALAT UTAMA SISTEM
PERSENJATAAN KE MESIR**

***RUSSIA'S INTEREST BEHIND MAIN WEAPONRY SYSTEM
SALES TO EGYPT***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Brian Faesal
NIM 100910101042

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyatmo dan Almarhumah Ibu Sukowati;
2. Adikku Sekar Istiqomah;
3. Guru-guru dan pengajar sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Politik internasional, seperti halnya semua politik, merupakan perebutan kekuasaan.”

(Hans J. Morgenthau)¹



¹ Morgenthau. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Hal. 33.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brian Faesal

NIM : 100910101042

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kepentingan Rusia dibalik Penjualan Alat Utama Sistem Persenjataan ke Mesir” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2015

Yang menyatakan

Brian Faesal

NIM. 100910101042

SKRIPSI

**KEPENTINGAN RUSIA DIBALIK PENJUALAN ALAT UTAMA SISTEM
PERSENJATAAN KE MESIR**

Oleh

Brian Faesal

NIM 100910101042

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Kepentingan Rusia dibalik Penjualan Alat Utama Sistem persenjataan ke Mesir**” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 18 Agustus 2015
waktu : 11.00 WIB
tempat : Ruang LKPK FISIP-UNEJ

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Agung Purwanto, M.Si
NIP. 196810221993031002

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 196802291998031001

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP. 196305261989022001

Anggota I

Anggota II

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A
NIP. 197611122003121002

Adhiningasih Prabhawati. S.Sos, M.Si
NIP. 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Kepentingan Rusia dibalik Penjualan Alat Utama Sistem Persenjataan ke Mesir; Brian Faesal 100910101042; 2014: - 87 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada tahun 2013, politik Mesir kembali diwarnai oleh kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Presiden Mohammed Morsi. Kudeta tersebut menghasilkan pemerintahan baru dibawah Abdel Fattah el-Sisi yang berasal dari golongan militer. Amerika Serikat sebagai sekutu Mesir, mengecam kudeta tersebut dan memutuskan membekukan bantuan ekonomi dan militer tahunan kepada Mesir. Bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat merupakan sumber daya utama Mesir melawan terorisme di wilayahnya. Pada November 2013, delegasi Rusia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov datang ke Mesir menawarkan bantuan militer. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penjualan senjata militer senilai dua miliar dolar Amerika Serikat (USD). Kesepakatan penjualan senjata militer merupakan langkah awal Rusia membangun hubungan bilateral strategis dengan Mesir. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan penjualan senjata militer pertama Rusia ke Mesir sejak era perang dingin. Kesepakatan penjualan senjata militer menghasilkan hubungan strategis baru Rusia dengan Mesir dan manuver politik Rusia untuk kembali menjadi aktor berpengaruh di Timur Tengah. Pada tahun 2014, Rusia dan Mesir kembali mencapai kesepakatan penjualan senjata militer senilai 3,5 miliar USD. Hubungan strategis ini juga mengarah kepada kesepakatan ekonomi.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti kepentingan Rusia dalam penjualan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) ke Mesir. Metode tersebut menuntut penulis untuk dapat menganalisis data dengan sifat deduktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data sekunder dari berbagai sumber. Landasan konseptual yang digunakan ialah konsep geopolitik dari Mackinder dan Mahan untuk menjelaskan perilaku negara

kekuatan besar dalam memperebutkan wilayah geografis. Selain itu, penulis menambahkan teori hubungan internasional realis untuk menganalisis relasi negara kekuatan besar dalam politik internasional.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Rusia memiliki kepentingan jangka pendek dan jangka panjang di Timur Tengah. Kepentingan jangka pendek Rusia yaitu mengamankan pasar energi dan senjata. Kepentingan jangka panjang Rusia adalah berusaha mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah karena mengancam kepentingan Rusia seperti mengancam akan menyerang Suriah yang merupakan sekutu Rusia. Supaya dapat mencapai kepentingan tersebut, Rusia membutuhkan dukungan Mesir yang merupakan negara berpengaruh di Timur Tengah. Kesepakatan penjualan alutsista Rusia ke Mesir pada tahun 2013 menghasilkan dukungan Mesir kepada Rusia dalam politik internasional di Timur Tengah dan mampu mengamankan kepentingan Rusia serta menciptakan perimbangan kekuatan di Timur Tengah.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepentingan Rusia dibalik Penjualan Alat Utama Sistem Persenjataan ke Mesir”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko M.Si Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dra. Sri Yuniati M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. Djoko Susilo M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan Ibu dosen dan staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
4. Ayahanda Suyatmo dan Almarhumah Ibunda Sukowati;
5. Sahabat dan kawan-kawan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Angkatan 2010 yang telah berbagi dan menorehkan mimpi, cinta, serta harapan selama penulis menempuh pendidikan;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Agustus 2015
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi.....	5
1.2.2 Batasan Waktu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Realisme.....	7
1.5.2 Geopolitik.....	14
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	17

1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. GEOPOLITIK TIMUR TENGAH DAN POLITIK LUAR NEGERI RUSIA	19
2.1 Geopolitik Timur Tengah.....	21
2.1.1 Minyak.....	22
2.1.2 Jalur Laut Internasional.....	26
2.1.3 Politik Dalam Negeri Negara-Negara Timur Tengah.....	29
2.1.4 Politik Luar Negeri Negara-Negara Timur Tengah.....	33
2.2 Politik Luar Negeri Rusia.....	36
2.3 Geostrategi Rusia.....	40
2.4 Sejarah Hubungan Rusia-Mesir.....	42
BAB III. PERIMBANGAN KEKUATAN DI TIMUR TENGAH.....	44
3.1 Kekuatan Militer Amerika Serikat.....	44
3.2 Kekuatan Militer Rusia.....	50
BAB IV. STRATEGI RUSIA TERHADAP MESIR DAN UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN DI TIMUR TENGAH.....	59
4.1 Kepentingan Rusia di Kawasan Timur Tengah.....	59
4.1.1 Membangun Hubungan Strategis melalui Penjualan Senjata.....	60
4.1.2 Membangun Hubungan Strategis melalui Kesepakatan Energi.....	63
4.2 Kepentingan Jangka Pendek Rusia terhadap Mesir	66
4.3 Kepentingan Jangka Panjang Rusia terhadap Mesir.....	78
BAB V. KESIMPULAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

2.1	Produksi Minyak Negara-Negara Anggota OPEC.....	24
2.2	Bentuk Pemerintahan dan Agama Negara-Negara Timur Tengah.....	31
2.3	Peristiwa Internasional di Timur Tengah.....	36
3.1	Kekuatan Armada Kelima Amerika Serikat Tahun 2013.....	46
3.2	Kekuatan Militer Negara-Negara Sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah Tahun 2015.....	50
3.3	Kekuatan Armada Laut Hitam Rusia Tahun 2015.....	54
3.4	Kekuatan Militer Sekutu Rusia di Timur Tengah Tahun 2015.....	56
4.1	Kekuatan Militer Rusia Tahun 2015.....	67
4.2	Nilai Perdagangan Rusia-Mesir.....	73
4.3	Peningkatan Nilai Transfer Senjata Rusia-Mesir.....	74
4.4	Anggaran Militer Rusia 2010-2014.....	85
4.5	Kekuatan Militer Mesir Tahun 2015.....	85

DAFTAR GAMBAR

1.1 Pola Perlawanan Langsung.....	13
1.2 Pola Persaingan.....	13
2.1 Peta Kawasan Timur Tengah.....	20
2.2 Konsumsi Minyak Dunia Tiap Kawasan.....	26
2.3 Jalur Laut Internasional.....	28
3.1 Posisi Armada Amerika Serikat di Seluruh Dunia.....	45
3.2 Posisi Armada Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.....	48
3.3 Lokasi Armada Militer Rusia.....	52
3.4 Posisi Armada Rusia di Kawasan Timur Tengah.....	53
4.1 Peta Kawasan Mediterania Timur.....	77

DAFTAR SINGKATAN

Alutsista	= Alat utama sistem persenjataan
Bph	= Barel per hari
BRICS	= Brazil, Russia, India, China, South Africa
CIS	= <i>Commonwealth of Independent States</i>
FIS	= <i>Front Islamique du Salut</i>
GCC	= <i>Gulf Cooperation Council</i>
HAM	= Hak Asasi Manusia
NATO	= <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OKI	= Organisasi Konferensi Islam
OPEC	= <i>Organization of Exporting Countries Petroleum</i>
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	= Produk Domestik Bruto
Tcf	= <i>Trillion cubic feet</i>
UAC	= <i>United Aircraft Corporation</i>
UEC	= <i>United Engine Corporation</i>
USC	= <i>United Shipbuilding Corporation</i>
USD	= <i>United States Dollar</i>
UVZ	= <i>Uralvagonzavod</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konsep Politik Luar Negeri Federasi Rusia 2013.....	98
Lampiran 2. Konsep Kepentingan Nasional Federasi Rusia.....	117



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rusia merupakan salah satu negara terbesar dari segi produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dunia. Alutsista produksi Rusia banyak digunakan oleh negara-negara di berbagai kawasan seperti India, Vietnam, Myanmar, Aljazair, Suriah, dan Indonesia. Jenis sistem persenjataan yang dijual baik darat, laut dan udara merupakan senjata berat. Dalam Persenjataan berat pertahanan udara, adapun produk yang dijual adalah seperti pesawat tempur tipe MiG-29K, Sukhoi SU-30MKI Fighters dan Helikopter Serbu tipe Mi-17V-5, dari segi pertahanan darat adapun persenjataan berat yang dijual seperti tank kelas berat atau Tank Tempur Utama (*Main Battle Tank*) T-90S, dan pada segi pertahanan laut sistem persenjataan berat yang dijual seperti kapal selam tipe 877EKM dan 636M.¹ Alat utama sistem persenjataan Rusia mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan dalam hal penjualan. Data dari *Centre for Analysis of Strategic and Technologies* menggambarkan mengenai perkembangan dan peningkatan penjualan persenjataan produksi Rusia selama kurun waktu lima tahun, sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Peningkatan penjualan alutsista Rusia secara drastis terjadi selama tahun 2009 dan 2010. Dalam melakukan ekspor senjata, Rusia lebih banyak melalui perusahaan Rosoboronexport yaitu perusahaan pertahanan milik Rusia. Pada sisi lain, Rusia juga mengizinkan perusahaan lain dalam melakukan ekspor senjata walaupun jumlahnya lebih kecil.

Penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista) antar negara bukan sekedar dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Dalam penjualan alutsista dari satu negara ke negara lain sering terdapat kesepakatan-kesepakatan politik. Kesepakatan politik yang saling menguntungkan merupakan faktor yang menentukan dibalik perdagangan alutsista antar negara. Kemampuan Rusia dalam

¹The Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST). 2012. *Russia Arms Industry and Arms Trade: Fact and Figures*. Centre for Analysis of Strategic and Technologies. Russia. Diakses dari http://www.cast.ru/files/all-stats_eng.pdf pada tanggal 8 Mei 2014.

memproduksi sistem pertahanan menjadikan negara ini memiliki pengaruh dalam politik internasional.

Politik luar negeri Rusia dalam skala global saat ini berfokus pada upaya menyaingi dominasi Barat dalam menanamkan pengaruh ke negara-negara lain. Dalam bidang ekonomi, Rusia berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi global bersama Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan atau yang lebih dikenal dengan BRICS. Politik luar negeri Rusia dalam skala regional masih mengutamakan stabilitas politik di kawasan yang ada dalam lingkaran pengaruhnya yaitu Asia Tengah, Timur Tengah, Laut Hitam dan Laut Mediterania. Khusus di Timur Tengah, masih berfokus kepada memberikan dukungan politik kepada negara-negara yang merupakan sekutunya sejak lama.² Sejak meletusnya konflik internal di Suriah antara pendukung rezim Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok pemberontak, Rusia menyatakan dukungannya kepada rezim tersebut.

Berakhirnya perang dingin tidak sekaligus mengakhiri perebutan pengaruh dari aktor lama, Amerika Serikat bersama sekutu³ dan Rusia. Hingga saat ini, kedua negara terus berusaha membangun aliansi dan hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Geopolitik di Timur Tengah selalu melibatkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Kepentingan Amerika Serikat yang besar di kawasan ini menjadi alasan keterlibatan Amerika Serikat dalam politik internasional di Timur Tengah. Kepentingan itu diantaranya, untuk mengamankan pasokan energi fosil dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk menyebarkan paham demokrasi di kawasan Timur Tengah.⁴ Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat mendapat perlawanan dari negara-negara seperti Iran dan Suriah karena dianggap sebagai upaya untuk menguasai dan memecah-belah Bangsa Arab. Agar dapat melindungi kepentingan-kepentingannya,

² Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2014. *Concept of the Foreign Policy of Russian Federation*. Diakses dari <http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument> pada tanggal 21 April 2014.

³ Kata sekutu mengacu pada Negara-negara yang tergabung dalam aliansi pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

⁴ Brezinski. 1997. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperative*. New York: Basic Book. Hal 37.

Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan kepada negara-negara yang menjadi sekutunya. Pada lain pihak, sejak lama Rusia telah mengeluarkan kebijakan luar negeri yang mendukung negara-negara yang dimusuhi oleh Amerika Serikat dan sekutu. Dalam kasus nuklir Iran, Rusia memberikan dukungannya kepada Iran. Begitu pula dengan konflik di Suriah, Rusia memberikan dukungannya kepada rezim Bashar al-Assad.

Konflik internal Suriah telah membawa pengaruh besar terhadap geopolitik di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan sekutunya menyatakan dukungan kepada pihak pemberontak. Dukungan yang diberikan berupa dukungan politik dan suplai senjata bagi kelompok pemberontak. Amerika Serikat dan sekutunya juga mengerahkan armada tempur, terutama angkatan laut yang tergabung dalam Armada keenam di laut Mediterania. Sebagai pihak yang mendukung Rezim berkuasa, Rusia juga mengerahkan armada tempur di laut Mediterania. Rusia mengerahkan armada lautnya melalui pangkalan militer di wilayah selatan yang terletak di Laut Hitam yang langsung mengarah ke Laut Mediterania.⁵

Laut Mediterania merupakan kawasan yang dikelilingi oleh negara-negara yang berada dibawah pengaruh Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara ini telah menempatkan armada lautnya untuk menegaskan dominasinya di kawasan ini. Amerika Serikat telah menempatkan armada lautnya di berbagai negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Mediterania seperti, Spanyol, Italia, dan Yunani. Rusia sendiri memiliki armada laut yang ditempatkan di selatan negaranya yang berbatasan dengan Laut Hitam dan mengarah ke laut Mediterania. Selain itu, Rusia menempatkan armada lautnya di beberapa negara di kawasan Laut Mediterania seperti Suriah dan Siprus.⁶

Perebutan pengaruh dan hubungan aliansi tidak berhenti pasca perang dingin. Fenomena *Arab Spring* tidak hanya melibatkan faktor dalam negeri

⁵ Ari Yashar. 4 November 2013. *Russia Sends Most Powerful Ships to Mediterranean*. Diakses dari <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/173578> pada 8 Mei 2014.

⁶ Stefanos Evripidou. 10 Januari 2014. *Cabinet gives OK for Russian use of Paphos base*. Diakses dari <http://cyprus-mail.com/2014/01/10/cabinet-gives-ok-for-russian-use-of-paphos-base/> pada 8 Mei 2014.

negara-negara Timur Tengah tetapi juga melibatkan faktor eksternal. Keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu dalam revolusi di beberapa negara seperti Libya, Suriah, dan Mesir dapat dibaca sebagai upaya negara-negara besar kembali menanamkan pengaruhnya di kawasan. Keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu membuat Rusia tidak tinggal diam. Jatuhnya rezim penguasa pro Rusia seperti Muammar Khaddafi di Libya merugikan kepentingan Rusia dibidang ekonomi dan politik. Secara politik, Rusia kehilangan salah satu sekutu di kawasan Timur Tengah yang memiliki ideologi anti barat dan posisi wilayah geografis yang strategis yaitu berada di kawasan Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Secara ekonomi, Rusia kehilangan salah satu negara tujuan ekspor industri militernya.

Mesir adalah negara di Timur Tengah yang kondisi dalam negerinya mengalami perpecahan politik. Pasca kudeta militer atas Presiden Morsi, keadaan dalam negeri Mesir sering dilanda dengan bentrokan antara massa dari Ikhwanul Muslimin yang merupakan pendukung Morsi dengan militer. Perubahan kepemimpinan di pemerintahan Mesir membawa dampak terhadap politik di kawasan Timur Tengah. Pasca kudeta terhadap Presiden Morsi, Amerika Serikat menanggukkan bantuan militer yang selama ini diterima Mesir sejak tahun 1979.⁷ Sejak tahun 1979, Mesir selalu menerima bantuan ekonomi dan pertahanan dari Amerika Serikat senilai dua miliar Dolar Amerika Serikat (USD) per tahun.⁸ Keadaan ini membuat pemerintah Mesir mengalihkan pilihan kepada Rusia untuk memenuhi kebutuhan alutsista, terutama pertahanan udara.

Perubahan kepemimpinan dan politik dalam negeri Mesir segera dimanfaatkan oleh Rusia untuk menjalin kembali hubungan bilateral. Kedatangan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov ke Mesir pada November 2013 menjadi awal dari kembalinya hubungan Rusia dengan Mesir yang beku sejak pemerintahan Anwar Sadat. Kunjungan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Rusia dan Mesir telah menyepakati pembelian sejumlah sistem

⁷ Sharp. 2009. *Egypt: Background and US Relations*. Congressional Research Service. CRS report to Congress. Hal. 3.

⁸ *Ibid.* Hal. 3

pertahanan udara senilai dua miliar USD.⁹ Nilai Transaksi dari penjualan alutsista yang dibeli Mesir adalah empat miliar USD.¹⁰ Rusia memberi kemudahan terhadap Mesir dengan membayar hanya dengan setengah harga yang merupakan bagian dari kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis karena penjualan sistem persenjataan pertahanan udara Rusia ke Mesir pada tahun 2013 adalah yang pertama sejak berakhirnya Perang Dingin dan menandai era baru hubungan kedua negara yang beku sejak perang dingin. Dari penjabaran latar belakang tersebut maka penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Kepentingan Rusia dibalik Penjualan Alat Utama Sistem Persenjataan ke Mesir”**.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam setiap penulisan. Ruang lingkup pembahasan digunakan untuk membatasi topik penulisan karya ilmiah, dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari tema, sehingga diharapkan pembahasan lebih terarah dan jelas. Pembatasan-pembatasan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Batasan Materi

Tulisan ini difokuskan pada penjelasan mengenai penjualan alutsista Rusia ke Mesir. Pembahasan dalam karya ilmiah ini dititikberatkan pada kepentingan Rusia dalam penjualan alutsista ke Mesir dan pengaruhnya terhadap konstelasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya sekitar Laut Mediterania. Penelitian ini juga membahas tentang perimbangan kekuatan di Laut Mediterania antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutu.

⁹ Ariel Ben Solomon. 9 Februari 2014. *Russia And Egypt Complete 2 Billion Arms Deal Funded By Gulf State*, diakses dari <http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Russia-and-Egypt-complete-2-billion-arms-deal-funded-by-Gulf-states-340847> pada tanggal 12 Februari 2014.

¹⁰ Awad Mustafa. 24 November 2013. *Intrigue Deepens Over Egypt - Russia Arms Deal*, diakses dari <http://www.defensenews.com/article/20131124/DEFREG01/311240009/Intrigue-Deepens-Over-Egypt-Russia-Arms-Deals> pada tanggal 12 Februari 2014.

1.2.2 Batasan Waktu

Penelitian ini menggunakan batasan waktu mulai tahun 2010 sampai 2015. Alasan penulis memulai penelitian dari tahun 2010 karena pada tahun tersebut terjadi fenomena *Arab Spring* yang menyebabkan instabilitas politik di kawasan Timur Tengah dan pengurangan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu di kawasan tersebut. Penelitian dibatasi hingga tahun 2015 karena pada tahun itu terjadi peningkatan hubungan bilateral Rusia dengan Mesir. Peningkatan hubungan bilateral dibuktikan dengan Rusia telah menyelesaikan pengiriman alutsista ke Mesir dan program hubungan bilateral lainnya. Rusia juga telah mengerahkan armada lautnya untuk mengimbangi kekuatan armada laut sekutu di Laut Mediterania. Penulis juga akan mencantumkan data diluar batasan waktu untuk memperkuat analisis penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Kedekatan hubungan Rusia dengan Mesir pasca perang dingin merupakan fenomena menarik. Sejak pemerintahan Anwar Sadat sampai Hosni Mubarak, Mesir memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, sementara hubungan Mesir dengan Rusia tidak begitu dekat. Pengaruh Rusia di kawasan Timur Tengah pasca perang dingin telah menurun. Rusia memanfaatkan pergantian rezim di Mesir untuk kembali menjalin hubungan dengan Mesir dan mengawali hubungan itu dengan menjual alutsista ke Mesir. Dari penjelasan singkat tersebut maka, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah **“Apa Kepentingan Rusia dibalik Penjualan Alat Utama Sistem Persenjataan ke Mesir?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kepentingan Rusia dalam penjualan alutsista ke Mesir. Penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa politik internasional di Timur Tengah dominan perspektif realisme dan memperkuat asumsi realisme dan geopolitik dalam politik internasional kontemporer.

1.5 Kerangka Pemikiran

Agar dapat menjelaskan fenomena dan menjawab permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa konsep yaitu, realisme dan geopolitik. Realisme digunakan untuk menjelaskan strategi Rusia dalam meningkatkan kekuatan melalui penjualan senjata militer ke Mesir. Realisme juga digunakan untuk menjelaskan strategi Rusia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Konsep geopolitik digunakan untuk menjelaskan strategi yang digunakan Rusia dalam agenda politiknya di Timur Tengah dan kaitannya dengan pertimbangan kondisi geografis.

1.5.1 Realisme

Realisme berusaha menjelaskan perilaku negara dan penyebab konflik antarnegara. Rumusan utama realisme adalah relasi antarnegara yang bersifat anarki atau tidak ada aktor tertinggi di atas negara. Realisme menganggap negara sebagai aktor yang berdaulat dan bertindak rasional untuk mencapai kepentingan nasional terutama bertahan hidup (*survival*). Upaya negara bertahan hidup adalah dengan meningkatkan kekuatan.¹¹ Realisme berawal dari karya Edward Hallet Carr, *Twenty Years Crisis*, yang mengkritik utopianisme liberal dan perjanjian pasca perang dunia pertama adalah jalan menuju perdamaian.¹² Carr menganggap realisme adalah koreksi yang diperlukan atas utopianisme. Menurut Carr, politik internasional didominasi oleh elemen kekuatan dan distribusi kekuatan yang tidak merata di antara negara-negara. Negara digerakkan oleh pencapaian kepentingan pribadi untuk melindungi *status quo* dengan membatasi potensi peningkatan kekuatan revisionis. Perjanjian pasca perang dunia pertama merupakan alat untuk mempertahankan kepentingan oleh negara pemenang perang. Hal tersebut yang

¹¹ Ben-Itzhak. Realisme dan Neorealisme. dalam Ishiyama dan Breuning. 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu, Sebuah Panduan Tematis, Jilid 1*. Jakarta: Kencana. Hal. 513-514.

¹² Burchill dan Linklater. 2012. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media. Hal. 90.

menjelaskan peningkatan kekuatan Jerman yang kemudian menimbulkan perang dunia kedua karena Jerman dirugikan oleh perjanjian tersebut.¹³

Pasca perang dunia kedua, Hans J. Morgenthau menjelaskan prinsip realisme dalam *Politics Among Nations*. Politik internasional adalah seperti umumnya politik, diatur oleh hukum objektif yang berakar dalam sifat manusia, dan memungkinkan menurunkan teori rasional yang merefleksikan hukum tersebut. Kepentingan yang didefinisikan dari segi kekuatan adalah kunci untuk memahami politik internasional, namun kekuatan menjaga kontrol manusia atas manusia. Konsep kepentingan yang didefinisikan secara objektif, secara umum adalah valid namun tidak bermakna tetap. Pertimbangan konsekuensi dalam politik bukan merupakan moral, melainkan prinsip utama dalam politik. Aspirasi moral dari suatu negara berbeda dengan hukum koral yang mengatur alam, tetapi kepentingan mencegah ekses moral dan kebodohan politik. Bidang politik adalah otonom dan satu-satunya cara tentang pentingnya menjaga kehidupan politik adalah didasarkan pada kepentingan. Jadi, menurut realisme, satu-satunya standar pemikiran yang relevan adalah standar politik dan menyisihkan pertimbangan moral.¹⁴

Rusia sebagai aktor rasional berusaha untuk mengamankan kedaulatannya dan mencapai kepentingan nasional untuk kemakmuran. Upaya Rusia untuk mencapai dan mengamankan kepentingannya adalah dengan mengerahkan kekuatan di Timur Tengah. Rusia melakukan peningkatan kemampuan militer dengan mengirimkan armada lautnya ke Laut Mediterania. Rusia juga mengerahkan armada tempur ke Siprus yang letaknya strategis. Kehadiran kekuatan Rusia di Timur Tengah dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat. Kekuatan Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah dan dekat dengan kepentingan Rusia juga dianggap ancaman oleh Rusia. Dalam merespon ancaman yang disebabkan oleh kehadiran armada Amerika Serikat dan sekutu di Laut Mediterania Pengaruh Rusia kepada beberapa negara di kawasan sekitar Laut Mediterania seperti Siprus dan Suriah serta membangun hubungan luar negeri

¹³ *Ibid.* Hal. 93.

¹⁴ Morgenthau. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 4-16.

yang baik dengan Mesir adalah langkah untuk menciptakan ketertundukan negara-negara tersebut yang tujuannya untuk mempertahankan kepentingan dan menandingi kekuatan Amerika Serikat.

Elemen yang mendukung kekuatan penjelas dari realisme dalam penelitian ini adalah *power* dan perimbangan kekuatan. Berikut penjelasan dari kedua elemen tersebut:

- **Konsep *Power***

Power sebagai suatu konsep mengalami perdebatan definisi dari sejumlah ilmuwan. Morgenthau mendefinisikan *power* sebagai pengendalian manusia atas pikiran dan tindakan orang lain.¹⁵ Definisi tersebut menghubungkan *power* dengan daya paksa (*force*) dan pengaruh (*influence*). Definisi *power* dari Morgenthau memiliki arti luas dan untuk mengoperasionalkan konsep *power* Morgenthau menyebutkan bahwa apapun dapat digunakan untuk mengukur *power* yang dimiliki negara. Morgenthau mengukur *power* dengan beberapa unsur seperti geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Theodore Coloumbis dan John Wolfe mendefinisikan *power* dengan memandangnya sebagai suatu hubungan antara aktor-aktor yang berkehendak berbeda. Coloumbis dan Wolfe mendefinisikan *power* secara luas dan merujuk pada unsur apapun yang dapat digunakan untuk mempertahankan pengendalian aktor terhadap aktor lain. Cara mengoperasionalkan *power* adalah dengan mengukur kemampuan suatu negara dalam menguasai atribut-atribut untuk menerapkan kekuasaan.¹⁶ *Power* memiliki tiga unsur yaitu daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*), dan wewenang (*authority*). Daya paksa yaitu ancaman nyata dengan menggunakan kekuatan militer, ekonomi, atau alat pemaksa lain untuk mencapai tujuan. Pengaruh yaitu penggunaan alat-alat persuasi untuk memastikan perilaku suatu aktor sesuai dengan perintah aktor lain. wewenang dapat

¹⁵ *Ibid.* Hal. 35.

¹⁶ Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 118.

didefinisikan sebagai sikap sukarela suatu aktor untuk tunduk kepada aktor lain. James Lee Ray mendefinisikan *power* sebagai kemampuan relatif untuk menghancurkan barang dan membunuh manusia.¹⁷ Definisi dari Ray memisahkan antara *power* dengan *influence* yang menurutnya lebih mudah untuk diukur. Ray mengoperasionalkan konsep *power* dengan tiga unsur yaitu, dimensi demografis, kemampuan industri, dan kemampuan militer.¹⁸ Kekuatan yang dimiliki negara salah satunya berada dalam unsur kemampuan militer yang dimiliki. Kekuatan militer yang besar tidak sekaligus menghasilkan pengaruh, daya paksa atau wewenang dari negara yang memiliki kemampuan militer lebih kecil. Holsti menyebutkan bahwa kemampuan militer merupakan sebuah instrumen dalam politik internasional. Kemampuan militer pada dasarnya bersifat netral dan dapat digunakan dalam mempertahankan tujuan negara dengan mempengaruhi orientasi, peranan, tujuan dan tindakan negara lain. Kekuatan militer juga dapat digunakan untuk mendukung diplomasi atau sebagai alat untuk menyampaikan maksud aktor kepada musuh yang potensial.¹⁹

Dari berbagai definisi *power* tersebut terdapat satu unsur yang menjadi persamaan dalam operasionalnya yaitu kemampuan militer dan kemampuan industri yang dimiliki aktor. Dari kedua elemen tersebut, kemampuan industri merupakan elemen penting yang menjelaskan kepentingan Rusia dalam penjualan senjata ke Mesir. Menurut Morgenthau, kemampuan industri adalah kekuatan yang dibutuhkan negara untuk membangun dan memelihara kekuatan militer yang sepadan dengan politik luar negerinya. Tanpa industri, negara tidak dapat memainkan peran penting dalam politik internasional yang ingin dimainkan.²⁰ Negara juga dapat memanfaatkan kemampuan industri untuk mendapat keuntungan ekonomi dengan cara menjual produk industrinya ke negara lain. Keuntungan ekonomi akan menambah kekuatan nasional negara.

¹⁷ Masoed. *Op. Cit.* Hal. 125.

¹⁸ Masoed. *Op. Cit.* Hal. 128.

¹⁹ Holsti. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Hal. 32-33.

²⁰ Morgenthau. *Op. Cit.* Hal. 146.

Rusia memiliki kekuatan dibidang industri persenjataan militer. Agar kekuatan Rusia semakin besar maka Rusia perlu menemukan pasar bagi produk industri persenjataannya. Kesepakatan penjualan senjata ke Mesir adalah kesempatan bagi Rusia untuk menjual produknya sehingga mendapat keuntungan ekonomi yang mampu menambah kekuatan nasional. Rusia memanfaatkan kemampuan industri di bidang militer dan energi untuk mengakumulasi kekuatan ekonomi. Rusia memanfaatkan potensi kekuatan negaranya yang bersumber dari ketersediaan sumber daya alam dan bahan mentah menjadi produk industri yang bernilai ekonomi tinggi. Kemampuan ekonomi dapat meningkatkan daya tawar negara dalam politik internasional. Rusia memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk memperluas dan mengamankan kepentingannya di Timur Tengah. Rusia berhasil memperluas penjualan senjata ke Mesir dan juga membuka jalan bagi Rusia untuk melakukan investasi dan penjualan produk energi ke Mesir yang semakin menguntungkan Rusia.

Rusia sebagai aktor rasional berusaha untuk mengamankan kepentingannya dan meningkatkan kekuatan. Berdasarkan uraian elemen power di atas, Rusia memanfaatkan kekuatan dibidang militer dan kekuatan industri. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar yang didukung oleh persenjataan militer canggih buatan industri dalam negeri Rusia sendiri. Keunggulan militer dan industri tersebut yang digunakan Rusia untuk meyakinkan Mesir agar membeli senjata dari Rusia. Hal ini menjadi penting karena Rusia dapat mengakumulasi kekuatan ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan industri dan kemampuan militer. Meningkatnya kemampuan militer secara otomatis akan meningkatkan kemampuan Rusia untuk bertahan hidup dan mencapai kepentingan nasional untuk kemakmuran.

- **Perimbangan Kekuatan**

Keentingan nasional sebuah negara adalah bertahan hidup (*survival*) dalam sistem internasional yang anarki, maka untuk mewujudkan itu negara melakukan akumulasi kekuatan yang umumnya diperoleh melalui kemampuan

dibidang militer.²¹ Usaha negara mengakumulasi kekuatan militer untuk memastikan tidak ada pihak lain yang dengan kekuatan militernya dapat mengancam eksistensi negara tersebut. Perimbangan kekuatan (*balance of power*) merupakan suatu fenomena yang natural dalam sistem internasional. Morgenthau menjelaskan bahwa sistem internasional yang anarki membuat suatu negara memiliki hasrat untuk menguasai negara lain. Negara yang merasa terancam oleh kekuatan asing akan merespon dengan meningkatkan kekuatan nasionalnya untuk mencegah upaya negara lain untuk mendominasi negaranya. Suatu negara akan berupaya menyamai kekuatan negara lain yang dianggap mengancam. Usaha ini yang kemudian menghasilkan perimbangan kekuatan.²²

Perimbangan kekuatan dapat diartikan pula sebagai sebuah usaha dalam kebijakan nasional. Dalam konteks ini, untuk mencegah agar suatu negara atau koalisi tidak dapat memperoleh kekuatan dominan maka, harus ada minimal satu negara yang bertindak sebagai penyeimbang (*balancer*). Negara yang menjadi penyeimbang bertindak secara rasional untuk mencegah adanya negara lain yang berusaha memperbesar kekuatannya di suatu kawasan. Usaha ini biasanya disertai dengan membangun koalisi dengan negara lain.²³ Terdapat berbagai pola dalam perimbangan kekuatan yang dalam kasus ini dapat dilihat dari dua pola yaitu, gambar 1.1 menunjukkan pola perlawanan langsung dan gambar 1.2 menunjukkan pola persaingan. Pola perlawanan langsung menjelaskan keadaan saat dua negara saling berhadapan dan menciptakan perimbangan kekuatan. Pada gambar 1.1, A digambarkan sebagai Amerika Serikat dan B sebagai Rusia. Kedua negara saling berhadapan dalam memperebutkan kekuatan. Pola persaingan menggambarkan keadaan saat dua negara memperebutkan pengaruh di suatu negara untuk menjadikan negara tersebut berada dibawah pengaruh negara yang memiliki kekuatan besar.²⁴ Pada gambar 1.2, A digambarkan sebagai Amerika Serikat, B

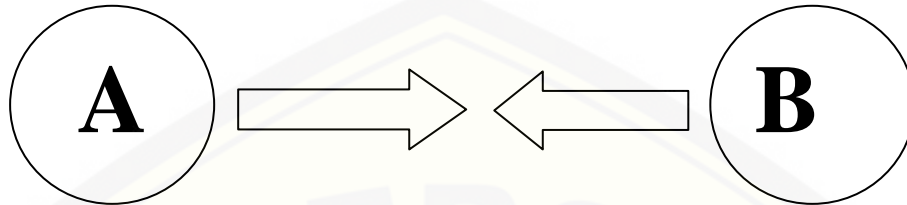
²¹ King. Keseimbangan Kekuatan, dalam Ishiyama dan Breuning. 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu, Sebuah Panduan Tematis, Jilid 1*. Jakarta: Kencana. Hal. 596.

²² Morgenthau. *Op. Cit.* Hal. 200.

²³ Mas'ood, *Op. Cit.* Hal. 135.

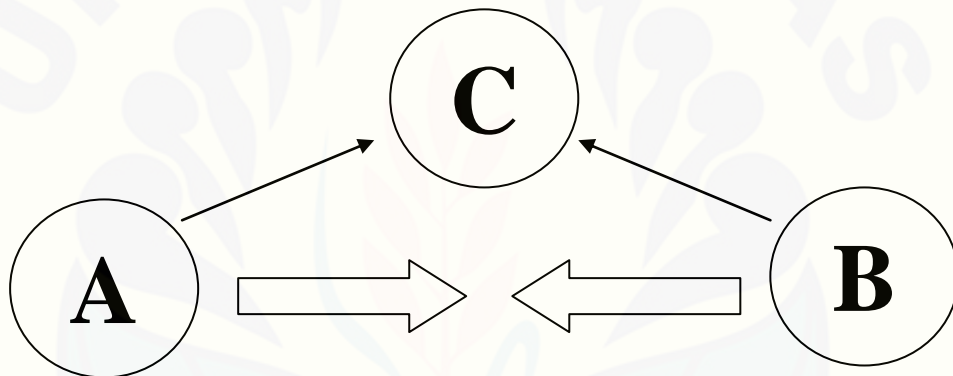
²⁴ Morgenthau. *Op. Cit.* Hal. 201.

sebagai Rusia dan C sebagai Mesir. Amerika Serikat dan Rusia saling berhadapan dalam bersaing memperebutkan pengaruh di Mesir.



Gambar 1.1 Pola Perlawanan Langsung

Sumber: Morgenthau, Hans. J. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta. Yayasan pustaka Obor Indonesia. Hal. 207.



Gambar 1.2 Pola Persaingan

Sumber: Morgenthau, Hans. J. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 207.

Dalam konteks kawasan Timur Tengah, Rusia memainkan peran sebagai aktor penyeimbang untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat yang berusaha mendominasi kekuatan di Timur tengah, khususnya Laut Mediterania. Dalam prosesnya, Rusia mengadakan koalisi dengan Suriah. Penjualan alutsista oleh Rusia ke Mesir dapat dibaca sebagai upaya untuk menanamkan pengaruhnya di Mesir. Posisinya yang strategis membuat Mesir dapat dijadikan salah satu negara yang dapat membantu Rusia untuk melancarkan usahanya mengimbangi pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Perimbangan kekuatan dapat diinterpretasikan sebagai ekulibrium yaitu hubungan Antara variabel yang saling berkaitan. Perubahan distribusi kekuatan oleh satu variabel akan menyebabkan perubahan pula pada variabel lain. Asumsinya, kepemilikan sumber daya kekuatan dapat membuat suatu negara menguasai wilayah atau negara lain sampai adanya kemunculan aktor lain yang memiliki kekuatan yang sama untuk mengimbangi usaha tersebut.²⁵

Sebagai negara dengan kekuatan besar, Amerika Serikat sangat memungkinkan untuk menguasai wilayah Timur Tengah, khususnya Laut Mediterania melalui armada keenam-nya. Posisi Amerika Serikat semakin kuat ketika mendapat dukungan negara-negara Eropa yang merupakan sekutunya. Usaha ekspansi Amerika Serikat secara otomatis akan mendapatkan perlawanan dari Rusia yang sejak lama telah menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara di Timur Tengah. Respon Rusia bertujuan untuk melindungi wilayah yang berada di bawah pengaruhnya dan negara yang merupakan sekutunya yaitu Suriah, serta bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat.

1.5.2 Geopolitik

Geopolitik sebagai teori dan praktek memiliki kaitan erat dengan negara sebagai institusi politik. Geopolitik pada abad ke-19 dipahami sebagai persaingan antar negara besar, terutama negara-negara di kawasan Eropa untuk menaklukkan negara yang lemah. Colin Flint mendefinisikan geopolitik sebagai perilaku negara menguasai dan memperebutkan wilayah.²⁶

Sir Harfold Mackinder membagi dunia menjadi 3 wilayah, *pivot area*, *inner crescent*, dan *outer crescent*. *Pivot area* adalah kawasan Eurasia, yang dianggap sebagai kawasan yang dihuni negara-negara ekspansif yang berusaha untuk menguasai kawasan lain di luar *pivot area*. Mackinder kemudian merevisi klasifikasi wilayah dunia menjadi *Heartland*, *World Island*, dan *World*. *Heartland* adalah *pivot area* yang menjadi inti dunia, sedangkan *World Island* adalah daratan Eurasia ditambah Afrika. Mackinder mengeluarkan diktum geopolitik yang

²⁵ Maso'ed. *Op. Cit.* Hal. 136

²⁶ Flint. 2006. *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge. Hal. 13.

menyebutkan bahwa “*who rules East Europe commands the Heartland, who rules the Heartland commands the World Island. Who commands the World Island commands the World*”.²⁷ Berdasarkan diktum tersebut yang harus dilakukan negara untuk menguasai wilayah lain adalah dengan mengakumulasi kekuatan armada laut. Mackinder juga menambahkan penguasaan daratan dengan mengakses wilayah daratan yang sulit dijangkau.²⁸

Berdasarkan penjelasan Mackinder dalam *Geographical Pivot Of History*, Rusia telah sejak lama menjadi salah satu aktor utama dalam kontestasi perebutan wilayah. Posisi geografi Rusia yang menguasai sebagian besar Heartland menjadikan Rusia sebagai negara yang memiliki cukup sumber daya yang mampu digunakan untuk melakukan ekspansi ke wilayah diluar Heartland. Sejak era perang dingin, Rusia yang dulu Uni Soviet telah menanamkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Menurut Alfred Mahan, laut merupakan arena yang penting untuk dikuasai suatu negara. Laut merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk mencapai kekuatan negara. Laut memiliki potensi ekonomi sebagai jalur perdagangan dan potensi penghasil sumber daya mineral. Agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi di wilayah laut tertentu maka negara harus menghadirkan kekuatan militer di wilayah itu untuk melindungi kepentingannya.

Dalam konteks wilayah Laut Mediterania, Mahan menyebutkan bahwa:

*“Circumstances have caused the Mediterranean Sea to play a greater part in the history of the world, both in a commercial and a military point of view, than any other sheet of water of the same size. Nation after nation has striven to control it, and the strife still goes on.”*²⁹

Secara geografis, kawasan di sekitar Laut Mediterania merupakan kawasan yang strategis dalam hal ekonomi dan keamanan negara. Kawasan ini sejak lama diperebutkan oleh banyak negara dan saat ini diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini karena negara-negara besar tersebut memiliki akses langsung

²⁷ Mackinder. *Geographical Pivot Of History*. The Geographical Journal vol. 23, no. 4 (April, 1904). London: Blackwell Publishing. Hal. 16.

²⁸ Flint. *Op. Cit.* Hal. 37.

²⁹ Mahan. 1890. *The Influence of Sea Power Upon History 1660 – 1783*. Boston: Little, Brown, and Company. Hal. 33.

ke perairan tersebut dan memiliki kepentingan nasional dibidang ekonomi dan keamanan. Laut Mediterania menjadi lalu lintas energi bagi Amerika Serikat dan sekutu yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Rusia juga memanfaatkan Laut Mediterania sebagai jalur lalu lintas energi, terutama dalam ekspor gas ke negara lain. Pada bidang keamanan, Amerika Serikat dan Rusia berusaha untuk menguasai wilayah laut Mediterania untuk melindungi wilayah laut mereka. Selain itu, negara-negara tersebut berkepentingan untuk menunjukkan kekuatan armada laut kepada negara-negara lain yang memiliki wilayah geografis di Laut Mediterania untuk menunjukkan bahwa mereka adalah negara dengan kekuatan besar sehingga memudahkan mendapatkan perhatian dan menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara di kawasan Laut Mediterania.

1.6 Argumen Utama

Dalam kasus ekspor alutsista Rusia ke Mesir, penulis berpendapat bahwa tujuan Rusia adalah memanfaatkan **Mesir sebagai kunci geopolitik Timur Tengah untuk mengamankan kepentingannya. Rusia memiliki kepentingan jangka pendek yaitu mengamankan ekspor senjata dan energi. Kepentingan jangka panjang Rusia adalah memperbesar kekuatan untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.**

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Supaya mendapat data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Pada tahap pengumpulan data, merupakan teknik untuk mencari dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pencarian informasi dan data dilakukan dengan membaca sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema dan rumusan masalah yang dijelaskan. Pada teknik analisa data, penulis akan melakukan generalisasi dari data-data yang di dapat dari berbagai sumber.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan artikel dari sumber resmi yang didapat dari perpustakaan universitas dan sumber resmi di internet.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Alur pemikiran penelitian ini adalah dari umum ke khusus. Penulis akan menjelaskan secara deskriptif kualitatif kepentingan Rusia dalam penjualan alutsista dengan Mesir, kemudian menganalisa perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Penulis menggunakan data penjualan Rusia pada sektor energi dan senjata di Timur Tengah untuk mengidentifikasi kepentingan jangka pendek Rusia. Kepentingan Rusia terhadap Mesir dapat diidentifikasi dengan peningkatan data hubungan bilateral kedua negara pasca penjualan senjata Rusia ke Mesir tahun 2013. Kepentingan jangka panjang Rusia dapat diidentifikasi dari perbandingan kekuatan Amerika Serikat dengan Rusia. Data perbandingan kekuatan dapat menjelaskan adanya peluang bagi Rusia untuk memperbesar kekuatan dan mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan historis untuk mengetahui awal hubungan Rusia dengan Mesir dan manuvernya di Timur Tengah, sehingga alur dari umum ke khusus dalam penelitian ini dapat disajikan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang hubungan Rusia dengan Mesir dan konstelasi politik internasional di Timur Tengah yang mengantarkan kepada pemahaman mengapa muncul permasalahan seperti yang diajukan. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen utama dan metode penelitian.

BAB 2 GEOPOLITIK TIMUR TENGAH DAN POLITIK LUAR NEGERI RUSIA

Berisi tentang geopolitik kawasan Timur Tengah dan politik luar negeri dan geostrategi Rusia yang merupakan landasan bagi negara tersebut menentukan sikap politik terhadap negara lain di kawasan Timur Tengah.

BAB 3 PERIMBANGAN KEKUATAN DI TIMUR TENGAH

Berisi tentang pemetaan perimbangan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya serta kekuatan Rusia dan sekutunya di Timur Tengah. Data yang digunakan adalah perbandingan kekuatan negara-negara tersebut.

BAB 4 STRATEGI RUSIA TERHADAP MESIR DAN UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN DI TIMUR TENGAH

Berisi tentang pengidentifikasian kepentingan Rusia terhadap Mesir dalam penjualan alutsista baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB 5 KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dan penutup.

BAB 2

GEPOLITIK TIMUR TENGAH DAN POLITIK LUAR NEGERI RUSIA

Timur Tengah merupakan wilayah dengan posisi strategis. Kekuatan dalam dan luar wilayah saling bersaing dengan beragam kepentingan dan persaingan antar kepentingan inilah yang menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah rawan konflik dan penuh kekerasan. Kata ‘Timur Tengah’ pertama kali digunakan oleh seorang pemikir strategis dan Laksamana Amerika Serikat, Alfred Mahan tahun 1902 untuk menggambarkan kawasan antara Arabia dan India dengan Teluk sebagai pusatnya. Pada abad ke-19, Inggris menggunakan kata ‘Timur Dekat’ untuk menunjuk Kekaisaran Ottoman dan Levant, kemudian menyebut ‘Timur Tengah’ semasa perang dunia kedua untuk menunjuk markas militer di Mesir.³⁰

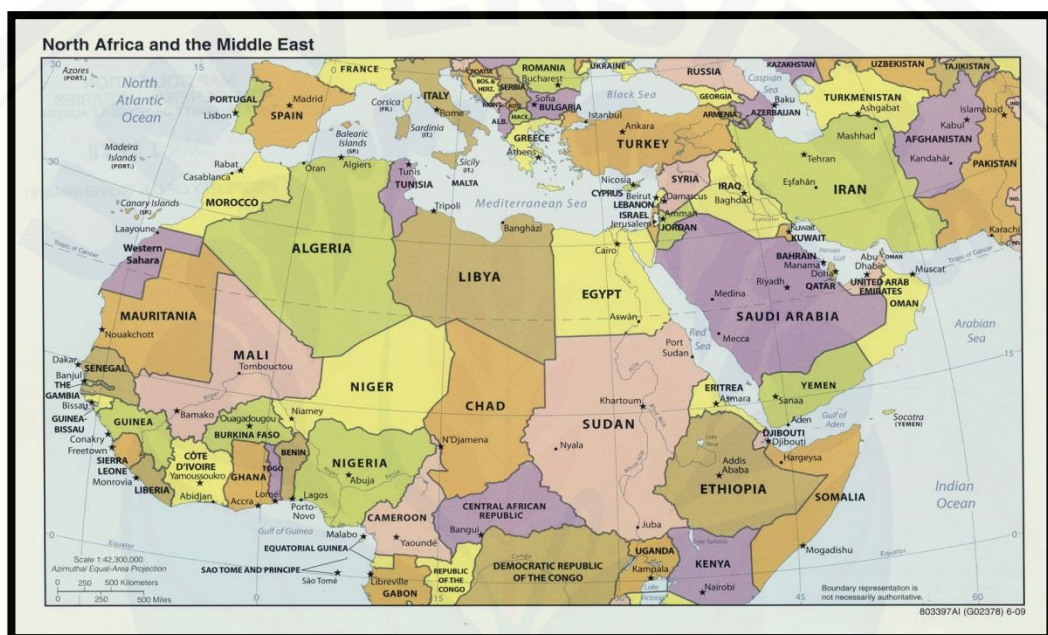
Kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang menghubungkan antara Benua Eropa, Asia, dan Afrika. Penulis mendeskripsikan wilayah geografis Timur Tengah dimulai dari Iran (Asia Barat atau Jazirah Arab) yang berbatasan dengan Asia Selatan dan Asia Tengah di sebelah timur hingga Maroko (Afrika Utara atau Magrib) yang berbatasan dengan Samudera Atlantik.³¹ Negara-negara yang termasuk dalam kawasan ini adalah Iran, Oman, Yaman, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Suriah, Yordania, Israel, Lebanon, Palestina, Siprus, Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia dan Maroko. Karakteristik kawasan ini adalah sebagai pusat Agama Islam.

Selama berabad-abad Timur Tengah menjadi arena kepentingan strategis oleh kekuatan besar baik negara diluar kawasan, negara di kawasan dan aktor lokal. Pihak yang berkepentingan di kawasan ini menciptakan landasan politik, ekonomi, dan kekuatan militer baik dalam bentuk kerajaan atau hegemoni politik, pengaruh yang dimiliki tidak hanya di Timur Tengah bahkan sampai ke wilayah di sekitarnya. Hal lain yang menjadikan Timur Tengah kawasan yang menarik

³⁰ Wylie. *The Middle East: Arena of Conflict and Competition* dalam Salmon. 2000. *Issues in International relations*. New York: Routledge. Hal. 173.

³¹ Barakat. 2012. *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*. Bandung: Nusa Media. Hal. 35-36.

perhatian adalah posisinya sebagai pusat kebudayaan dan awal peradaban serta pertemuan tiga agama besar dunia, Yahudi, Islam, dan Kristen. Islam mendominasi dalam jumlah tetapi terbagi dalam beberapa sekte. Bahasa Arab menjadi bahasa dominan tetapi di beberapa tempat terdapat banyak dialek serta bahasa lain seperti Bahasa Turki dan Bahasa Persia. Perbedaan kebudayaan menyumbang dalam membentuk ketidakstabilan, rivalitas dan ketidakamanan di kawasan.³²



Gambar 2.1 Peta Kawasan Timur Tengah

Sumber: The University of Texas at Austin. *Middle East Maps*. Diakses dari http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html pada tanggal 12 Februari 2015.

Negara-negara di kawasan Timur tengah tidak menunjukkan identitas tunggal dan kesamaan karakteristik, justru menegaskan perbedaan antar negara. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penegas perbedaan antar negara seperti perbedaan agama, sekte, ideologi, dan bentuk pemerintahan. Kawasan Timur Tengah menjadi tempat bagi tiga agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Islam menjadi agama bagi mayoritas masyarakat di Timur Tengah sedangkan Yahudi mayoritas terdapat di Israel dan Kristen tersebar di beberapa negara

³² Wyllie. *Op. Cit* Hal. 174.

seperti Lebanon dan Mesir. Islam sebagai agama mayoritas bukan sebuah identitas tunggal, justru Islam terbagi menjadi beberapa sekte, pembagian yang terbesar adalah Sunni dan Syiah. Perbedaan sekte telah seringkali menjadi akar konflik antar negara di kawasan tersebut. Ideologi negara-negara Timur Tengah mulai terbagi sejak masuknya pengaruh imperialisme negara-negara barat dan munculnya sistem negara-bangsa. Munculnya pan-Arabisme yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara Arab dimotori oleh Mesir tidak disukai oleh Arab Saudi yang lebih mempertahankan sistem kerajaan. Keadaan ini ditegaskan ketika era perang dingin saat negara-negara Timur Tengah terbagi antara memihak Amerika Serikat atau Uni Soviet.

Aktor-aktor yang menentukan aturan internasional memiliki tiga kekuatan dasar yaitu, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan militer. Kekuatan ekonomi adalah kemampuan negara menghasilkan dan menyediakan barang. Kekuatan politik adalah kemampuan negara untuk memaksa atau mempengaruhi rakyatnya sendiri atau rakyat di negara lain. Kekuatan militer adalah kemampuan negara mencapai tujuan menggunakan kekuatan koersif yang terorganisir.³³ Dalam sistem internasional, terutama di kawasan Timur Tengah, kemampuan ini tidak terdistribusi merata. Salah satu contoh, Arab Saudi memiliki kekuatan ekonomi besar melalui cadangan minyak tetapi tidak memiliki populasi besar dan tidak memiliki teknologi militer yang canggih. Pada sisi lain, Mesir memiliki populasi besar dan memiliki teknologi militer canggih tetapi tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk mengembangkannya.

2.1 Geopolitik Timur Tengah

Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi geopolitik di Timur Tengah. Pertama faktor geografis, diantaranya adalah ketersediaan suplai energi minyak dan jalur laut internasional. Kedua, faktor politik, keadaan politik dalam negeri dan politik luar negeri negara-negara Timur Tengah.

³³ Andersen *et al.* 2009. *Politics and Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*. New jersey: Person Education, Inc. Hal. 247.

2.1.1 Minyak

Kawasan Timur Tengah dikenal sebagai kawasan penghasil minyak terbesar di dunia. Minyak menjadi faktor penting dalam perekonomian negara-negara Timur Tengah. Hal ini merupakan salah satu nilai strategis kawasan yang diperebutkan oleh banyak aktor. Industri minyak di kawasan Timur Tengah dimulai dengan ditemukannya cadangan minyak di Iran tahun 1907. Perusahaan Inggris *Anglo/Persian Oil Company* dibentuk tahun 1908 dan menguasai 50 persen keuntungan sampai tahun 1914. Fenomena tersebut mendorong negara besar lain untuk ikut bermain dalam industri minyak di Timur Tengah. Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis mulai ikut dalam industri minyak di kawasan melalui perusahaan swasta pada tahun 1920. Industri minyak semakin berkembang pada tahun 1930-an. Beberapa perusahaan swasta asal Amerika Serikat dan Inggris mendapatkan konsesi minyak dengan negara-negara Timur Tengah seperti *Standard Oil of California (SoCal)* mendapat konsesi dengan Bahrain dan Provinsi al-Hasa di Arab Saudi, *Arabian-American Oil Company (Aramco)* yang juga mendapat konsesi di Arab Saudi, dan *Gulf Oil* dan *British Petroleum* mendapat konsesi dengan Kuwait.³⁴ Pada tahun 1948, perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris menguasai sebagian besar produksi minyak di Timur Tengah dengan melalui tujuh perusahaan swasta yaitu 4 dari Amerika Serikat (*Standard Oil of New Jersey, Mobil, SoCal, dan Texaco*) 1 dari Inggris (*British petroleum*) dan 1 perusahaan gabungan Inggris-Belanda (*Shell*).³⁵

Penguasaan minyak oleh perusahaan dari negara-negara maju membuat negara-negara Timur Tengah membuat sebuah organisasi pengekspor minyak untuk meningkatkan daya tawar mereka. Kemunculan *Organization of Exporting Countries Petroleum (OPEC)* meningkatkan harga minyak dan pemasukan bagi negara-negara eksportir minyak sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam politik internasional. OPEC dibentuk oleh lima negara penghasil minyak yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela di Baghdad tahun 1960. Tujuan OPEC adalah untuk mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan minyak dan gas

³⁴ *Ibid.* hal. 239.

³⁵ *Ibid.* hal. 240.

sesama negara anggota demi keamanan perdagangan dan harga yang stabil bagi negara penghasil dan harga ekonomi serta persediaan yang cukup untuk negara konsumen dan penghasilan yang adil untuk investasi dalam industri minyak.³⁶ Pada awal kemunculannya, OPEC tidak memiliki peran signifikan. Pada tahun 1973, OPEC mulai memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemasukan bagi negara-negara anggota. Kenaikan harga minyak dimulai ketika Iran dan Aljazair mendapat konsesi baru yang lebih menguntungkan dalam penjualan minyak, kemudian diikuti oleh pemerintahan baru Libya pasca revolusi di bawah Muammar Khaddafi. Faktor lain yang mendorong kenaikan harga minyak adalah konflik Arab dengan Israel yang berdampak pada penutupan Terusan Suez, ditambah dengan keputusan Amerika Serikat menurunkan mata uang Dolar yang mengakibatkan penurunan nilai pendapatan bagi negara pengekspor minyak turun dan penurunan produksi minyak Amerika Serikat. Pada tahun 1974, negara-negara anggota OPEC melakukan embargo minyak kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat karena mendukung Israel dalam konflik Arab dengan Israel. Upaya OPEC berhasil dilakukan karena dukungan dari eksportir terbesar yaitu Arab Saudi. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa minyak memiliki peran penting yang membentuk politik internasional di kawasan Timur Tengah. Kemunculan OPEC merupakan alat yang cukup kuat bagi negara-negara Timur Tengah untuk meningkatkan posisi tawar dan melawan kekuatan negara-negara Barat yang menjadi hegemon di kawasan Timur Tengah. Sampai saat ini, OPEC memiliki peran dalam membentuk politik internasional di Timur Tengah.

³⁶ The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). *Brief History*. Diakses dari http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm pada tanggal 12 Februari 2015.

Tabel 2.1 Produksi Minyak Negara-Negara Anggota OPEC

Negara	2009	2010	2011	2012	2013
Aljazair	1.268.000	1.250.000	1.240.000	1.210.000	1159.000
Iran	3.725.000	3.706.000	3.628.000	2.973.000	2.693.000
Irak	2.422.000	2.401.000	2.665.000	2.979.000	3.037.000
Kuwait	2.263.000	2.297.000	2.538.000	2.793.000	2.822.000
Libya	1.557.000	1.559.000	462.000	1.393.000	928.000
Qatar	770.000	791.000	794.000	753.000	732.000
Arab Saudi	8.054.000	8.254.000	9.296.000	9.737.000	9.584.000
Uni Emirat Arab	2.256.000	2.304.000	2.516.000	2.624.000	2.741.000
Angola	1.783.000	1.786.000	1.667.000	1.738.000	1.737.000
Ekuador	477.000	475.000	490.000	499.000	515.000
Nigeria	1.812.000	2.061.000	2.111.000	2.073.000	1.912.000
Venezuela	2.394.000	2.338.000	2.380.000	2.359.000	2.356.000
Total	28.780.000	29.222.000	29.788.000	31.132.000	30.214.000

Sumber: Hamid. 2014. *Annual Report 2013*. Vienna. Organization of Exporting Countries Petroleum Public Relations and Information Department. Hal. 18.

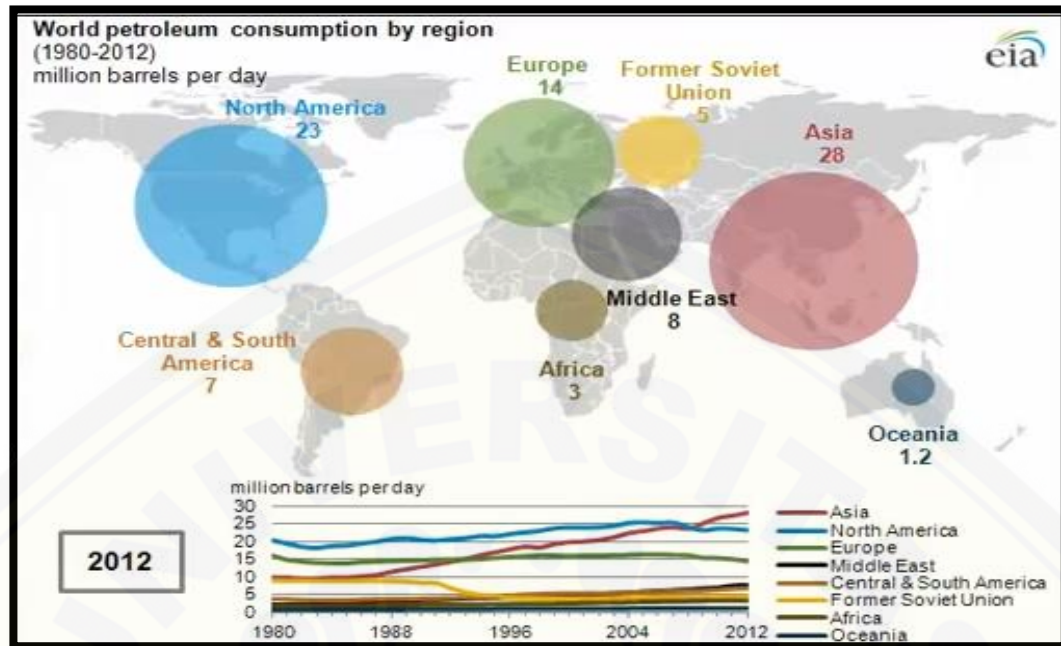
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa *lifting* minyak negara-negara Timur Tengah merupakan jumlah yang terbesar dibanding dengan *lifting* dari negara-negara di kawasan lain. Data menunjukkan *lifting* minyak negara-negara Timur Tengah pada tahun 2013 mencapai 23.696 juta barrel per hari (bph). Angka tersebut sekitar tigaperempat dari total produksi negara-negara OPEC. Besarnya produksi minyak dari kawasan Timur Tengah merupakan daya tarik bagi kekuatan besar dunia menaruh kepentingan di kawasan tersebut. Negara-negara besar membutuhkan minyak untuk menjalankan ekonomi.

Sampai saat ini, industri minyak Timur Tengah terus mengalami perkembangan dari segi *lifting* negara-negara penghasil. Industri minyak juga digerakkan oleh munculnya konsumen lain dari negara-negara industri baru seperti Cina, India, Brazil dan negara Asia lain. Munculnya kekuatan ekonomi baru di Asia dan Amerika Selatan mendorong peningkatan konsumsi minyak dunia. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 kawasan Asia mengonsumsi minyak 28 juta bph yang merupakan kawasan dengan konsumsi terbesar. Kawasan Amerika Utara menjadi konsumen terbesar kedua dengan 23 juta bph. Eropa merupakan kawasan terbesar ketiga dengan konsumsi 14 juta bph.

Kawasan timur tengah menjadi konsumen terbesar keempat dengan konsumsi delapan juta bph. Kawasan Amerika Selatan menjadi konsumen terbesar kelima dengan tujuh juta bph. Kawasan pecahan Uni Soviet mengonsumsi lima juta. Kawasan Afrika dan Oceania 4,2 juta bph. Konsumsi minyak Amerika Serikat yang besar menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai salah satu kawasan yang penting dalam politik luar negerinya.

Sebagai produsen, negara-negara Timur Tengah mendapatkan keuntungan dari meningkatnya konsumsi minyak dunia. Pada sisi lain, kebutuhan minyak yang tinggi mendorong berbagai negara mulai ikut bermain dalam politik regional Timur Tengah. Perusahaan minyak asal Asia mulai ikut melakukan eksplorasi di kawasan Timur Tengah seperti Petronas asal Malaysia dan Sinopec asal Cina. Keadaan tersebut membuat negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tidak ingin kehilangan kawasan yang merupakan penyuplai minyak mereka.

Kekayaan alam negara-negara Timur Tengah menjadikan mereka waspada dalam menjaga wilayah kedaulatannya. Negara-negara Timur Tengah hidup dalam lingkungan yang penuh konflik dan keberadaan negara tetangga yang mengincar kekayaan masing-masing negara di Timur Tengah. Pendapatan nasional yang besar dari minyak digunakan negara-negara Timur Tengah untuk meningkatkan keamanan wilayah mereka. Negara-negara Timur Tengah banyak mengimpor alat-alat pertahanan dari Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia sehingga menimbulkan kepentingan yang kompleks antara negara-negara tersebut dengan kekuatan asing.



Gambar 2.3 Konsumsi Minyak Dunia Tiap Kawasan

Sumber: Brad Plumer. 26 Agustus 2013. *These Maps Show How Asia Is Taking Over The Oil Markets*. Diakses dari

<http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/26/these-maps-show-how-asia-is-taking-over-the-oil-markets/> pada tanggal 12 Februari 2015.

2.1.2 Jalur Laut Internasional

Selain faktor minyak, kondisi geografis Kawasan Timur Tengah yang strategis adalah adanya jalur perairan yang menjadi lalu lintas angkutan antar benua yaitu Selat Hormuz, Teluk Aden, Laut Merah, Terusan Suez, dan Laut Mediterania. Jalur ini merupakan penggerak ekonomi di kawasan Timur Tengah yang mengalirkan Barang dari Timur Tengah ke belahan dunia lain dan sebaliknya. Terusan Suez memiliki peran paling penting dalam lalu lintas perairan karena merupakan jalur yang menghubungkan perairan Eropa dengan perairan Asia dan Afrika. Pentingnya keberadaan jalur laut di kawasan Timur Tengah karena minyak yang berasal dari kawasan tersebut diangkut melalui jalur laut menuju berbagai kawasan di dunia. Data dari *U.S. Energy Information Administration* (EIA) menyebutkan bahwa minyak yang diikirim melalui jalur

laut mencapai 56,5 juta bph pada tahun 2013.³⁷ Selat Hormuz merupakan pertemuan antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Jalur laut ini penting karena sebagian besar kapal yang mengangkut minyak melewati jalur ini terutama kapal dari Irak, Kuwait, Bahrain, dan Qatar yang hanya memiliki akses laut di jalur tersebut. Minyak yang berasal dari kawasan tersebut sebagian besar menuju Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Adanya gangguan di wilayah jalur laut tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan instabilitas.

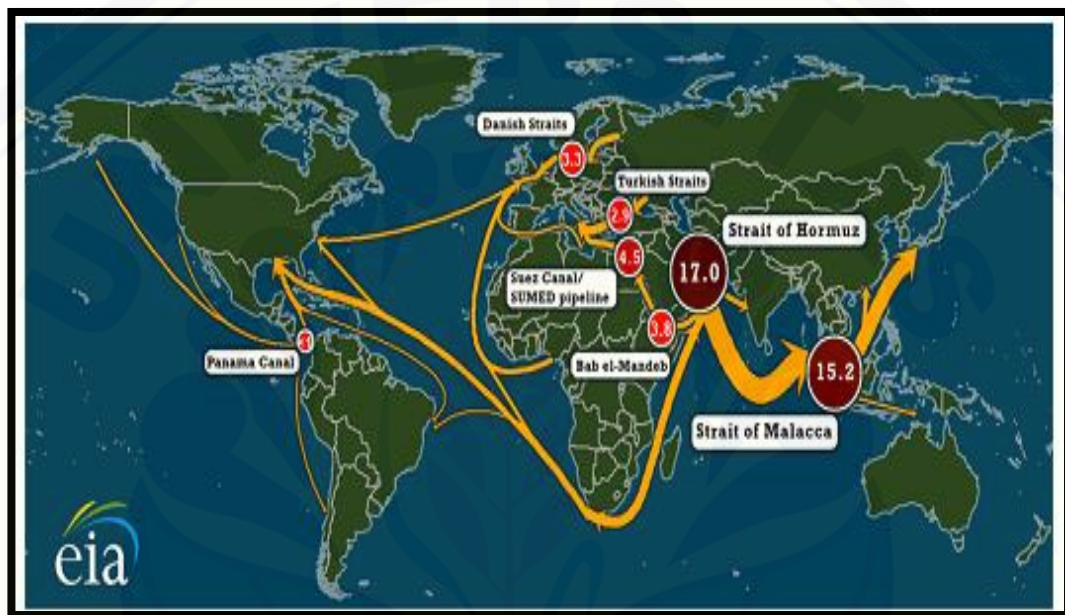
Teluk Aden dan Laut Merah merupakan satu jalur laut yang disebut Selat Bab Al-Mandab. Jalur ini terbentang mulai dari Pesisir Yaman dan beberapa wilayah Pesisir Afrika sampai ke Sinai yang terdapat Terusan Suez. Jalur ini masih merupakan jalur ekonomi termasuk minyak. Jalur laut ini salah satu kawasan perairan yang berbahaya bagi pelayaran karena terdapat ancaman dari pembajak kapal dari Somalia.

Terusan Suez merupakan jalur laut buatan yang berada di wilayah Mesir. Jalur ini menghubungkan antara Laut Merah dengan Laut Mediterania. Sebagian jalur pelayaran dari Timur Tengah menuju Eropa dan sebaliknya melewati jalur ini. Pada awalnya Terusan Suez berada dibawah kontrol Inggris ketika wilayah Mesir dibawah kekuasaan Inggris pada 1869. Sejak berdiri tahun 1869, Terusan Suez dijalankan oleh perusahaan Inggris-Perancis Suez Canal Company. Pada tahun 1956, pemerintahan Mesir, pada masa Nasser melakukan nasionalisasi perusahaan tersebut dan menguasai jalur laut Terusan Suez. Pada masa konflik Arab-Israel, Mesir pernah menutup Terusan Suez yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Hal ini yang menjadikan Terusan Suez sebagai jalur laut yang penting.

Sebelah utara setelah Terusan Suez terdapat Laut Mediterania yang berada diantara Benua Eropa dan Benua Afrika. Laut Mediterania menjadi wilayah perairan bagi banyak negara. Selain sebagai jalur komersial, Laut Mediterania juga menjadi tempat bagi negara-negara di kawasan menempatkan armada militernya. Salah satu jalur penting yang terletak di perairan Mediterania adalah

³⁷ U.S. Energy Information Administration (EIA). 2014. *World Oil Transit Chokepoints*. Diakses dari http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf pada tanggal 16 April 2015.

Selat Turki yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Hitam. Gambar 2.4 menunjukkan lalu lintas di jalur laut yang membawa minyak dari Timur Tengah menuju belahan dunia lain pada tahun 2013. Selat Hormuz merupakan jalur laut dengan volume pengiriman minyak tertinggi dengan 17 juta bph, diikuti oleh Terusan Suez dengan 4,6 juta bph, Selat Bab Al-Mandab dengan 3,8 juta, dan Selat Turki yang terletak di Mediterania Timur dengan 2,9 juta bph.



Gambar 2.4 Jalur Laut Internasional

Sumber: U.S. Energy Information Administration (EIA). 10 November 2014. *World Oil Transit Chokepoints*. Diakses dari http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf pada tanggal 16 April 2015.

Besarnya volume perdagangan terutama minyak, maka sangat penting bagi negara-negara Timur Tengah untuk mengamankan jalur-jalur tersebut. Upaya itu diwujudkan dengan melakukan patroli militer sampai menempatkan armada militer di kawasan. Ketidakmampuan negara-negara Timur Tengah menjamin keamanan di jalur-jalur tersebut kemudian mendorong negara-negara besar menempatkan armada militernya di kawasan. Negara-negara besar yang berkepentingan di kawasan juga berusaha mengamankan kepentingannya dengan menempatkan armada militer.

2.1.3 Politik Dalam Negeri Negara-Negara Timur Tengah

Kondisi politik dalam negeri negara-negara Timur Tengah saat ini banyak dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara Barat pasca kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam perang dunia satu. Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah yang kini menjadi negara Turki, Lebanon, Suriah, Irak, Yordania, Palestina, Israel, Kuwait, sebagian Arab Saudi, sebagian Yaman, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Pada abad 19, kedatangan kekuatan negara-negara Eropa mengambilalih sebagian kekuasaan Kekaisaran Ottoman terutama di wilayah Afrika Utara. Perjanjian Hussein-McMahon tahun 1915 mengakhiri Kekaisaran Ottoman sekaligus memulai gerakan kemerdekaan di beberapa wilayah. Perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Perancis memulai pengaruh besar negara-negara Eropa di kawasan. Tahun 1917 muncul Deklarasi Balfour yang bertujuan untuk membentuk negara Yahudi di wilayah yang dikuasai Inggris. Pasca perang dunia satu hingga perang dunia dua, negara-negara Eropa saling menguasai wilayah di Timur Tengah. Pasca perang dunia dua mulai muncul negara-negara baru di kawasan Timur Tengah seperti yang dikenal saat ini yang dulunya merupakan bagian dari provinsi Kekaisaran Ottoman.

Faktor penting yang mempengaruhi politik negara-negara Timur Tengah adalah bentuk pemerintahan dan agama mayoritas di negara mereka. Agama juga dipengaruhi oleh sekte yang dominan di masing-masing negara. Politik dalam negeri juga dipengaruhi oleh sejarah dan ideologi bahkan juga gerakan massa yang pernah dialami masing-masing negara. Agama dan politik saling berkaitan dalam politik dalam negeri yang akhirnya membentuk berbagai model pemerintahan. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah masih didominasi oleh Islam Sunni yang menjadi mayoritas di hampir semua negara kecuali di Iran, Irak, dan Bahrain yang mayoritas Islam Syiah.

Bentuk pemerintahan di Timur Tengah pada masa awal identik dengan monarki atau kesultanan. Perjalanan politik negara-negara Timur Tengah dan masuknya pengaruh dari negara-negara barat melahirkan dua bentuk pemerintahan yaitu republik dan monarki. Perbedaan itu masih terbagi menjadi beberapa bentuk, beberapa negara masih mempertahankan bentuk pemerintahan

tradisional, monarki absolut dan beberapa melakukan campuran sistem barat dan tradisional menjadi monarki konstitusional. Beberapa negara di kawasan juga mengadopsi bentuk pemerintahan model barat yaitu republik. Dalam beberapa kasus terjadi gerakan massa yang berkaitan dengan agama atau sekte tertentu yang akhirnya melahirkan republik islam.

Tabel 2.1 menunjukkan pemerintahan monarki terdapat di Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Maroko. Bentuk monarki di Arab Saudi dan Oman masih tradisional yaitu monarki absolut karena kepemimpinan di kedua negara tersebut sepenuhnya dipegang oleh raja. Bentuk pemerintahan campuran tradisional dan modern, monarki konstitusional terdapat di Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Terdapat berbagai perbedaan dalam penerapan monarki konstitusional di negara-negara tersebut. Yordania memberikan ruang untuk adanya pemilihan legislatif, kepala pemerintahan dan aktivitas partai politik. Bahrain melarang partai politik tetapi melegalkan gerakan sosial, sementara pemilihan legislatif dilakukan oleh dewan konsultatif yang ditunjuk raja dan kepala pemerintahan dilakukan oleh raja. Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kekuasaan dipegang oleh amir yang memilih kepala negara dan legislatif. Ketiga negara tersebut melarang aktivitas politik dan partai politik. Bentuk pemerintahan republik terdapat di Iran, Irak, Yaman Turki, Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, Mesir, Libya, Aljazair, dan Tunisia. Seperti negara republik pada umumnya, negara-negara tersebut melegalkan aktivitas politik dan partai politik.

Tabel 2.2 Bentuk Pemerintahan dan Agama Negara-Negara Timur Tengah

NEGARA	BENTUK PEMERINTAHAN	AGAMA MAYORITAS
Iran	Republik Islam	Islam (Syiah)
Arab Saudi	Monarki absolut	Islam (Sunni)
Bahrain	Monarki konstitusional	Islam (Syiah)
Kuwait	Monarki konstitusional	Islam (Sunni)
Qatar	Monarki konstitusional	Islam (Sunni)
Oman	Monarki absolut	Islam (Sunni)
Uni Emirat Arab	Monarki konstitusional	Islam (Sunni)
Yaman	Republik	Islam (Sunni)
Yordania	Monarki konstitusional	Islam (Sunni)
Irak	Republik	Islam (Syiah)
Turki	Republik	Islam (Sunni)
Suriah	Republik	Islam (Sunni)
Lebanon	Republik	Islam (Sunni)
Israel	Republik	Yahudi
Palestina	Republik	Islam
Mesir	Republik	Islam (Sunni)
Libya	Republik	Islam (Sunni)
Aljazair	Republik	Islam (Sunni)
Tunisia	Republik	Islam (Sunni)
Maroko	Monarki konstitusional	Islam (Sunni)

Sumber: CIA. 2014. *The World Factbook*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html> pada tanggal 18 Februari 2015.

Islam sebagai agama dominan memainkan peran besar dalam membentuk politik. Beberapa negara Timur Tengah mengalami persaingan antara penerapan pemerintahan modern sekuler dan republik Islam. Iran semasa pemerintahan Syah Reza Pahlevi menerapkan pemerintahan sekuler. Praktek sekularisme berjalan bersama kedekatan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Sekularisme di Iran tidak berjalan demokratis, Syah Reza Pahlevi memerintah dengan otoriter, gagal membangun kesejahteraan rakyat dan tetap melindungi kepentingan Amerika dan Israel. Faktor-faktor tersebut mendorong Rakyat Iran melakukan gerakan massa yang dipimpin oleh Ayatulloh Khomeini. Gerakan tersebut berhasil menjatuhkan pemerintahan Reza Pahlevi dan menggantikan sistem pemerintahan Iran menjadi Republik Islam yang berdasarkan ajaran-ajaran Syiah sehingga menciptakan sistem campuran antara demokarsi dan Islam. Persaingan antara pemerintahan

sekuler dan kelompok pro republik Islam juga terjadi di Aljazair. *Front Islamique du Salut* (FIS) atau Front Penyelamat Islam berhasil memenangkan pemilu tahun 1991 tetapi pemerintah yang didukung militer membatalkan hasil pemilu dan mulai terjadi konflik di negara tersebut. Pemerintah sekuler berhasil mempertahankan kekuasaan sementara FIS gagal menguasai pemerintahan. Kelompok-kelompok Islam yang mendukung FIS bersatu bersama kelompok teror Al-Qaida dan menghasilkan jaringan terorisme.³⁸

Negara-negara Timur Tengah memiliki tingkat kebebasan politik yang sangat terbatas. Pemerintah banyak melarang aktivitas politik atau kritik masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap mengganggu stabilitas dan mengancam kekuasaan *status quo*. Keadaan tersebut telah berlangsung lama dan sering terjadi gerakan massa yang menuntut perubahan politik kearah yang lebih demokratis. Tunisia menjadi negara pertama yang terjadi gelombang gerakan massa untuk menuntut perubahan dan keterbukaan politik yang dikenal dengan fenomena *Arab Spring*. Gerakan ini berhasil menjatuhkan pemerintahan otoriter Ben Ali.

Keberhasilan di Tunisia menjadi inspirasi bagi gerakan serupa di beberapa negara Timur Tengah. gerakan menuntut perubahan dan keterbukaan politik muncul di Mesir, Libya, dan Suriah. Gerakan di Mesir dan Libya berhasil menjatuhkan rezim penguasa, Hosni Mubarak di Mesir dan Muammar Khaddafi di Libya sedangkan di Suriah gerakan massa mengarah pada konflik bersenjata yang belum selesai. Tunisia menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang berhasil melakukan demokratisasi melalui proses politik yang minim kekerasan, berbeda dengan Mesir dan Libya. Gerakan massa di kedua negara tersebut tidak langsung menghasilkan keterbukaan politik. Mesir mengalami kerusuhan berdarah sebelum berhasil mengadakan pemilu yang dimenangkan Muhamad Morsi yang didukung organisasi Ikhwanul Muslimin. Pasca kemenangan Morsi, Mesir kembali dilanda kerusuhan dan mendorong militer untuk ikut ke dalam politik dan akhirnya terjadi kudeta oleh militer. Pasca kudeta, Mesir kembali mengadakan

³⁸ CIA. *The World Factbook*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html> pada tanggal 18 Februari 2015.

pemilu dan dimenangkan oleh Abdel Fatah el-Sisi yang berasal dari militer. Berkuasanya Sisi menandai politik Mesir kembali ke arah otoritarianisme. Libya mengalami konflik persaingan perebutan kekuasaan pasca jatuhnya Khaddafi. Pihak pemberontak yang dan pihak pemerintah saling menguasai wilayah-wilayah yang menjadikan negara tersebut mengalami kekosongan kekuasaan. Gerakan massa di Libya tidak menghasilkan keterbukaan politik, malah menjadikan negara tersebut sebagai arena perang saudara.

2.1.4 Politik Luar Negeri Negara-Negara Timur Tengah

Sebagian besar penduduk negara-negara Arab memandang dirinya dan dipandang oleh orang lain sebagai Bangsa Arab. Sentimen nasionalisme Arab ini berdasarkan sesuatu yang dimiliki bersama, bahasa, budaya, pengalaman sosial politik, kepentingan ekonomi, dan memori kolektif berkaitan dengan posisi dan peran mereka dalam sejarah.³⁹ Sentimen semacam ini yang mendorong pemimpin negara-negara Timur Tengah merasa perlu untuk membangun kedekatan dan penyatuan tindakan politik, terutama dalam politik internasional. Terbentuknya Liga Arab di Kairo pada tahun 1945 yang diikuti tujuh negara Arab diantaranya, Mesir, Irak, Arab Saudi, Yaman, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Liga Arab dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan negara-negara Arab di bidang politik dan menyelesaikan masalah-masalah antara negara-negara Arab dengan negara lain seperti konflik dengan Israel. Upaya lain untuk penyatuan negara-negara Arab yaitu pada tahun 1958, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser melakukan kampanye gerakan pan-Arab. Gerakan ini bertujuan untuk penyatuan nasional secara konstitusional Mesir dengan negara-negara Arab yang memiliki potensi untuk menjadi sekutu. Mesir mengajukan ide ini kepada lima negara, Suriah, Sudan, Irak, Libya, dan Yaman. Hasilnya strategi pan-Arab menghasilkan persatuan Mesir dan Suriah pada tahun 1958. Penyatuan ini hanya bertahan sampai tahun 1961 ketika di Suriah terjadi kudeta oleh militer.

Berdirinya negara Yahudi, Israel, pada tahun 1948 mendapat tentangan dari negara-negara Arab karena menempati wilayah Palestina dan mengurus

³⁹ Barakat. *Op. Cit.* Hal. 44.

pemukiman Arab di wilayah tersebut. Pada tahun 1948, pasca deklarasi kemerdekaan Israel, Liga Arab memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan dengan konflik militer. Tujuh negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab melawan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris. Liga Arab gagal mengalahkan Israel dalam perang tersebut dan negara Israel tetap berdiri. Konflik kembali terulang pada tahun 1956 dengan aktor yang sama dan berujung dengan hasil yang sama pula. Perang berlanjut pada tahun 1967. Israel berhasil mengalahkan pasukan Mesir, Suriah, dan Irak serta menguasai wilayah Jerusalem, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Sinai. Mesir berhasil mengalahkan Israel dan merebut kembali Sinai dan Terusan Suez pada perang tahun 1973. Kemenangan ini tidak berpengaruh banyak pada pembabasan Palestina.

Kegagalan upaya militer dalam konflik Arab-Israel mendorong negara-negara Arab menggunakan cara lain untuk menekan sekutu Israel yaitu Amerika Serikat dan Inggris. OPEC yang dibentuk tahun 1960, awalnya memiliki tujuan ekonomi berubah menjadi alat politik negara-negara Arab eksportir minyak untuk menekan negara-negara barat yang mendukung Israel. OPEC melakukan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pendukung Israel. Upaya tersebut berhasil membuat Israel dan Sekutunya menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai dan meredakan ketegangan pasca perang Yom Kippur tahun 1973. Kekalahan dalam perang Arab-Israel semakin menguatkan prestis negara-negara Arab, terutama Mesir. Opini dunia mendukung langkah Mesir dan menurunkan dukungan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Naiknya Anwar Sadat menjadi Presiden Mesir tahun 1971 menggantikan Nasser, mengubah politik internasional di Timur Tengah. Hasil perang Yom Kippur tahun 1973 mendorong Mesir dan Israel untuk melakukan perjanjian damai di Camp David, Amerika Serikat yang isinya adalah pengembalian wilayah Mesir yang dikuasai Israel hasil perang 1963, pengakuan Mesir atas eksistensi negara Israel, pengakuan wilayah otonomi Jalur Gaza dan Tepi barat dan pembahsan masa depan rakyat Palestina. Perjanjian ini adalah awal dari proses perdamaian Arab-Israel dan kedaulatan Palestina. Perjanjian Camp David juga menjadi awal normalisasi hubungan bilateral Mesir-Israel. Hubungan tersebut

menjadi semacam pengakuan bagi Israel untuk menguasai wilayah Palestina lebih luas karena Mesir tak lagi konfrontatif dengan kebijakan Israel tersebut. Sikap Mesir yang berubah menjadi pasif terhadap Israel dan berhubungan baik dengan Amerika Serikat mendapat kecaman dari negara-negara Arab lainnya seperti dari Arab Saudi dan Kuwait.

Salah satu organisasi internasional yang berpengaruh di Timur Tengah adalah *Gulf Cooperation Council* (GCC). GCC dibentuk oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain yang bertujuan untuk kerjasama ekonomi dan pertahanan. GCC memiliki peran penting di kawasan ketika terjadi invasi Irak ke Kuwait 1990. GCC bersama koalisi internasional yaitu Mesir, Suriah, Maroko, Amerika Serikat dan Inggris mengadakan *Operation Dessert Storm*. Operasi itu bertujuan melakukan serangan kepada Irak untuk membebaskan Kuwait. Operasi militer tersebut menjadi suatu fenomena baru karena negara-negara Teluk yang awalnya memusuhi Amerika Serikat dan Inggris dalam perang Arab dengan Israel berubah menjadi koalisi. Negara-negara Arab tetap menjaga jarak untuk memunculkan opini bahwa mereka tidak sepenuhnya menjadi sekutu Amerika Serikat di kawasan. Hal ini terlihat ketika invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2002 untuk menjatuhkan rezim Saddam Husein hanya diikuti oleh Kuwait dan Qatar.

Beberapa peristiwa membuktikan bahwa politik luar negeri Timur Tengah pragmatis dan mengutamakan kepentingan nasional untuk bertahan hidup. Politik luar negeri kadang dibentuk atas dasar ideologi yang menyamarkan sisi pragmatis dari praktek politik luar negeri mereka. Pergantian kepemimpinan di setiap negara juga berkontribusi terhadap perubahan politik luar negeri. Mesir sempat membangun hubungan diplomatik dengan Uni Soviet ketika Perang Arab dengan Israel dibawah pemerintahan Nasser. Pada masa pemerintahan Sadat, Mesir yang memusuhi Israel dan sekutu Baratnya akhirnya dapat membangun hubungan diplomatik dan mengesampingkan prospek kemerdekaan Palestina. Sama halnya dengan Arab Saudi yang menentang eksistensi Israel tetapi tidak bisa lepas dari perusahaan minyak negara-negara barat pendukung Israel dan mendapat suplai senjata dari Amerika Serikat. Sikap pragmatis Arab Saudi kembali ditunjukkan

ketika bersama negara-negara Teluk lain membangun koalisi dengan Amerika Serikat untuk menyerang Irak yang menginvasi Kuwait.

Tabel 2.3 Peristiwa Internasional di Timur Tengah

Tahun	Peristiwa	Aktor Regional
1945	Terbentuknya Liga Arab	Mesir, Irak, Arab Saudi, Yaman, Yordania, Lebanon, Suriah
1948	Berdirinya negara Israel	Israel
1948	Perang Arab – Israel	Israel, Liga Arab
1956	Perang Arab – Israel	Israel, Liga Arab
1958	Pan-Arabisme Nasser	Mesir, Suriah
1960	Berdirinya OPEC	Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi
1967	Perang Enam Hari	Israel, Liga Arab
1970	Perang Yom Kippur	Israel, Liga Arab
1980	Berdirinya Gulf Cooperation Council (GCC)	Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman
1991	Operasi Dessert Storm	Irak, GCC, Mesir, Suriah, Maroko
2002	Invasi Amerika Serikat ke Irak	Irak, Qatar, Kuwait

Sumber: Andersen *et al.* 2009. *Politics and Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*. New Jersey: Person Education, Inc. Hal. 263-266.

2.2 Politik Luar Negeri Rusia

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi pewaris kekuatan negara tersebut. Boris Yeltsin mengesahkan konsep politik luar negeri Rusia tahun 1993. Agenda internasional Rusia pasca Uni Soviet adalah membangun hubungan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet dan membentuk *Commonwealth of Independent States* (CIS). Negara-negara anggota CIS adalah Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Tajikistan dan Uzbekistan. Rusia mengutamakan membangun hubungan dengan negara-negara CIS karena letak geografisnya yang berdekatan.⁴⁰ Penting bagi Rusia untuk memastikan keberpihakan negara-negara CIS menjadi sukutu karena jika negara-negara CIS menjadi sekutu Amerika Serikat maka dapat mengancam keamanan Rusia. Rusia juga melakukan normalisasi hubungan luar negeri dengan sekutu-sekutu tradisional di Timur Tengah dan Asia Timur. Rusia juga menghidupkan kembali

⁴⁰ Sakwa. 2002. *Russian Politics and Society*. New York: Routledge. Hal. 352.

hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Israel.

Pada tahun 2000, Vladimir Putin mengesahkan konsep politik luar negeri baru yang mengadopsi dari pemerintahan Yeltsin. Konsep politik luar negeri Rusia tahun 2000 berusaha untuk mewujudkan “Eurasianisme”. Konsep ini memprioritaskan pembangunan karakter negara Rusia atau disebut nasionalis pragmatis. Rusia mengimplementasikan taktik oportunistik pragmatis sekaligus menjadi mediator dialog multilateral kebudayaan, peradaban, dan negara.⁴¹ Pemerintahan Dmitri Medvedev melakukan revisi konsep politik luar negeri pada tahun 2008. Konsep politik luar negeri yang baru bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan Rusia dalam menghadapi ancaman keamanan di era baru seperti perang dunia maya dan terorisme non-konvensional.⁴²

Rusia sempat beberapa kali melakukan revisi konsep politik luar negeri yaitu pada tahun 1993, 2000, dan 2008. Kembali terpilihnya Vladimir Putin menjadi Presiden Federasi Rusia pada tahun 2012, segera diikuti oleh perubahan konsep politik luar negeri yang dikeluarkan tahun 2013. Konsep politik luar negeri memiliki kerangka kerja lebih luas tentang visi strategis Rusia yang secara tersirat menyebut strategis keamanan nasional 2020 dan doktrin militer. Konsep politik luar negeri baru menitikberatkan pada hubungan internasional yang memerlukan revisi atas prioritas. Konsep politik luar negeri baru ini merupakan revisi dari konsep politik luar negeri 2008 dan ditetapkan dalam garis besar rencana strategis jangka menengah yang akan diperbarui setiap lima tahun.⁴³ Terdapat dua hal penting dalam konsep politik luar negeri tahun 2013. Pertama, mengisolasi politik domestik Rusia dari pengaruh luar dan menghidupkan serta menanamkan kembali ide nasional kepada rakyat Rusia. Kedua, mengadakan tindakan internasional yang memungkinkan Kremlin mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional Rusia di level global dan regional yang akan

⁴¹ Bagno-Moldavsky. 2013. *Russian Foreign Policy in the Middle East: No Change in the Offing*. Strategic Assessment, Volume 15, No. 4 (January 2013). Tel Aviv: The Institute for National Security Studies. Hal. 123.

⁴² *Ibid.* Hal. 124.

⁴³ Monaghan. 2013. *The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving Continuity*. London: Chatam House. Hal. 3.

dikenal sebagai “Dunia Rusia”.⁴⁴ Konsep politik luar negeri tahun 2013 menuntut Rusia untuk lebih aktif dalam politik internasional. Konsep tersebut memungkinkan Rusia melibatkan semua cara untuk mewujudkan visi “Dunia Rusia” baik melalui cara tradisional dan non tradisional. Cara tradisional yaitu diplomasi negara dan kekuatan militer sedangkan non tradisional melibatkan kalangan bisnis dan organisasi non-pemerintah.

Dalam konsep politik luar negeri Rusia, kawasan Timur Tengah menjadi salah satu perhatian. Konsep politik luar negeri Rusia telah sejak lama menaruh perhatian pada kawasan Timur Tengah, bahkan ketika negara itu masih bernama Uni Soviet. Pasca perang dunia kedua, Uni Soviet yang berbeda ideologi dengan Amerika Serikat saling bersaing dalam perebutan pengaruh dan menjadi hegemon kawasan. Politik luar negeri Uni Soviet bersifat oportunistik dan reaktif. Sikap politik luar negeri yang oportunistik ditunjukkan dengan usaha-usaha Uni Soviet untuk memanfaatkan keadaan negara-negara yang mengalami kesulitan pasca perang dunia kedua seperti di Yunani, Turki, dan Iran yang bertujuan mengamankan pelabuhan air hangat. Sikap reaktif ditunjukkan Uni Soviet yang berusaha memanfaatkan konsekuensi negatif dari politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah seperti dalam konflik Arab dengan Israel.⁴⁵

Berdasarkan konsep politik luar negeri tahun 2013, Rusia berusaha merubah politik luar negeri dari reaktif menjadi proaktif.⁴⁶ Rusia akan lebih berkontribusi dalam mewujudkan situasi stabil di Timur Tengah dan secara konsisten mempromosikan perdamaian sesama bangsa-bangsa dan negara-negara Timur Tengah berdasarkan prinsip penghormatan atas kedaulatan, kesatuan wilayah negara dan non-intervensi dalam politik dalam negeri. Rusia sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota kuartet mediator internasional melakukan upaya kolektif untuk mewujudkan pengakuan perdamaian jangka panjang Arab dengan Israel, termasuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Rusia berusaha mewujudkan terbentuknya kawasan

⁴⁴ Trenin. 2014. *Russia Breakout The Post Cold War System: The Drivers of Putin Course*. Moscow: Carnegie Endowment for International Peace. Hal. 4.

⁴⁵ Andersen, *Op. Cit.* hal. 258.

⁴⁶ Bagno-Moldavsky, *Op. Cit.* Hal. 123.

Timur Tengah yang bebas senjata pemusnah massal dan bebas senjata nuklir. Rusia meneruskan kebijakan berimbang dalam urusan program nuklir Iran melalui jalur dialog dan pendekatan kepentingan bersama untuk mewujudkan non-proliferasi nuklir. Rusia juga berusaha membangun hubungan bilateral dengan negara-negara Islam di Timur Tengah melalui organisasi internasional seperti OKI, GCC, dan Liga Arab.⁴⁷ Politik luar negeri Rusia berusaha mewujudkan keberagaman peradaban. Nilai Demokratik Universal versi Rusia adalah kebebasan negara menentukan sistem politik dan pemerintahan, bukan berarti harus mengaplikasikan demokrasi model Barat.⁴⁸ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rusia mengejar perimbangan kekuasaan dan pengaruh dengan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Perkembangan politik di kawasan Timur Tengah menjadi fokus perhatian politik luar negeri Rusia. Fenomena *Arab Spring* menjadikan situasi keamanan kawasan tidak menentu. ditengah situasi politik kawasan yang tidak menentu, Rusia berusaha mempertahankan kepentingannya di kawasan dengan secara aktif ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan Dewan Keamanan PBB maupun melindungi sekutu tradisional. Fenomena *Arab Spring* menghasilkan kekerasan di beberapa negara Timur Tengah. Hal ini mendorong Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk melakukan intervensi militer ke beberapa negara seperti Suriah. Rusia sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB menolak usulan tersebut. Sama halnya ketika Amerika Serikat bersikap keras menolak program nuklir Iran, Rusia kembali mendukung Iran.

Selama *Arab Spring*, Amerika Serikat beserta NATO telah melakukan intervensi di Libya dan berusaha untuk ikut melakukan intervensi di Suriah menjatuhkan rezim Assad. Rusia sebagai sekutu Suriah menolak rencana tersebut. Politik luar negeri Rusia reaktif terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Rusia mengerahkan armada militernya ke Timur Tengah sebagai

⁴⁷ Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. *Concept of the Foreign Policy of Russian Federation*. Diakses dari <http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument> pada tanggal 21 April 2014.

⁴⁸ Monaghan. *Op. Cit.* Hal. 6.

tindakan reaktif atas Amerika Serikat yang telah lebih dulu menempatkan sejumlah armada militernya.

Rusia menandai kehadirannya dalam politik internasional di kawasan Timur Tengah dengan terus melakukan usaha diplomatik dengan negara-negara di kawasan. Rusia menjadi penyuplai senjata bagi negara-negara sekutu seperti Aljazair, Iran, dan Suriah.⁴⁹ Rusia juga kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir yang ditandai dengan penjualan senjata kepada negara tersebut. Mesir merupakan negara berpengaruh di kawasan yang sangat penting bagi Rusia untuk menguatkan posisi politiknya di kawasan dan mengimbangi pengaruh Amerika Serikat.

2.3 Geostrategi Rusia

Kepentingan Rusia adalah kembali menjadi aktor berpengaruh di Timur Tengah. Usaha-usaha Rusia adalah mempertahankan hubungan dengan sekutu, memperbaiki hubungan dengan negara yang pernah menjadi sekutu, memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab lain, dan mengamankan ekspor energi dan senjata. Rusia berusaha melindungi rezim Assad dari intervensi militer Amerika Serikat. Secara geopolitik, dukungan kepada Assad yang merupakan sekutu tradisional berarti menunjukkan kehadiran Rusia di kawasan.⁵⁰ Rusia menunjukkan komitmennya melindungi sekutu dengan mendukung rezim Assad dan menyuplai senjata kepada Suriah. Pada Mei 2010, Presiden Medvedev menandatangani perjanjian penjualan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan senjata anti-tank dalam kunjungannya ke Damaskus. Dalam satu dekade terakhir Rusia telah menjual senjata ke Suriah senilai sekitar satu miliar USD.⁵¹ Dukungan Rusia kepada Assad juga ditunjukkan dengan memveto keputusan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Suriah.

Rusia berusaha memperbaiki hubungan dengan Mesir yang pernah menjadi sekutunya di era Soviet dengan membangun kerjasama bilateral. Rusia

⁴⁹ Cohen. *How US Should Respond to Russia's Unhelpful Role in the Middle East*. Backgrounder 8 Maret 2012. The heritage Foundation. Hal. 5.

⁵⁰ Malashenko. 2013. *Russia and The Arab Spring*. Carnegie Moscow Center. Hal. 12.

⁵¹ Cohen. *Op. Cit.* Hal. 9.

mulai kembali mendekati Mesir sejak Sisi menjadi presiden. Agar dapat menjadi aktor regional yang berpengaruh, tidak hanya cukup dengan memiliki hubungan dengan negara-negara yang menjadi sekutunya, Rusia juga memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab yang juga sekutu Amerika Serikat. Rusia membangun hubungan dengan negara-negara Teluk yang memiliki peran dalam politik regional. Kedekatan dengan negara Arab menjadikan Rusia sebagai anggota peninjau dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Sebagai salah satu produsen besar dalam industri persenjataan, Rusia berusaha mengamankan ekspor senjatanya untuk mengamankan keuntungan secara ekonomi. Hal ini diakibatkan karena adanya pergantian kepemimpinan di beberapa negara-negara Timur Tengah yang awalnya merupakan konsumen senjata dan sekutu Rusia. Pergantian kepemimpinan mengancam ekspor senjata Rusia karena pemimpin baru belum tentu bersedia menjadi sekutu dan kemungkinan menjadi sekutu Amerika Serikat. Seperti pada kasus Libya, sampai pada tahun 2011 Rusia dan Libya memiliki kontrak penjualan senjata mencapai 4 miliar USD.⁵² Jatuhnya rezim Khaddafi dan perubahan kepemimpinan membuat Rusia kehilangan salah satu pasar senjata besar di kawasan.

Kawasan Timur Tengah juga penting bagi industri energi Rusia. Selain sebagai pasar, kawasan Timur Tengah menjadi jalur suplai energi ke Eropa dan pelabuhan di Mediterania. Rusia merupakan penyuplai 65 persen kebutuhan gas dan 40 persen kebutuhan minyak Turki. Rusia adalah mitra dagang terbesar keempat Turki pada tahun 2008.⁵³ Kedua negara bekerjasama dalam proyek energi seperti pembangunan pipa minyak dan gas. Kerjasama itu memungkinkan bagi pipa minyak Rusia melalui wilayah Turki di Laut Hitam menuju pelabuhan Ceyhan di pesisir Mediterania. Rusia juga membangun pipa gas *South Stream* yang berfungsi menyalurkan gas dari Rusia melalui Turki menuju Eropa. Bagi Rusia, pentingnya kerjasama dengan Turki adalah untuk mendapatkan akses pelabuhan yang tidak membeku pada musim dingin yang dapat menghambat ekspor energi.

⁵² Cohen. *Op. Cit.* Hal. 11.

⁵³ Cohen. *Op. Cit.* Hal. 13.

2.4 Sejarah Hubungan Rusia dengan Mesir

Hubungan bilateral Rusia-Mesir telah terjalin sejak era perang dingin. Hubungan ini dimulai saat Rusia masih bernama Uni Soviet dan Mesir berada dibawah pemerintahan Gamal Abdel Nasser. Pada masa perang dingin, politik luar negeri Uni Soviet bersifat reaktif terhadap politik luar negeri Amerika Serikat. Uni Soviet juga berambisi untuk mengerahkan kekuatannya ke Timur Tengah. Uni Soviet mendapatkan momentum ketika terjadi deklarasi berdirinya negara Israel tahun 1948. Uni Soviet segera mengambil posisi menentang berdirinya negara Israel. Mesir sebagai salah satu negara Arab yang menentang berdirinya negara Israel kemudian terlibat perang. Keputusan Mesir terlibat dalam perang Arab-Israel membuat Inggris dan Perancis menyerang Mesir di Terusan Suez. Amerika Serikat juga membatalkan bantuannya kepada Mesir dalam proyek pembangunan Bendungan Aswan. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk memberikan bantuan senjata dan finansial kepada Mesir terutama untuk proyek pembangunan bendungan.

Proyek pembangunan bendungan adalah simbol dari upaya Mesir untuk melakukan modernisasi. Bendungan Aswan dianggap dapat menyediakan listrik untuk industri, konsumsi rakyat, dan modernisasi bidang pertanian. Bendungan Aswan adalah simbol menuju kemakmuran bagi rakyat Mesir. Faktor tersebut yang mendorong Uni Soviet memberikan bantuan biaya dan teknologi. Hal itu akan membuat Uni Soviet semakin populer di mata rakyat Mesir dan Arab karena memberikan bantuan pada proyek yang mendukung kesejahteraan mereka.

Pada masa Pemerintahan Nasser, Uni Soviet melihat bahwa Mesir tidak akan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat karena posisinya yang mendukung Israel. Pada sisi lain, Mesir juga tidak ingin terlihat menjadi sekutu Uni Soviet. Oleh karena itu, bantuan militer Uni Soviet didatangkan ke Mesir melalui Cekoslovakia.⁵⁴ Uni Soviet yang kesulitan untuk menjadi kekuatan berpengaruh di Timur Tengah, memanfaatkan popularitas Mesir dan Nasser yang dianggap pihak yang paling berani dan pemimpin dunia Arab melawan Barat dan Israel. Melalui Mesir, Uni Soviet mulai membangun hubungan dengan negara

⁵⁴ Ochsenswald dan Fisher. *Op. Cit.* Hal. 588.

yang berada di pihak yang sama dengan Mesir. Keterlibatan Uni Soviet menjadikan mereka dianggap baik oleh rakyat Arab.⁵⁵

Bantuan Uni Soviet kepada Mesir menghasilkan hubungan bilateral yang menguntungkan bagi Uni Soviet terutama dibidang militer. Selama pada periode tahun 1948-1974, Mesir mengizinkan Uni Soviet menggunakan fasilitas militer Mesir seperti pelabuhan angkatan laut di Alexandria dan bandara di Luxor.⁵⁶ Pada saat yang sama personil militer Uni Soviet di Mesir mencapai 20.000 orang.⁵⁷

Hubungan Uni Soviet dengan Mesir berakhir ketika meninggalnya Nasser dan kursi kepresidenan jatuh kepada Anwar Sadat pada tahun 1970. Uni Soviet tidak menyukai karakter kepemimpinan Sadat mencoba melakukan kudeta meskipun akhirnya gagal.⁵⁸ Sadat lebih memilih menjalin hubungan luar negeri dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang merupakan musuh Uni Soviet. Sadat akhirnya memerintahkan Uni Soviet untuk menarik militernya dari Mesir dan mengakhiri hubungan strategis pada tahun 1972. Sejak saat itu, Mesir lebih banyak menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat.

⁵⁵ Ochsenswald dan Fisher. *Op. Cit.* Hal. 721

⁵⁶ Andersen *et al.* *Op. Cit.* Hal. 258.

⁵⁷ Andersen *et al.* *Op. Cit.* Hal. 258.

⁵⁸ Andersen *et al.* *Op. Cit.* Hal. 274.

BAB 3

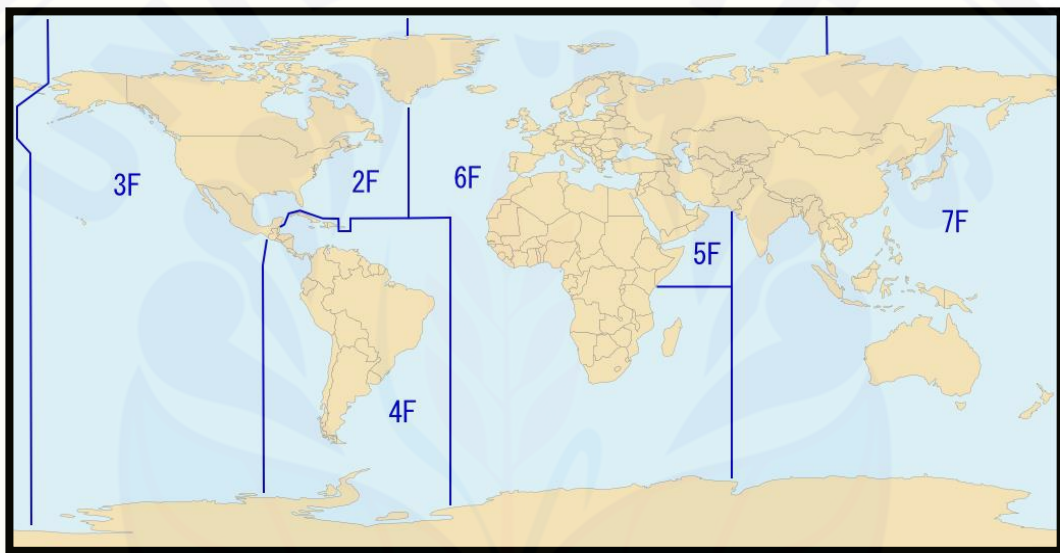
PERIMBANGAN KEKUATAN DI TIMUR TENGAH

Keberadaan armada perang suatu negara di wilayah tertentu merupakan usaha untuk menciptakan keamanan wilayah maupun keamanan jalur perdagangan, terutama jalur laut. Amerika Serikat dan Rusia merupakan negara yang menyebarkan armada lautnya di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Persaingan dalam pengerahan armada di kawasan tertentu menciptakan perimbangan kekuasaan ketika tidak ada satu negara yang mendominasi dan melakukan serangan kepada negara lain. Perimbangan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Rusia terbukti tidak menimbulkan konflik terbuka antar kedua negara. Rusia dan Amerika Serikat tidak hanya mengerahkan kekuatan militer negara masing-masing dalam melakukan dominasi kawasan. Rusia dan Amerika Serikat memiliki aliansi dengan beberapa negara di kawasan dan beberapa negara di sekitar kawasan Timur Tengah.

3.1 Kekuatan Militer Amerika Serikat

Amerika memiliki tujuh armada yang dikerahkan ke berbagai kawasan di dunia. Armada pertama adalah U.S. Coast Guard yang merupakan pasukan pengaman dan penjaga wilayah perairan. Berdasarkan undang-undang Amerika Serikat, U.S. Coast Guard merupakan satuan yang berdiri sendiri kecuali pada masa perang satuan ini berada dalam komando Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy). Gambar 3.1 menjelaskan keberadaan pangkalan armada Amerika Serikat di seluruh dunia. Armada kedua memiliki wilayah komando di kawasan Atlantik Utara meliputi pesisir barat Amerika Serikat sampai Eropa Barat yang berbasis di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat yang pada gambar 3.1 di tandai dengan 2F. Armada ketiga memiliki wilayah komando di Pasifik Timur dan Pasifik Tengah. Armada ketiga berbasis di San Diego, Amerika Serikat yang pada gambar 3.1 di tandai dengan 3F. Armada keempat memiliki wilayah komando di Atlantik Selatan meliputi wilayah benua Amerika Selatan yang pada gambar 3.1

di tandai dengan 4F. Armada kelima memiliki wilayah komando di kawasan Timur Tengah meliputi Semenanjung Arab dan Samudera Hindia berbasis di Manama, Bahrain yang pada gambar 3.1 di tandai dengan 5F. Armada keenam memiliki wilayah komando di kawasan Eropa dan Mediterania. Armada keenam berbasis di Naples, Italia yang pada gambar 3.1 di tandai dengan 6F. Armada ketujuh memiliki wilayah komando di Pasifik Barat meliputi Selandia Baru, Australia Asia Tenggara dan Asia Timur. armada ketujuh berbasis di Yokosuka, Jepang yang pada gambar 3.1 di tandai dengan 7F.⁵⁹



Gambar 3.1 Posisi Armada Militer Amerika Serikat di Seluruh Dunia

Sumber: Federation of American Scientists. 28 Juli 2011. *Numbered Fleets*. Diakses dari http://fas.org/man/dod-101/navy/unit/fleet_n.htm pada tanggal 2 Maret 2015.

Pada bab ini, penulis memfokuskan analisa kekuatan Amerika Serikat pada armada kelima dan keenam karena letaknya yang berada di sekitar kawasan Timur Tengah. Armada kelima yang berbasis di Bahrain diperkuat dengan dua kapal induk yaitu CVN-77 George H.W. Bush dan CVN-70 Vinson sedangkan armada keenam yang berbasis di Italia diperkuat oleh kapal induk CVN-69

⁵⁹ Federation of American Scientists. 28 Juli 2011. *Numbered Fleets* diakses dari http://fas.org/man/dod-101/navy/unit/fleet_n.htm pada tanggal 2 Maret 2015.

Eisenhower.⁶⁰ Armada kelima di Bahrain diperkuat oleh 16 kapal perang, 356 pesawat, 41 Helikopter dan 35.000 pasukan.⁶¹ Armada keenam diperkuat dengan 40 kapal perang, 175 pesawat tempur, dan 21.000 pasukan.⁶²

Amerika Serikat memiliki aliansi dan menempatkan armada militernya di beberapa negara seperti Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Turki yang tergabung dalam armada kelima. Armada Amerika Serikat juga terdapat di negara-negara Eropa seperti Yunani dan Italia yang tergabung dalam armada keenam. Posisi geografis negara-negara sekutu yang ditempati armada Amerika Serikat sangat strategis dalam upaya mengamankan kepentingannya di kawasan Timur Tengah.

Tabel 3.1 Kekuatan Armada Kelima Amerika Serikat Tahun 2013

Jenis armada	Tipe	Jumlah
Kapal induk		2
Kapal perang	Cruisers	2
	Destroyers	5
	Guided Missile Frigates	3
	Fast Combat Support Ship	3
	Mine Countermeasures Ship	2
	Dock Landing Ships	2
Kapal selam	Kapal serang tempur	2
Pesawat	Pesawat tempur	288
	Pesawat pendukung	68
Helikopter	Helikopter tempur	32
	Helikopter pendukung	9
Personil	marinir, pelaut, angkatan darat, pilot	21.000

Sumber: Washington Post. 24 Februari 2013. *U.S. Strength in the Persian Gulf*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/military/usstrength.htm> pada tanggal 26 Maret 2015.

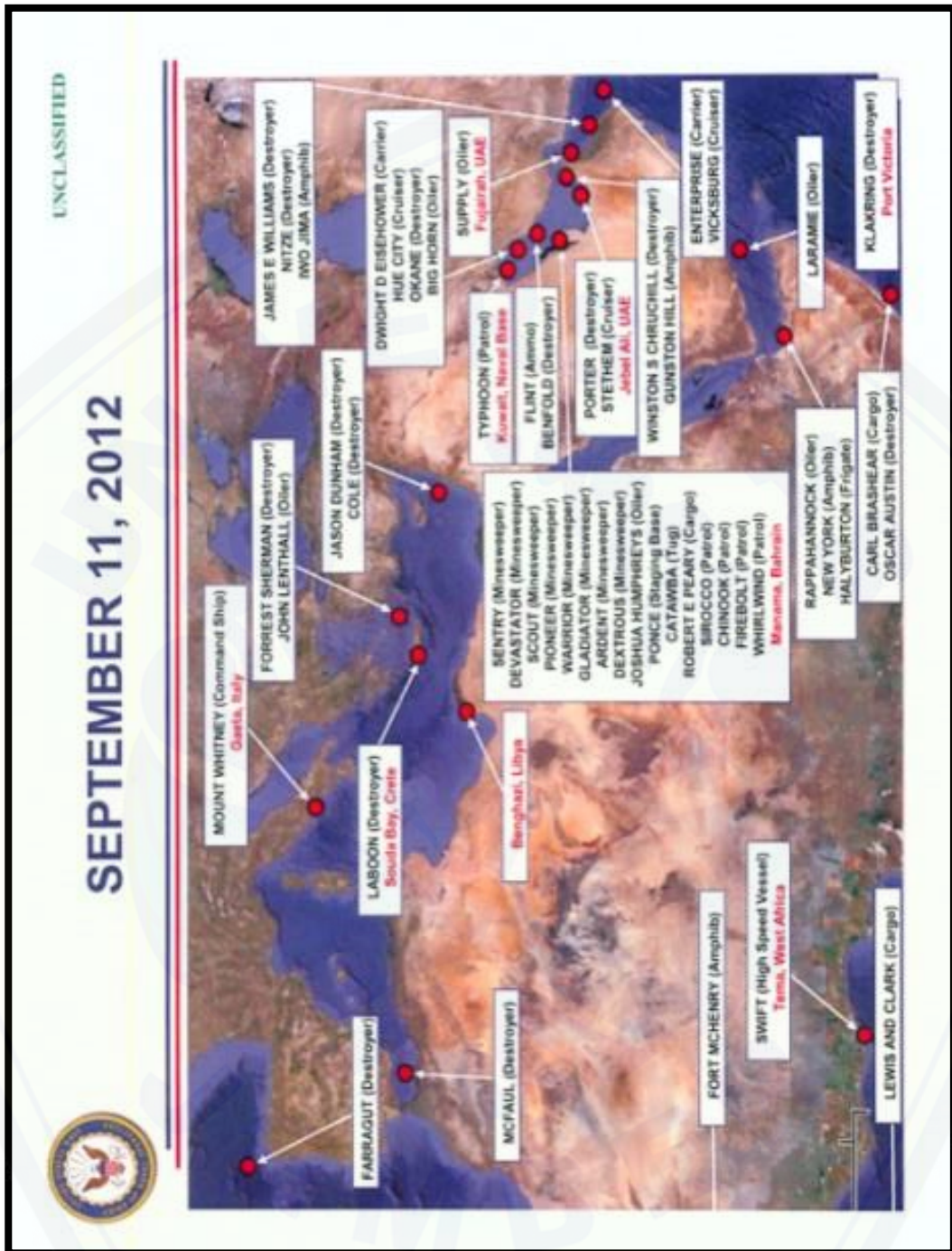
⁶⁰ Global Security. 7 Januari 2015. *Where Are the Carriers?* Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/ops/where.htm> pada tanggal 2 Maret 2015.

⁶¹ Washington Post. 24 Februari 2013. *U.S. Strength in the Persian Gulf*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/military/usstrength.htm> pada tanggal 26 Maret 2015.

⁶² Global Security. 5 Juli 2011. *Sixth Fleet Naval Striking and Support Forces, Southern Europe (STRIKFORSOUTH)*. Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/c6f.htm> pada tanggal 26 Maret 2015.

Kekuatan militer dalam jumlah yang besar di kawasan Timur Tengah dan Mediterania menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang mendominasi dan memiliki pengaruh kuat terhadap negara-negara sekitar. Dengan kekuatan besar tersebut, Amerika Serikat dapat mengamankan kepentingannya di kawasan diantaranya mengamankan eksistensi negara Israel dan mengamankan jalur perdagangan terutama suplai minyak. Amerika Serikat menjadi hegemon regional yang banyak menentukan politik internasional di kawasan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Amerika Serikat yang tidak mengakui eksistensi negara Palestina dan tidak ada negara-negara Arab yang berani melawan dengan kekuatan militer dalam konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memusuhi negara-negara yang menjadi ancaman bagi Israel dan melakukan intervensi dalam politik internal negara-negara Timur Tengah yang dianggap mendukung terorisme dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Amerika Serikat memusuhi Irak dibawah Saddam Hussein karena dianggap melakukan pelanggaran HAM kepada rakyatnya, memusuhi Iran karena menolak eksistensi dan mengancam keamanan Israel, memusuhi Suriah karena berada dibawah rezim sosialis partai Baath yang dipimpin Bashar al-Assad dan dianggap melakukan pelanggaran HAM kepada rakyatnya, dan memusuhi Libya dibawah pimpinan Muammar Khaddafi karena dianggap mendukung terorisme global.

Gambar 3.2 menunjukkan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kehadiran militer Amerika Serikat terdapat di kawasan Teluk yang tergabung dalam armada kelima dan di kawasan Mediterania yang tergabung dalam armada keenam. Kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan diperkuat dengan kekuatan militer negara-negara Timur Tengah yang menjadi sekutu yaitu Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Oman, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Israel merupakan negara di Timur Tengah dengan kekuatan militer terbesar dibanding negara-negara Arab lain. Kekuatan Militer Amerika Serikat menempati jalur laut strategis mulai dari Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandab, sampai Laut Mediterania. Selain mampu mengamankan jalur laut strategis bagi kepentingannya, kehadiran Militer Amerika Serikat yang besar mampu menghasilkan pengaruh bagi negara-negara Timur Tengah.



Gambar 3.2 Posisi Armada Militer Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah

Sumber: Dailycaller. 11 September 2012. *About that 'Navy Map of Ships Near Benghazi'*. Diakses dari <http://dailycaller.com/2014/02/17/navy-map-ships-near-benghazi/> pada tanggal 26 Maret 2015.

Negara-negara Arab yang terletak di Semenanjung Arab memiliki kerjasama keamanan yang tergabung dalam GCC menjadikan mereka menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan. Bergabungnya GCC dalam sekutu selain untuk menambah kekuatan dan membantu operasi militer yang dipimpin Amerika Serikat juga untuk memastikan keamanan dan secara tersirat mendukung eksistensi Israel meskipun tidak terlalu tampak kepada publik. Bukti kerjasama militer GCC dengan Amerika Serikat adalah ketika operasi *Dessert Storm* yang dipimpin Amerika Serikat didukung oleh GCC pada tahun 1991. Operasi tersebut berhasil mengusir pasukan Irak yang melakukan invasi terhadap Kuwait.

Bergabungnya GCC ditambah dengan Yordania dan Israel menjadi sebuah kekuatan besar merupakan ancaman bagi eksistensi Rusia sebagai salah satu aktor regional. Saat operasi *Dessert Storm* dilaksanakan Rusia tidak dapat memberikan dukungan kepada Irak yang pada saat itu dipimpin Saddam Hussein yang merupakan sekutu Rusia. Hal ini menjadi bukti bahwa bergabungnya kekuatan kecil dengan kekuatan yang lebih besar menjadi kekuatan besar yang sangat berpengaruh dan menentukan politik internasional di kawasan.

Tabel 3.2 menunjukkan data kekuatan negara-negara Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Israel menjadi negara dengan jumlah kekuatan militer terbesar di kawasan dan diikuti Arab Saudi dengan kekuatan militer terbesar kedua. Besarnya kekuatan militer yang dimiliki Israel menjadikannya sebagai sekutu strategis bagi Amerika Serikat di kawasan meskipun kekuatan militer Israel mendapat banyak dukungan dari Amerika Serikat. Selain Israel, Arab Saudi merupakan salah satu sekutu penting bagi Amerika Serikat di kawasan. Arab Saudi memiliki kekuatan militer terbesar kedua di kawasan dan pemimpin dalam GCC. Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi saling berkaitan, Arab Saudi membutuhkan senjata militer dan mengirim minyak ke Amerika Serikat.

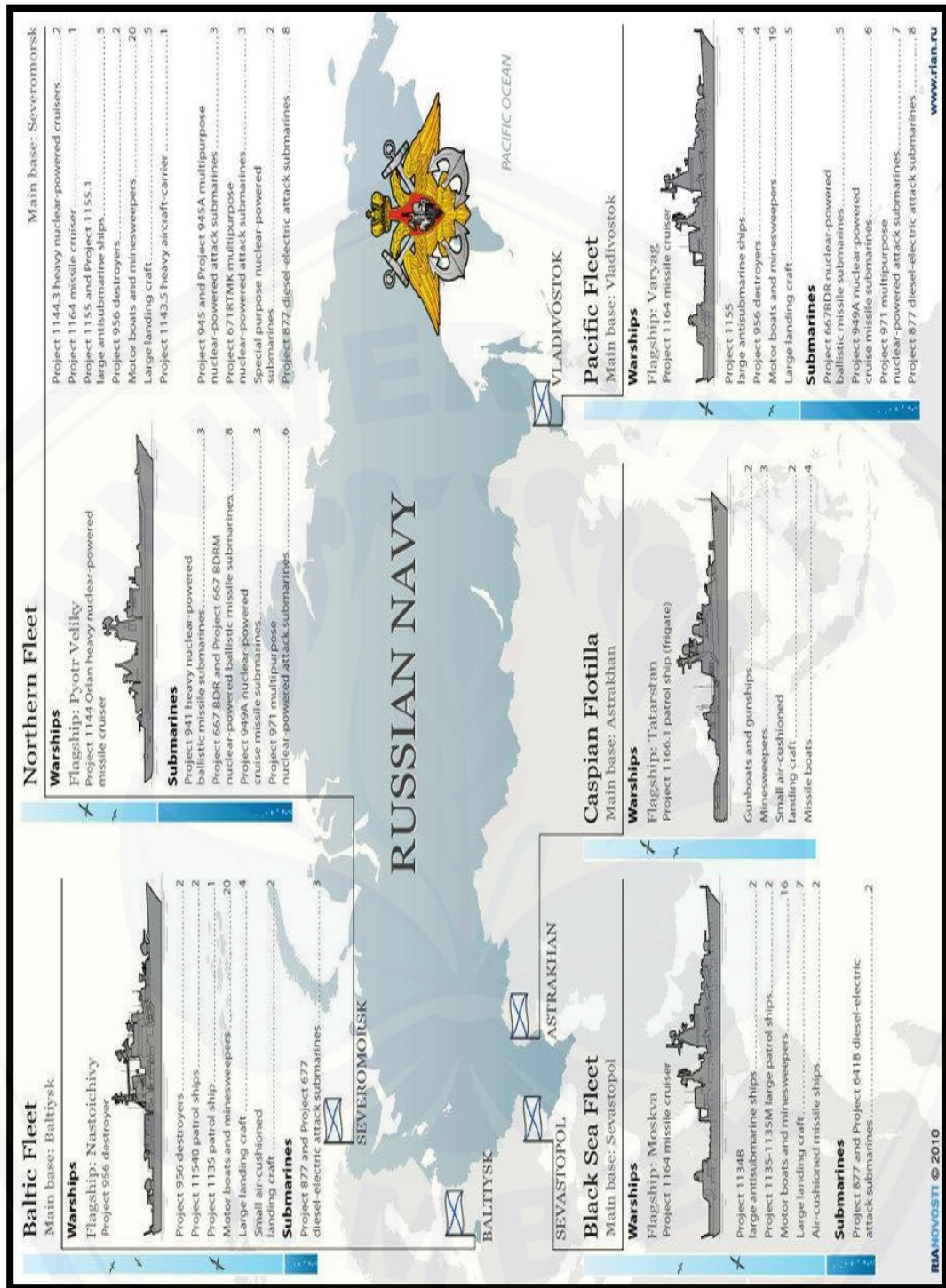
Negara-negara Timur Tengah lain seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman dan Yordania memiliki kekuatan militer yang tidak terlalu besar. Meskipun begitu, mereka tetap menjadi sekutu strategis Amerika Serikat. Hal ini karena mereka memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar dan posisi

Gambar 3.3 memberikan gambaran posisi geografis kelima armada Rusia. Empat Armada militer Rusia berada di Rusia bagian barat. Hal ini dapat dibaca sebagai upaya Rusia untuk fokus pada kepentingannya yang berbatasan dengan negara-negara di sebelah barat wilayahnya. Pada perbatasan bagian barat, Rusia harus mengamankan kepentingannya di Benua Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah dari ancaman perluasan pengaruh NATO maupun kepentingan Amerika Serikat. Armada Utara berhadapan dengan kekuatan NATO di Kutub Utara. Armada Baltik berhadapan dengan kekuatan NATO di Laut Baltik dan Skandinavia. Armada Laut Hitam berhadapan dengan kekuatan NATO di Mediterania dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Armada Kaspia berhadapan dengan kekuatan Amerika Serikat di Asia Tengah dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Armada Pasifik satu-satunya armada di bagian timur Rusia yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Pasifik. Penulis memfokuskan analisa pada Armada Laut Hitam karena memiliki wilayah komando sampai ke Laut Mediterania dan Timur Tengah yang berperan mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Rusia menunjukkan keseriusannya dalam mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dan melindungi kepentingan di Timur tengah dengan meningkatkan jumlah kapal perang yang dikerahkan, dari 11 kapal perang dan 2 kapal selam pada 2014 menjadi 41 kapal perang dan 4 kapal selam pada tahun 2015.⁶⁴ Armada laut hitam juga diperkuat angkatan udara dengan 35 pesawat, 20 helikopter dan personil angkatan udara sebanyak 25.000 orang.⁶⁵

⁶⁴ RussianShips.info. 4 Maret 2015. *List of Current Ships of the Russian Navy 2015*. Diakses dari <http://russian-ships.info/eng/today/> pada tanggal 26 Maret 2015.

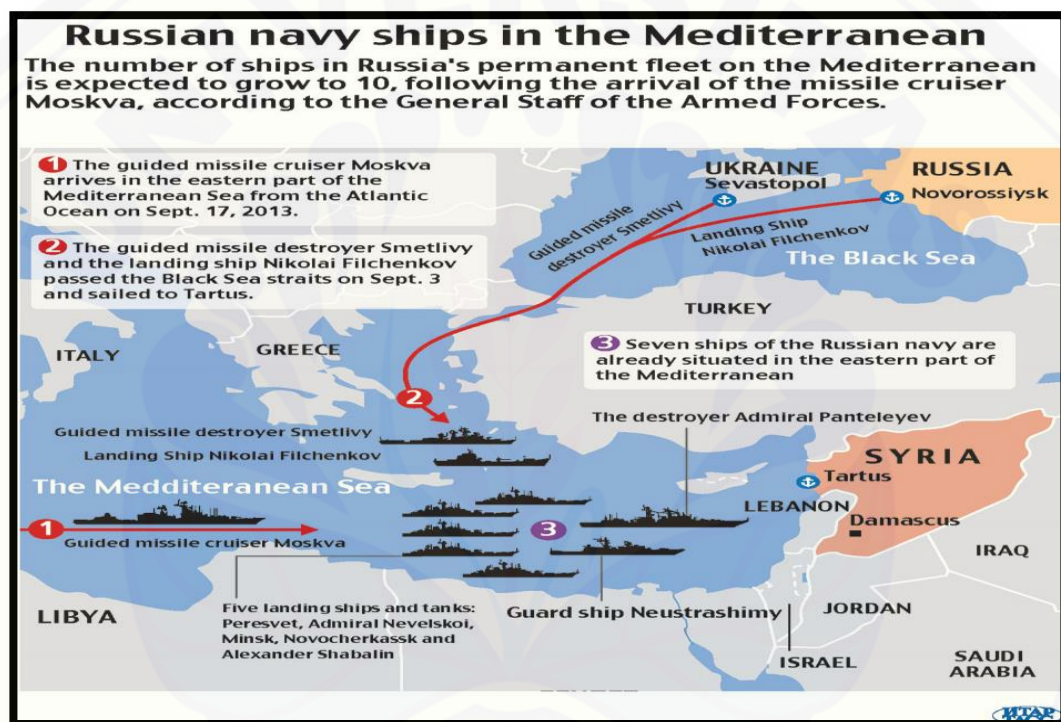
⁶⁵ RusNavy. 25 September 2010. *Black Sea Fleet to Get 18 New Warships and Renew Naval Aviation Till 2020*. Diakses dari http://rusnavy.com/news/newsofday/index.php?ELEMENT_ID=10601 pada tanggal 26 Maret 2015.



Gambar 3.3 Lokasi Armada Militer Rusia

Sumber: Power of Data Visualization. 2011. *The Russian Navy*. Diakses dari <http://www.pdviz.com/tag/sea> pada tanggal 26 Maret 2015.

Gambar 3.4 menunjukkan Armada Rusia dari Laut Hitam bergerak menuju kawasan Mediterania. Rusia menempatkan 10 kapal perang di kawasan tersebut sejak muncul isu Amerika Serikat berniat melakukan invasi ke Suriah pada tahun 2013. Rusia mengerahkan militernya ke Mediterania untuk mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat agar tidak melakukan invasi ke Suriah. pengerahan armada militer juga menunjukkan komitmen Rusia melindungi Suriah dan menegaskan posisinya sebagai aktor internasional yang memiliki kekuatan.



Gambar 3.4 Posisi Armada Rusia di Kawasan Timur Tengah

Sumber: Itar-Tass. 28 November 2013. *Ships of Russian Black Sea Fleet to Remain on Duty in Mediterranean*. Diakses dari <http://tass.ru/en/russia/709389> pada tanggal 26 Maret 2015.

Pengerahan Armada laut Hitam ke Mediterania dan pelabuhan Tartus di wilayah Suriah merupakan salah satu upaya Rusia menunjukkan eksistensi kekuatannya di kawasan dan dukungannya kepada Suriah. Sekutu Rusia di Timur Tengah adalah Suriah. Kedua negara telah sejak lama menjalin kerjasama sejak di era Uni Soviet. Rusia berusaha mencegah intervensi militer oleh Amerika Serikat

atau NATO ke Suriah agar tidak kembali kehilangan salah satu sekutu seperti yang terjadi kepada Libya.

Tabel 3.3 menunjukkan kekuatan Armada Laut Hitam Rusia memiliki jumlah yang cukup signifikan untuk melakukan perimbangan dengan Amerika Serikat. Kekuatan militer yang memiliki kemampuan merusak merupakan alat politik untuk mempengaruhi kebijakan negara lain yang dianggap musuh. Kekuatan armada Laut Hitam Rusia tidak sebesar kekuatan armada kelima Amerika Serikat dan armada keenam. Meskipun begitu, Rusia dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan invasi Amerika Serikat ke Suriah.

Tabel 3.3 Kekuatan Armada Laut Hitam Rusia Tahun 2015

Jenis armada	Tipe	Jumlah
Kapal perang	<i>Guided missile cruiser</i>	1
	<i>Large ASW ships</i>	2
	<i>Frigates</i>	3
	<i>Small ASW ships</i>	6
	<i>Guided missile corvettes</i>	4
	<i>Guided missile boats</i>	5
	<i>Seagoing minesweepers</i>	7
	<i>Landing crafts</i>	3
	<i>Base minesweepers</i>	2
	<i>Inshore minesweepers</i>	2
	<i>Landing ships</i>	7
Kapal selam	Kapal selam penyerang	4
Pesawat	Penyerang dan pendukung	35
Helikopter	Penyerang dan pendukung	20
Personil	Angkatan udara	25.000

Sumber: RussianShips.info. 4 Maret 2015. *List of current ships of the Russian Navy 2015*. Diakses dari <http://russian-ships.info/eng/today/> pada tanggal 26 Maret 2015.

Rusia juga memiliki hubungan dengan Iran dan Aljazair sebagai penyuplai senjata kedua negara tersebut. Dalam perdagangan senjata, negara produsen hanya menyuplai senjata pada negara yang memiliki potensi aliansi. Sejak revolusi Iran tahun 1979, Rusia banyak mendukung kebijakan luar negeri Iran di Timur Tengah seperti konfrontasi dengan Israel dan program nuklir Iran. Aljazair adalah negara

yang tidak bebas dan tidak memiliki hubungan baik dengan negara-negara barat yang demokratis. Aljazair juga telah lama menjadi importir senjata dari Rusia. Kedua negara baik Iran dan Aljazair adalah bagian dari kepentingan Rusia di Timur Tengah, yaitu mengamankan hubungan dengan sekutu dan bukan penghalang dalam upaya mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di kawasan. Rusia juga memiliki beberapa sekutu yang tergabung dalam kerjasama pertahanan yang letak geografisnya berdekatan dengan kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut adalah Belarusia, Armenia, Kazakhstan, dan Tajikistan.

Rusia menjadi aktor penyeimbang di Timur Tengah yang di dominasi oleh Amerika Serikat. Dalam menciptakan perimbangan kekuatan dalam politik internasional di kawasan, Rusia hanya memiliki dua sekutu yang tersisa yaitu Iran dan Suriah. Berbeda dengan keadaan di masa Uni Soviet ketika negara tersebut memiliki sekutu di kawasan seperti Mesir, Yaman Selatan, Libya dan Irak. Konflik internal dan intervensi eksternal terutama Amerika Serikat terhadap negara-negara tersebut membuat terjadinya pergantian kekuasaan yang merubah konstelasi politik dan berpaling dari Rusia.

Tabel 3.4 menunjukkan kekuatan militer sekutu Rusia di Timur Tengah yang tersisa yaitu Iran dan Suriah. Iran merupakan sekutu yang terkuat sedangkan Suriah mengalami konflik internal yang menguras sumber daya militernya. Rusia terus meningkatkan dukungan dengan menyuplai peralatan militer untuk memperkuat sekutunya. Rusia menyuplai senjata anti pesawat dan torpedo untuk Iran terakhir pada tahun 2006 sebelum adanya embargo senjata kepada Iran tahun 2007.⁶⁶ Selama konflik internal di Suriah, Rusia telah menyuplai peralatan militer untuk pasukan pemerintah dan yang terakhir tahun 2014.⁶⁷ Rusia juga mengirimkan rudal anti pesawat canggih S-300 kepada Suriah.⁶⁸ Dua negara

⁶⁶ Lionel Beehner. 1 November 2006. *Russia-Iran Arms Trade*. Diakses dari <http://www.cfr.org/arms-industries-and-trade/russia-iran-arms-trade/p11869> pada tanggal 17 April 2015.

⁶⁷ Jonathan Saul. 17 Januari 2014. *Exclusive: Russia Steps Up Military Lifeline to Syria's Assad – Sources*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2014/01/17/us-syria-russia-arms-idUSBREA0G0MN20140117> pada tanggal 17 April 2015.

⁶⁸ Global Research. 18 Juni 2013. *Russian Advanced Weapons for Syria: Unrevealed Secrets of Vladimir Putin's Recent Visit to London*. Diakses dari <http://www.globalresearch.ca/russian->

negara-negara di kawasan. Oleh karena itu, penting bagi Rusia maupun Amerika Serikat untuk memperhatikan dinamika politik negara-negara Timur Tengah.

Kehilangan sekutu dan pengaruh merupakan ancaman bagi kepentingan Rusia di Timur Tengah. Sebagai kekuatan penyeimbang Rusia berupaya mengembalikan kekuatan dan pengaruhnya untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat. Politik luar negeri baru dirancang untuk membuat Rusia lebih proaktif dalam politik internasional di kawasan. Selain dengan kekuatan militer, Rusia melibatkan dunia bisnis untuk membangun relasi dengan negara Timur Tengah seperti Turki. Meskipun Turki merupakan anggota NATO tetapi posisi strategisnya yang berada di antara Asia dan Eropa menjadikan Rusia membangun kerjasama energi untuk menyalurkan gas dari Rusia menuju Eropa melalui Turki. Usaha tersebut dapat dibaca sebagai upaya mengamankan Rusia dari ancaman Turki yang merupakan anggota NATO. Adanya kerjasama ekonomi akan membuat Turki lebih berpihak terhadap politik luar negeri Rusia di Timur Tengah.

Salah satu upaya penting Rusia dalam menguatkan kembali posisinya di kawasan Timur Tengah adalah kembali menjalin hubungan bilateral dengan negara yang pernah menjadi sekutu di masa Uni Soviet. Salah satu negara yang berusaha di dekati kembali oleh Rusia adalah Mesir. Pergantian kepemimpinan di Mesir yang dimenangkan oleh Sisi membuat peluang Rusia lebih besar setelah Mesir ditinggalkan oleh Amerika Serikat dan Sisi adalah tokoh militer yang tidak demokratis karena mendukung kudeta terhadap Mursi yang merupakan presiden hasil pemilu. Rusia terbiasa berteman dengan pemimpin yang tidak demokratis karena tidak terlalu mementingkan keadaan politik internal negara sekutunya. Kunjungan menteri luar negeri Rusia, Sergey Lavrov pada tahun 2013 dan Presiden Vladimir Putin tahun 2015⁶⁹ yang berakhir dengan kesepakatan Rusia membantu persenjataan untuk mengatasi terorisme di wilayah Mesir menjadi bukti keseriusan Rusia menjalin kembali hubungan bilateral dengan Mesir. Jika

⁶⁹ Standish. 10 Februari 2015. *Putin's Kalashnikov Diplomacy Gets a Win in Egypt*. diakses dari <http://foreignpolicy.com/2015/02/10/putins-kalashnikov-diplomacy-gets-a-win-in-egypt-sisi-moscow-eurasian-union/> pada tanggal 13 Februari 2015.

Mesir dan Rusia kembali kepada hubungan pada masa Uni Soviet saat Mesir dibawah pemerintahan Nasser maka Rusia akan mendapat sekutu yang penting untuk menguatkan kembali posisi dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Kehadiran militer Amerika Serikat dan Rusia di kawasan Timur Tengah merupakan bentuk upaya masing-masing negara untuk menguasai kawasan tersebut. Meskipun Amerika Serikat memiliki lebih banyak armada yang disiagakan, bukan berarti Amerika Serikat menguasai kawasan Timur Tengah. Kehadiran Rusia menjadi penyeimbang yang menahan luas penyebaran pengaruh Amerika Serikat meskipun dengan kekuatan yang lebih sedikit. Dalam kasus Suriah, meningkatnya eskalasi kekerasan di negara tersebut mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer dengan menyiagakan armada kelima dan keenam. Kehadiran militer Rusia di kawasan Mediterania dan Suriah menjadi penyeimbang kekuatan militer Amerika Serikat. Hasilnya, tidak terjadi konflik terbuka yang melibatkan Amerika Serikat dan Rusia maupun Suriah.

BAB IV

STRATEGI RUSIA TERHADAP MESIR DAN UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN DI TIMUR TENGAH

Rusia sering terlibat dalam perselisihan dengan Barat dalam sejumlah konflik internasional. Perselisihan tersebut menghasilkan serangkaian sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat bagi Rusia. Rusia semakin mengalienasi dirinya dari dunia barat dan membentuk tata dunia baru. Usaha tersebut diwujudkan dengan membangun hubungan strategis dengan Cina di Asia Pasifik dan kembali menjadi aktor penting di Timur Tengah. Usaha Rusia membangun tata dunia baru sesuai dengan doktrin politik luar negeri Rusia dibawah pemerintahan Presiden Putin. Membangun hubungan strategis dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah merupakan upaya Rusia dalam menggantik kerugian dari menurunnya kerjasama dengan Barat karena sanksi ekonomi. Rusia memiliki strategi dan kepentingan yang besar di Timur Tengah. Salah satu cara Rusia mencapai kepentingannya di Timur Tengah adalah dengan memanfaatkan Mesir.

4.1 Kepentingan Rusia di Kawasan Timur Tengah

Rusia mengubah politik luar negerinya di Timur Tengah dari basis ideologi menjadi basis strategis. Basis strategis tersebut diantaranya dilakukan dengan memecah aliansi Amerika Serikat, mengamankan hubungan baik dengan rakyat, dan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Timur Tengah. Kepentingan Rusia dibentuk oleh sejarah, pertimbangan kemanusiaan dan kalkulasi pragmatis.⁷⁰ Rusia berusaha menjadi hegemon kawasan dengan memainkan *hard politics*, menyuplai senjata ke Iran, Suriah, dan Aljazair.

Rusia telah mengalami penurunan pengaruh di kawasan Timur Tengah dengan adanya perubahan kepemimpinan yang terjadi di negara sekutunya seperti Libya dan Irak. Rusia hanya memiliki dua sekutu tersisa yaitu Iran dan Suriah yang sedang mengalami konflik internal. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai kekuatan *status quo* mengancam kepentingan Rusia di kawasan. Amerika Serikat

⁷⁰ Ochsenswald dan Fisher. *Op. Cit.* Hal. 721.

yang mengancam untuk melakukan intervensi dalam konflik internal Suriah membuat Rusia harus membuat strategi politik untuk mempertahankan kepentingan strategisnya. Selain untuk melindungi sekutunya, Rusia juga harus mengamankan jalur perdagangan, pasar senjata dan energi di kawasan.

4.1.1 Membangun Hubungan Strategis melalui Penjualan Senjata

Penjualan senjata bukan sebuah kesepakatan ekonomi biasa. Baik negara penjual dan pembeli akan melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk melakukan kesepakatan. Negara penjual biasanya hanya menjual kepada negara yang memiliki potensi menjadi sekutu. Kebutuhan akan senjata untuk memperkuat kemampuan negara bertahan hidup akan membuat negara pembeli mengikuti persyaratan yang diajukan negara penjual. Kesepakatan penjualan senjata dapat menghasilkan pengaruh dari negara penjual kepada negara pembeli.

Suriah merupakan sekutu tradisional Rusia yang tersisa sejak era Soviet. Suriah menerima senjata dari Uni Soviet saat terjadi perang Arab dengan Israel pada tahun 1973. Sejak saat itu hubungan kedua negara terus meningkat. Pasca perang dingin, Rusia menghapus hutang Suriah senilai 13,4 miliar USD menjadi 3,6 miliar USD untuk ditukar dengan pembangunan pangkalan angkatan laut Rusia di wilayah suriah. Nilai historis dan kepentingan Rusia di Suriah membuat Rusia mempertahankan Suriah dibawah pemerintahan Assad dari pemberontakan dan ancaman invasi Amerika Serikat. Selama perang sipil Suriah, Rusia telah mengirim berbagai alat pertahanan seperti pesawat tempur dan sistem pertahanan misil darat ke udara senilai 1,5 miliar USD pada tahun 2011-2012.⁷¹ Pemberontakan yang terus terjadi dan ancaman intervensi dari Amerika Serikat dan Israel membuat Rusia-Suriah mencapai kesepakatan untuk mengirim sistem pertahanan udara canggih S-300 dengan nilai kontrak 1,1 miliar USD pada tahun

⁷¹ Daniel Tovrov. 30 Mei 2012. *Russia Arms Deal with Syria: A Timeline*. Diakses dari www.ibtimes.com/russias-arms-deals-syria-timeline-705522 pada tanggal 2 Juni 2015.

2013.⁷² Dalam pertemuan antara Putin dengan menteri luar negeri Suriah, Walid al-Moualem, Juni 2015, Putin memberi pernyataan sebagai berikut:

*I know that our two countries' foreign ministries are keeping up regular contact between our countries. We know the difficult situation in Syria and how it is developing, particularly as concerns the attacks by international terrorism. We realise that in circumstances such as these, success always comes hand-in-hand with problems too, and military defeats are also possible. But we are confident that the Syrian people will ultimately be victorious and we remain committed to our policy of supporting Syria, its government and its people. At the same time, we think that we can only fight terrorism and extremist radicalism effectively if all countries in the region unite their efforts.*⁷³

Dari pernyataan diatas menunjukkan dukungan Rusia kepada Suriah untuk mempertahankan pemerintahan Assad dan melindungi Suriah dari ancaman intervensi militer asing dan serangan terorisme. Hal itu ditunjukkan dengan adanya hubungan bilateral intensif antara kedua negara melalui menteri luar negeri masing-masing. Pernyataan Putin tersebut juga menunjukkan dukungan atas kedaulatan Suriah dan akan terus memberikan bantuan untuk tetap menjamin keberlangsungan Suriah dibawah pemerintahan Assad.

Rusia menjalin hubungan diplomatik lebih dekat dan mendukung program nuklir Iran. Pernyataan Putin sebagai berikut:

*The outcome of the Geneva talks is a victory for all and shows once again that collective efforts in a spirit of mutual respect can produce answers to today's international challenges and threats. I stress that although this is a breakthrough, it is just the first step on a long and difficult path. Together with our partners, we are ready to continue the patient search for a mutually acceptable and broader comprehensive solution that would guarantee Iran's inalienable right to develop peaceful nuclear energy under IAEA supervision and the security of all countries in the Middle East, including Israel.*⁷⁴

Dari pernyataan diatas menunjukkan dukungan Rusia terhadap program nuklir Iran melalui negosiasi. Program nuklir Iran banyak mendapat penolakan

⁷² Defense Industry Daily. 9 November 2014. *Syria's Russian Weapon Buys*. Diakses dari <http://www.defenseindustrydaily.com/syria-buying-mig31s-mig35s-for-1-billion-03391/> pada tanggal 2 juni 2015.

⁷³ President of Russia Official Site. 29 Juni 2015. *Meeting with Syrian Foreign Minister Walid al-Moualem*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/49781 pada tanggal 3 Juli 2015.

⁷⁴ President of Russia Official Site. 24 November 2013. *Statement by Vladimir Putin Following the Conclusion of Talks on the Iranian Nuclear Programme*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/19685 pada tanggal 3 Juli 2015.

dari negara tetangganya seperti Israel dan Arab Saudi. Israel sempat mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran jika program nuklir terus dilanjutkan. Pada sisi lain, Rusia juga mendukung kepemilikan nuklir oleh Israel dan pengawasan melalui IAEA. Ancaman tersebut membuat Iran bersiap untuk meningkatkan keamanan. Sebagai negara yang mendukung program nuklir, Rusia menjual sistem pertahanan ke Iran berupa sistem pertahanan udara S-300. Kesepakatan ini merupakan komitmen Rusia untuk melindungi Iran sebagai sekutu. Rusia pernah menandatangani kontrak senilai 800 juta USD untuk mengirimkan S-300 ke Iran tetapi batal karena tekanan Amerika Serikat dan Israel menyangkut program nuklir Iran pada tahun 2007.⁷⁵ Pencabutan larangan penjualan senjata akan semakin mendekatkan hubungan Rusia dengan Iran dan menambah pemasukan Rusia dari penjualan senjata. Hubungan strategis dengan Iran adalah pengganti hilangnya hubungan dengan Irak untuk memiliki posisi strategis di kawasan. Sebelumnya, Rusia dan Iran telah memiliki kesepakatan penjualan senjata. Rusia mengirimkan pesawat tempur Sukhoi Su-25, tank, dan kapal perang. Program nuklir Iran menghasilkan sanksi dari PBB berupa pelarangan pengiriman senjata yang mengakibatkan Rusia tidak dapat mengirimkan senjata ke Iran.

Rusia berusaha mengembalikan hubungan diplomatik dengan menjual senjata kepada Irak untuk memerangi terorisme. Rusia dan Irak menandatangani kesepakatan penjualan senjata senilai lima miliar USD pada tahun 2012.⁷⁶ Kesepakatan tersebut menambah kekuatan militer Irak berupa pesawat tempur, helikopter serbu, kendaraan lapis baja, dan berbagai peluru kendali. Kesepakatan senjata tersebut berupa 28 unit helikopter serbu Mi-35, 15 unit Mi 28NE, dan 42 sampai 50 unit sistem pertahanan udara SA-22 Pantsir. Pesanan tersebut telah sampai di Irak pada Oktober 2014. Meningkatnya eskalasi terorisme di Irak bagian utara membuat pemerintah Irak kembali memesan persenjataan dalam

⁷⁵ Dan Lamothe. 13 April 2015. *Examining The Power Russia's S-300 Missile System Will Give Iran*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/04/13/examining-the-power-russias-s-300-missile-system-will-give-iran/> pada tanggal 29 Mei 2015.

⁷⁶ Defense Industry Daily. 2014. *Baby Come Back: Iraq is Buying, Fielding Russian Weapons Again*. Diakses dari <http://www.defenseindustrydaily.com/baby-come-back-iraq-is-buying-russian-weapons-again-07571/> pada tanggal 1 Juni 2015.

waktu cepat. Rusia memenuhi permintaan tersebut dengan mengirimkan lima pesawat tempur Su-25 bekas pada tahun 2014.

Aljazair adalah salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi importir alat pertahanan dari Rusia. Aljazair adalah negara kaya minyak dan gas sehingga memungkinkan bagi bagi negara tersebut untuk membeli alat pertahanan dalam jumlah besar dari Rusia. Hubungan kedua negara telah dimulai sejak era Soviet. Rusia telah menjual alat pertahanan ke Aljazair dengan total nilai 9,82 miliar USD dari tahun 2004-2013.⁷⁷ Kesepakatan itu terdiri dari berbagai macam alat pertahanan seperti pesawat tempur tipe Sukhoi dan Mig, helikopter serbu, kapal selam, sistem misil pertahanan darat ke udara, dan tank. Rusia-Aljazair kembali menandatangani kontrak baru untuk pembelian 200 unit tank tipe T-90 senilai satu miliar USD pada tahun 2014.⁷⁸ Rusia menganggap mempertahankan hubungan dengan Aljazair adalah kebijakan strategis. Selain karena keuntungan penjualan alat pertahanan yang besar, Aljazair juga merupakan sekutu potensial bagi Rusia di kawasan. Kebijakan politik Aljazair tidak memihak Amerika Serikat. Posisi geografis Aljazair dekat dengan sekutu Amerika Serikat di kawasan yaitu Maroko dan memiliki wilayah di Laut Mediterania.

4.1.2 Membangun Hubungan Strategis melalui Kesepakatan Energi

Selain dari perdagangan senjata, Rusia juga mengandalkan bidang energi sebagai pendapatan negara. Energi merupakan bisnis yang membutuhkan dana besar untuk menjalankannya. Negara-negara Timur Tengah yang dengan kekuatan ekonomi lebih kecil dan memiliki penduduk menjadi pasar potensial bagi Rusia untuk berinvestasi dibidang energi. Proyek dengan nilai ekonomi besar juga dapat menjadikan Rusia negara yang memiliki pengaruh kepada negara yang menjadi tujuan investasi. Rusia memiliki sejumlah proyek energi di kawasan Timur

⁷⁷ Global Security. 1 Februari 2015. *Algeria - Air Force – Modernization*. Diakses dari www.globalsecurity.org/military/world/algeria/air-force-modernization.htm pada tanggal 2 Juni 2015.

⁷⁸ Paul J. Saunders. 25 Maret 2015. *Algeria Buys Russian Arms but Keeps Moscow at Arm's Length*. Diakses dari www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/03/russia-algeria-weapons-gas-bouteflika-putin.html pada tanggal 2 Juni 2015.

Tengah seperti pembangunan jalur pipa gas dan kerjasama dengan perusahaan gas di Iran, Turki, dan Yordania.

Rusia berusaha mempertahankan Suriah dan pemerintahan Assad karena kedua negara telah memiliki kontrak eksplorasi energi di wilayah Suriah. Perusahaan Rusia, Soyuzneftegas telah menyepakati kontrak dengan Suriah senilai 90 juta USD untuk eksplorasi seluas 2.190 kilometer persegi di wilayah laut Suriah di Mediterania.⁷⁹

Rusia semakin meningkatkan kerjasama dengan Iran di berbagai sektor. Rusia dan Iran menyepakati pembelian minyak 500.000 bph dari Iran untuk ditukar dengan pembangunan pembangkit listrik, alat permesinan, produk pertanian, dan barang konsumsi. Kesepakatan tersebut bernilai 20 miliar USD dengan durasi lima tahun.⁸⁰

Sejak berakhirnya perang dingin, Rusia dan Turki telah melakukan normalisasi hubungan bilateral. Normalisasi hubungan tersebut ditunjukkan dengan meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Rusia-Turki mencapai 33 miliar USD.⁸¹ Sebagian besar perdagangan Rusia-Turki adalah komoditas energi berupa gas. Ekspor gas Rusia ke Turki mencapai 29 miliar kubik meter (bcm) dengan nilai 26 miliar USD pada tahun 2014.⁸² Rusia terus meningkatkan penjualan energi ke Turki dengan komoditas batubara dan minyak bumi. Kunjungan Putin ke Turki pada desember 2014 merupakan usaha Rusia merekatkan hubungan kedua negara. Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan kapasitas penyaluran gas melalui pipa *Blue Stream*.

Selain sektor gas, Rusia memiliki kemampuan teknologi canggih di bidang energi nuklir. Industri nuklir Rusia dikelola dan dikembangkan melalui

⁷⁹ Jonathan Saul. 17 Januari 2014. *Exclusive: Russia Steps Up Military Lifeline to Syria's Assad – Sources*. Diakses dari www.reuters.com/article/2014/01/17/us-syria-russia-arms-idUSBREA0G0MN20140117 pada tanggal 2 Juni 2015.

⁸⁰ Andrew Trotman. 2014. *Vladimir Putin Signs Historic \$20bn Oil Deal with Iran to Bypass Western Sanctions*. Diakses dari www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11014604/Vladimir-Putin-signs-historic-20bn-oil-deal-with-iran-to-bypass-western-sanctions.html pada tanggal 1 Juni 2015.

⁸¹ Volkan Ozdemir. 2014. *Moscow Gets Ready to Woo Ankara with Gas*. Diakses dari <http://www.russia-direct.org/opinion/moscow-gets-ready-woo-ankara-gas> pada tanggal 29 Mei 2015.

⁸² *Ibid.*

perusahaan negara Rosatom. Rosatom telah banyak mengembangkan reaktor nuklir untuk kepentingan sipil di berbagai negara. Rusia memiliki proyek pembangunan reaktor nuklir dengan Iran. Iran berupaya memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat setiap tahun dengan sumber energi yang beragam. Selain itu, Iran berambisi untuk memiliki dan menguasai teknologi nuklir. Peluang ini di manfaatkan Rusia untuk hadir memenuhi kebutuhan Iran dan memperkuat hubungan strategis. Rusia melalui perusahaan Rosatom menyetujui kontrak dengan Iran untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2014.⁸³ Pembangkit listrik tenaga nuklir akan di bangun di Busher dengan kapasitas 1.000 megawatt.

Hal yang sama terjadi di Turki, konsumsi energi yang terus mengalami kenaikan membuat Turki harus mencukupi kebutuhan energinya dari beragam sumber. Hal ini menjadi penting karena Turki merupakan salah satu negara dengan pasar yang tumbuh. Peluang tersebut juga dimanfaatkan oleh Rusia. Dalam kunjungan Putin ke Turki pada bulan Desember 2014, salah satu poin pembicaraan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga Nuklir. Rusia melalui Rosatom telah menandatangani proyek pembangunan reaktor nuklir senilai 21 miliar USD.⁸⁴

Selain mengincar pasar energi di Iran dan Turki, Rusia juga mengincar pasar energi di Yordania. Sumber energi di Yordania sebesar 98 persen berasal dari minyak sedangkan pertumbuhan kebutuhan listrik yang mencapai tujuh persen setiap tahun. Yordania berusaha mencari sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi dengan menggunakan nuklir. Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom telah memulai studi sejak tahun 2013 dan memulai proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Amra, bagian utara Yordania pada tahun 2014. Proyek ini akan menghasilkan listrik 2.000 megawatt dan bernilai 10 miliar USD

⁸³ World Nuclear News. 11 November 2014. *Russia to Build Eight More Reactors in Iran*. Diakses dari <http://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia-to-build-eight-more-reactors-in-Iran-11111401.html> pada tanggal 29 Mei 2015.

⁸⁴ Ibid.

akan selesai pada tahun 2022.⁸⁵ Strategi energi Rusia bertujuan membangun hubungan dekat dengan Turki dan Yordania yang merupakan sekutu Amerika Serikat sehingga mengurangi ancaman dari kedua negara tersebut. Strategi tersebut juga untuk mempertahankan pasar energi Rusia di Timur Tengah.

4.2 Kepentingan Jangka Pendek Rusia terhadap Mesir

Pada Bab 1, penulis telah menjelaskan *power* sesuai definisi dari Ray yaitu, kemampuan yang dimiliki negara untuk menghancurkan. Kemampuan menghancurkan yang dimiliki negara adalah hasil akumulasi komponen kekuatan baik yang terlihat dan tidak terlihat. Umumnya kekuatan negara yang paling diperhitungkan adalah besarnya kemampuan militer dan ekonomi yang dimiliki. Besarnya kekuatan yang dimiliki suatu negara tidak sekaligus menghasilkan kekuasaan atau pengaruh kepada negara lain yang memiliki kekuatan lebih kecil. Negara yang memiliki kekuatan besar dapat menggunakan kekuatan tersebut sebagai alat politik untuk mempengaruhi negara lain agar berperilaku sesuai yang diinginkan negara dengan kekuatan besar.

Rusia adalah negara dengan kekuatan besar kedua setelah Amerika Serikat. Kekuatan tersebut diukur dari kepemilikan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Tabel 4.3 menunjukkan kekuatan militer Rusia yang memiliki personel aktif 3 juta orang dan 70.197 total alat pertahanan darat, laut, dan udara. Anggaran pertahanan Rusia mencapai 84,5 miliar USD pada tahun 2014.⁸⁶ Persenjataan nuklir Rusia adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Rusia memiliki senjata dengan hulu ledak nuklir sebanyak 1.862 yang disebar di berbagai kawasan.⁸⁷ Sesuai asumsi realisme, untuk menjamin kelangsungan hidup maka

⁸⁵ Suleiman al-Khalidi. 2015. *Jordan Signs \$10 Billion Nuclear Power Plant Deal with Russia*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2015/03/24/us-jordan-nuclear-russia-idUSKBN0MK2QD20150324> pada tanggal 1 Juni 2015.

⁸⁶ The International Institute for Strategic Studies. 11 Februari 2015. *Military Balance 2015 Press Statement*. Diakses dari <https://www.iiss.org/-/media/Images/Publications/The%20Military%20Balance/MilBal%202015/MB2015%20Defence%20budgets%20and%20expenditure.jpg> pada tanggal 1 Juni 2015.

⁸⁷ Nuclear Threat Initiatives. April 2015. *Russia Nuclear*. Diakses dari www.nti.org/country-profiles/russia/nuclear/ pada tanggal 1 Juni 2015.

negara harus memperbesar kekuatan militernya.⁸⁸ Besarnya kekuatan militer Rusia merupakan langkah awal untuk menjamin keamanan negaranya dan memberikan pengaruh kepada negara lain. Kekuatan militer riil merupakan instrumen politik terkuat yang dapat mempengaruhi kebijakan negara lain.

Tabel 4.1 Kekuatan Militer Rusia Tahun 2015

Jenis Pertahanan	Jumlah
Pertahanan darat	61.086
Pertahanan udara	8.514
Pertahanan laut	597
Personil aktif	3.251.055
Anggaran pertahanan (miliar USD)	84,5

Sumber: Globalfirepower. 17 Februari 2015. *Country Military Strength (2015)*. Diakses dari http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Russia pada tanggal 26 Maret 2015;

Dalam hal ekonomi, kekuatan Rusia dapat diukur dari kualitas industri pertahanan. Data dari SIPRI mencatat, Rusia memiliki tujuh perusahaan pertahanan yang masuk dalam 100 besar perusahaan pertahanan dunia. Tujuh perusahaan tersebut adalah Almaz Antey, United Aircraft Corporation (UAC), Vertolety Rossii (Oboronprom), Sukhoi (United Aircraft Corporation), United Engine Corporation (UEC), United Shipbuilding Corporation (USC), dan Uralvagonzavod (UVZ).

Perusahaan yang bergerak di industri teknologi pertahanan semua bergabung dalam *Russian Technologies State Corporation*. Entitas tersebut yang menaungi perusahaan teknologi Rusia. Dalam proses jual-beli, perusahaan tidak melakukan sendiri melainkan melalui sebuah perusahaan yang khusus bergerak dibidang jual beli yaitu, Rosoboronexport. Rosoboronexport menjadi perusahaan yang memiliki hak untuk melakukan ekspor impor. Perusahaan ini juga berwenang melakukan kerjasama militer dan pertahanan dengan negara lain. Rosoboronexport menguasai 85 persen ekspor senjata Rusia sejak menjadi perusahaan negara pada tahun 2000.⁸⁹ Perusahaan ini menjadi bagian dari *Joint*

⁸⁸ Burchill dan Linklater. *Op. Cit.* Hal. 119.

⁸⁹ Rosoboronexport. 2010. *Status*.diakses dari http://www.roe.ru/roe/eng_status.html pada tanggal 1 Juni 2015.

Stock Company pada tahun 2011. Produksi senjata dilakukan oleh perusahaan lain.

Almaz Antey adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pertahanan berupa misil kendali dan radar. Produknya seperti sistem pertahanan udara anti pesawat basis darat dan laut dan teknologi komunikasi berupa sistem radar dan sistem kontrol otomatis. Produk pertahanan udara misil basis darat seperti tipe S-300, Antey-2500, Tor, dan Buk. Almaz Antey juga memproduksi sistem komunikasi untuk kepentingan sipil seperti radar dan pengatur lalu lintas udara.⁹⁰

United Aircraft Corporation bergerak di bidang industri pesawat baik sipil dan militer. Pesawat militer buatan UAC seperti pesawat tempur jenis Mig, PAK FA, pesawat pengebom strategis jenis Tu, dan pesawat latih militer Yak-130. Khusus untuk Sukhoi membuat pesawat tempur jenis Sukhoi (Su) berbagai tipe. UAC juga memproduksi pesawat kombatan seperti pesawat amfibi Be-200, pesawat penumpang Tu-214, Tu-204CM, Sukhoi Superjet 100, MC-21, dan An-124. Produk pesawat angkut dari UAC seperti MTS, II-76, dan An-124.⁹¹

Oboronprom bergerak di bidang industri helikopter sipil dan militer. Produk helikopter oboronprom terdiri dari helikopter serbu dan multifungsi. Helikopter serbu seperti Ka-52 Alligator, Mi-24/35, Mi-28N Night Hunter. Helikopter multifungsi seperti ANSAT, Ka-226T, Ka-28, Ka-31, Ka-62, Ka-32, Mi-171A2, Mi-26T, Mi-38, dan Mi-8/17. Helikopter buatan oboronprom memenuhi 14 persen helikopter di pasar global dengan pendapatan 138 miliar Ruble di tahun 2013.⁹²

United Engine Corporation bergerak di bidang industri khusus pembuatan mesin pesawat dan helikopter baik militer maupun sipil. UEC memproduksi mesin untuk perusahaan UAC dan oboronprom baik untuk tujuan militer dan sipil. UEC juga memproduksi mesin untuk perusahaan energi Rusia seperti Gazprom,

⁹⁰ Almaz Antey. 2015. *Main Defense Product Range*. Diakses dari www.almaz-antey.ru/en/catalogue/military_catalogue/ pada tanggal 2 Juni 2015.

⁹¹ United Aircraft Corporation. 2015. *Aircraft Lineup*. Diakses dari www.uacrussia.ru/en/aircraft/lineup pada tanggal 2 Juni 2015.

⁹² Oboronprom. 2015. *Mass Production*. Diakses dari www.oboronprom.ru/en/catalog/helicopters pada tanggal 2 Juni 2015.

Rosneft, dan Rosatom. Kecanggihannya UEC adalah kemampuannya memproduksi mesin untuk Roscosmos yang merupakan lembaga antariksa milik Rusia.⁹³

United Shipbuilding Corporation (USC) bergerak di bidang manufaktur kapal laut dan kapal selam militer maupun sipil juga jasa perbaikan. USC tidak hanya membuat kapal, tetapi juga membangun pelabuhan dan infrastruktur maritim secara keseluruhan. USC menjadi perusahaan yang mendukung pengembangan armada militer Rusia dengan membangun kapal dan infrastruktur pelengkapannya di semua lokasi armada Rusia. USC juga menjadi perusahaan pendukung industri barang dan jasa Rusia dengan membangun pelabuhan ekspor-impor, terutama fasilitas ekspor-impor energi.⁹⁴

Uralvagonzavod (UVZ) adalah perusahaan Rusia yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan berat. Produk utama perusahaan ini adalah *Main Battle Tank* seperti T-90, T-72, kendaraan penghancur rintangan IMR-3MA, pemusnah ranjau BMR-3M, BREM-1M, dan kendaraan lapis baja ATOM. Selain itu, UVZ juga memproduksi alat berat untuk tujuan sipil seperti gerbong kereta, kendaraan pembuat jalan raya, dan traktor pertanian. Selain memproduksi kendaraan, UVZ juga bergerak di bidang jasa pembuatan jalan raya dan pembuatan rel kereta api.⁹⁵

Penjualan tujuh perusahaan tersebut senilai 32,033 miliar USD pada tahun 2012.⁹⁶ Perusahaan Tersebut memproduksi senjata berat seperti Pesawat tempur, tank, helikopter serbu, kapal perang, kapal selam dan sistem pertahanan misil dari darat ke udara. Rusia menempati peringkat kedelapan dunia sebagai ekportir senjata ringan. Total penjualan Rusia mencapai 181 juta USD pada tahun 2012.⁹⁷

Kemampuan industri Rusia di bidang teknologi, khususnya pertahanan menjadi instrumen penting dalam politik luar negeri Rusia. Produk pertahanan Rusia menjadi pesaing bagi produk pertahanan Amerika Serikat. Data dari SIPRI

⁹³ United Engine Corporation. 2015. *About The Company*. Diakses dari www.uk-odk.ru/en/corporation/about/ pada tanggal 2 Juni 2015.

⁹⁴ United Shipbuilding Corporation. 2014. *FESRC Goals*. Diakses dari <http://dcss.ru/en/company/fesrc-goals.html> pada tanggal 2 Juni 2015.

⁹⁵ Uralvagonzavod. 2015. *About Corporation*. Diakses dari <http://uralvagonzavod.com/corporation/about/> pada tanggal 2 Juni 2015.

⁹⁶ Perlo-Freeman and Wezeman. Januari 2014. *The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2012*. SIPRI. Hal. 4.

⁹⁷ Holtom and Rigual. 2015. *Small Arms Survey 2015: Weapons and the World*. Cambridge. Cambridge University Press. Hal. 90.

menyebutkan bahwa produk pertahanan buatan Rusia memiliki jumlah penjualan terbesar kedua setelah Amerika Serikat pada tahun 2010-2014. Jumlah total penjualan Amerika Serikat sebesar 550 miliar USD atau 31 persen sedangkan Rusia 479,5 miliar USD atau 27 persen.⁹⁸

Bagi negara-negara importir, Rusia menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan senjata karena Rusia tidak melakukan intervensi dalam politik dalam negeri negara yang akan membeli. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat dan negara barat lain yang sangat memperhatikan politik dalam negeri negara yang akan membeli senjata mereka apakah negara pembeli melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Rusia biasanya hanya menjual senjata kepada negara yang dianggap Barat tidak bebas atau demokratis, memiliki politik luar negeri anti Barat, dan memiliki potensi untuk bersekutu dengan Rusia. Keluwesan persyaratan dari Rusia ini yang menjadikan persenjataan Rusia menjadi pilihan bagi banyak negara. Dalam konteks Mesir, pemerintahan Sisi dinilai tidak demokratis dan represif kepada rakyatnya sehingga Amerika Serikat melarang penjualan senjata ke Mesir. Kesempatan ini yang digunakan oleh Rusia untuk menjual senjata ke Mesir dan menjalin hubungan strategis.

Konsep *power* dari Ray menyebutkan kekuatan militer adalah instrumen politik yang harus dimanfaatkan untuk mempengaruhi negara lain karena kekuatan militer tidak sekaligus menghasilkan ketertundukan negara lain.⁹⁹ Kapabilitas militer Rusia yang besar dan keunggulan dalam penguasaan teknologi menjadi elemen kekuatan negara yang sangat penting. Penguasaan teknologi tidak dapat dilakukan oleh semua negara maka hal tersebut menjadi daya tawar tersendiri bagi Rusia. Kemampuan yang tinggi dibidang teknologi dimanfaatkan Rusia untuk membangun hubungan strategis dengan negara lain yang lebih lemah dan mempengaruhi kebijakan di setiap negara yang lebih lemah agar sesuai dengan keinginan Rusia.

Kekuatan besar Rusia tidak sekaligus menghasilkan kepatuhan politik oleh negara-negara di Timur Tengah. Israel adalah negara yang memiliki kekuatan

⁹⁸ Wezeman dan Wezeman. Maret 2015. *Trends in International Arms transfers, 2014*. SIPRI. Hal. 2.

⁹⁹ Masoed. *Op. Cit.* hal. 128.

lebih kecil dibanding Rusia tetapi hal itu tidak menjadikan Israel memiliki politik luar negeri yang mendukung Rusia. Dalam upaya mempengaruhi negara lain, Rusia memanfaatkan kekuatan besar tersebut sebagai alat politik dan mengontrol kebijakan negara lain sesuai dengan kepentingannya. Penjualan persenjataan ke Suriah, memberikan bantuan ekonomi, dan menempatkan armada militer di negara tersebut adalah strategi Rusia untuk mengendalikan kebijakan politik Suriah sekaligus menjadikannya sekutu. Dengan begitu, posisi Suriah dianggap tidak lagi membahayakan bagi Rusia. Hal seperti ini yang dilakukan Rusia kepada Mesir.

Setiap negara berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dengan berbagai cara. Pencapaian kepentingan nasional dilakukan dengan memperhitungkan posisi geografis masing-masing negara. Perilaku negara menentukan kebijakan sesuai dengan posisi geografis merupakan dasar munculnya geopolitik. Colin Flint mengartikan geopolitik sebagai upaya negara untuk menguasai dan memperebutkan wilayah kekuasaan.¹⁰⁰ Negara kemudian memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam wilayahnya untuk mencapai kepentingan nasional.

Posisi geografis Rusia berada di timur Benua Eropa dan di utara Benua Asia khususnya wilayah Timur Tengah. wilayah Eropa dan Asia yang berbatasan dengan Rusia memiliki sejarah perang antara kekuatan besar untuk memperebutkan kekuasaan teritorial. Rusia ketika masih bernama Uni Soviet merupakan salah satu aktor yang ikut dalam perebutan kekuasaan teritorial di wilayah tersebut. Runtuhnya Uni Soviet memperkecil kekuasaan Rusia atas teritorinya. Hal ini yang kemudian menentukan kebijakan Rusia untuk mengamankan teritori yang merupakan wilayah kedaulatan dan merebut seluas mungkin kekuasaan diluar kedaulatannya. Artinya, Rusia berusaha mengontrol teritori lain dengan pengaruhnya.

Secara geografis, wilayah Rusia memungkinkan untuk memproduksi minyak dan gas. Kemampuan ini digunakan sebagai sumber pemasukan utama bagi negara. Data penerimaan Rusia dari sektor energi mencapai 356 miliar USD

¹⁰⁰ Flint. *Op. Cit.* Hal. 13.

pada tahun 2013. Angka tersebut terdiri dari minyak mentah sebesar 174 miliar USD atau 33 persen yang dikirim ke Eropa dan Asia, gas alam sebesar 73 miliar USD atau 14 persen yang dikirim ke Eropa, dan produk minyak sebesar 109 miliar USD atau 21 persen yang dikirim ke Eropa dan Afrika Utara.¹⁰¹ Kondisi perekonomian Rusia yang mengandalkan sektor energi sebagai sumber pendapatan utama negara membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global dan mempengaruhi perekonomian negara. Seperti yang terjadi pada tahun 2009 ketika harga minyak jatuh dari 147 USD menjadi 34 USD dan mengurangi pendapatan negara dari sektor energi sebesar delapan persen.¹⁰² Hal itu diperburuk dengan menyusutnya pasar energi Eropa yang membuat penjualan perusahaan gas Rusia, Gazprom menyusut delapan persen pada tahun 2012.¹⁰³ Hal ini karena adanya pasokan gas dari Amerika Serikat dan Norwegia ke pasar energi Eropa.¹⁰⁴ Agar dapat menutup kerugian dan meningkatkan pendapatan negara, Rusia berusaha untuk melakukan ekspansi ke negara-negara dengan sumber energi kecil di Timur Tengah, salah satunya Mesir.

Mesir memiliki sumber energi yang cukup besar. Data tahun 2010 menunjukkan Mesir memproduksi 2,2 triliun kaki kubik (tcf) dan hanya menghabiskan untuk konsumsi dalam negeri sebesar 1,6 tcf.¹⁰⁵ Surplus energi memungkinkan Mesir menjadi eksportir gas. Pasca krisis politik tahun 2011, produksi gas Mesir terus menurun. Pada tahun 2013, produksi gas Mesir sebesar 2,0 tcf sedangkan konsumsi dalam negeri mencapai 1,9 tcf. Hal tersebut direspon oleh Mesir dengan mengizinkan beberapa perusahaan melakukan impor untuk mengamankan ketersediaan energi. Kebijakan impor gas dimanfaatkan oleh Rusia melalui Gazprom untuk mengekspor gas ke Mesir.

¹⁰¹ U.S. Energy Information Administration (EIA). 2013. *Oil and Natural Gas Sales Accounted for 68% of Russia's Total Export Revenues in 2013*. Diakses dari www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231 pada tanggal 1 Juni 2015.

¹⁰² Leon Aron. 2013. *The Political Economy of Russian Oil and Gas*. American Enterprise Institute for Public Policy Research. Washington D.C. Hal. 2.

¹⁰³ Ibid. Hal. 5.

¹⁰⁴ Ibid. Hal. 5.

¹⁰⁵ World Energy Council. 2015. *Gas in Egypt*. Diakses dari <https://www.worldenergy.org/data/resources/country/egypt/gas/> pada tanggal 1 Juni 2015.

Mesir diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 77 tcf. Agar dapat memanfaatkan potensi tersebut, Mesir membutuhkan dana besar untuk melakukan eksplorasi. Mesir dapat memenuhi pendanaan dari adanya investor. Pada bulan Maret 2015, perusahaan Rusia LetterOne Grup melakukan investasi sebesar 12 miliar USD untuk eksplorasi *West Nile Delta*.¹⁰⁶ Menyediakan energi dan investasi untuk Mesir dapat menjadi kesempatan bagi Rusia untuk semakin mempererat hubungan bilateral dan menandai kembali sebagai aktor penting di kawasan.

Tabel 4.1 menunjukkan data perdagangan Rusia Mesir. Data perdagangan Rusia-Mesir senilai 3,6 miliar USD pada tahun 2012. Ekspor Rusia ke Mesir senilai 3,3 miliar USD dengan 50 persen adalah ekspor gandum, sementara nilai ekspor Mesir ke Rusia hanya 300 juta USD.¹⁰⁷ Nilai tersebut berkurang menjadi 2,9 miliar USD pada tahun 2013 karena kondisi politik dalam negeri Mesir yang mengalami kekacauan politik. Nilai perdagangan kedua negara meningkat di tahun berikutnya menjadi 4,6 miliar USD setelah adanya kesepakatan kerjasama bilateral dengan pengiriman senjata dan gas Rusia ke Mesir.

Tabel 4.2 Nilai Perdagangan Rusia-Mesir

Tahun	Nilai Perdagangan (dalam miliar USD)
2012	3,6
2013	2,9
2014	4,6

Sumber: Daily News Egypt. 24 Februari 2013. '*Suez Canal Axis*' Development Plan Presented to Russian Investors at Arabia Expo. Diakses dari www.dailynewsegypt.com/2013/02/24/suez-canal-axis-development-man-presented-to-russian-investors-at-arabia-expo/ pada tanggal 1 Juni 2015. Embassy of the Russia Federation to the Arab Republic of Egypt. 2015. *Russian-Egyptian Relations*. Diakses dari www.egypt.mid.ru/eng/present/Index.html pada tanggal 22 Juni 2015.

Rusia membangun hubungan dekat dengan Mesir melalui kontrak penjualan senjata dan perjanjian ekonomi. Rusia dan Mesir menandatangani

¹⁰⁶ Rachel Williamson. 18 Maret 2015. *A Russian Role in Egypt's \$12 Billion BP Deal*. Diakses dari <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/a-russian-role-in-egypt-s-12-billion-bp-deal> pada tanggal 1 Juni 2015.

¹⁰⁷ Daily News Egypt. 24 Februari 2013. '*Suez Canal Axis*' Development Plan Presented to Russian Investors at Arabia Expo. Diakses dari www.dailynewsegypt.com/2013/02/24/suez-canal-axis-development-man-presented-to-russian-investors-at-arabia-expo/ pada tanggal 1 Juni 2015.

kesepakatan penjualan senjata diantaranya, pesawat tempur Su-25, Pakfat T50, Mig-35, Mig-27 ditambah persenjataan ringan untuk pasukan operasi khusus Mesir seperti senapan Mi-17, GM 94, AGS 30, AS SR 3, OSV 96, VSS Sniper, KA 226 T, berbagai tipe radio komunikasi, fasilitas komunikasi khusus, dan sistem radar Vera-E.¹⁰⁸ Kehadiran Sisi pada acara peringatan *Victory Day*¹⁰⁹ di Rusia mengindikasikan kedekatan Mesir dan Rusia. Setelah kesepakatan senjata tahun 2013, Rusia kembali membuat kesepakatan penjualan senjata dengan Mesir senilai 3,5 miliar USD.¹¹⁰ Tabel 4.2 menunjukkan peningkatan nilai transfer senjata dari Rusia ke Mesir. Kesepakatan awal antara kedua negara senilai 2 miliar USD pada tahun 2013. Kedua negara kembali mengadakan kesepakatan baru transfer senjata senilai 3,5 miliar USD pada tahun 2014. Peningkatan nilai perdagangan dan transfer senjata antara kedua negara menunjukkan peningkatan pengaruh Rusia terhadap Mesir.

Tabel 4.3 Peningkatan Nilai Transfer Senjata Rusia-Mesir

Tahun	Nilai transfer (dalam miliar USD)
2013	2
2014	3,5

Sumber: Al-Arabiya. 17 September 2014. *Russia, Egypt Seal Preliminary Arms Deal Worth \$3.5 Billion*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/17/Report-Russia-Egypt-seal-preliminary-arms-deal-worth-3-5-billion.html> pada tanggal 28 Mei 2015. Ariel Ben Solomon. 9 Februari 2014. *Russia And Egypt Complete 2 Billion Arms Deal Funded By Gulf State*, diakses dari <http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Russia-and-Egypt-complete-2-billion-arms-deal-funded-by-Gulf-states-340847> pada tanggal 12 Februari 2014.

Data pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 membuktikan Peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Rusia berhasil mempengaruhi Mesir melalui kesepakatan ekonomi dan pertahanan khususnya diplomasi penjualan alutsista pada tahun 2013. Peningkatan melalui ekonomi dan pertahanan sesuai dengan doktrin

¹⁰⁸ Theodore Karasik. 20 November 2013. *Arms to Egypt, From Russia With Love*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2013/11/20/Arms-to-Egypt-from-Russia-with-love.html> pada tanggal 28 Mei 2015.

¹⁰⁹ *Victory Day* adalah hari peringatan kemenangan Rusia atas Jerman pada perang dunia kedua yang diperingati setiap tanggal 9 Mei.

¹¹⁰ Al-Arabiya. 17 September 2014. *Russia, Egypt Seal Preliminary Arms Deal Worth \$3.5 Billion*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/17/Report-Russia-Egypt-seal-preliminary-arms-deal-worth-3-5-billion.html> pada tanggal 28 Mei 2015.

geopolitik Mackinder tentang ekspansi negara yang berada di *Heartland* atau Eropa untuk menguasai negara yang ada di *World Island* atau Eurasia-Afrika.¹¹¹

Besarnya kepentingan Rusia membutuhkan stabilitas politik di kawasan Timur Tengah. Salah satu negara yang berpengaruh dalam politik regional adalah Mesir. Beberapa konflik regional membutuhkan Mesir sebagai pihak yang membantu penyelesaian. Mesir memainkan peran penting dalam proses perdamaian Palestina dengan Israel. dalam kunjungannya ke Mesir, Putin menyatakan sebagai berikut:

*Of course, the unceasing conflict cannot but worry us. That is why we remain in regular contact with senior officials in Palestine and Israel. We urge both parties to make concessions to each other and to search for common ground in order to normalize the situation. We will further pursue this policy, both through bilateral channels and on various international platforms, first of all within the framework of the Middle East Quartet of international mediators, the activities of which should be intensified. We also consider it important to ensure close coordination of the Quartet's efforts with Egypt and other Arab countries.*¹¹²

Dari pernyataan diatas, Rusia membutuhkan Mesir untuk mencapai tujuannya dalam menciptakan perdamaian Israel dengan Palestina melalui jalur diplomasi. Mesir adalah pendukung otoritas Palestina di Tepi Barat dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. mesir juga merupakan salah satu negara yang dihormati oleh negara Arab lainnya. Peran Mesir dalam proses perdamaian Palestina dengan Israel adalah dengan adanya perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza. Mesir melakukan kontrol terhadap perbatasan dengan Gaza untuk menghindari masuknya penduduk Gaza ke Mesir dalam jumlah besar dan mencegah persenjataan masuk ke Gaza yang dapat membuat konflik semakin besar.

Rusia membutuhkan Mesir karena kepemimpinan Sisi dapat menjadi penengah antara Rusia dengan beberapa negara, misalnya Rusia dengan Arab Saudi dalam konflik Suriah. Rusia mendukung Assad sementara Arab Saudi

¹¹¹ Mackinder. *Op. Cit.* Hal 16.

¹¹² President of Russia Official Site. *Interview to Al-Ahram Daily*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/47643 pada tanggal 30 Juni 2015.

membantu pemberontak menggulingkan Assad. Putin memberi pernyataan sebagai berikut:

*The approaches of Russia and Egypt to the situation in Syria are similar. Our States advocate the unity and sovereignty of Syria, consistently stress that there is no alternative to political and diplomatic settlement. We have a similar vision of the initial measures to be taken to settle the Syrian crisis. They include, first of all, launching an inter-Syrian dialogue without any preconditions and foreign interference on the basis of the principles outlined in the Geneva Communiqué of June 30, 2012.*¹¹³

Menurut Flint, negara merupakan aktor geopolitik dan mereka memiliki tujuan. Dalam mencapai tujuannya, negara dipengaruhi oleh aktor lain.¹¹⁴ Rusia merupakan aktor geopolitik yang memiliki tujuan melindungi Suriah dari intervensi militer Amerika Serikat. Tindakan Rusia juga dipengaruhi negara lain dalam mencapai tujuannya seperti dukungan dari Mesir. Dari pernyataan Putin diatas menunjukkan dukungan Rusia dan Mesir atas kedaulatan Suriah yang artinya menolak intervensi asing dalam penyelesaian konflik Suriah. Kedua negara lebih memilih solusi dialog bagi pihak pemerintah dan pemberontak Suriah untuk menyelesaikan konflik. Mesir menolak kebijakan Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer dengan tidak mendukung salah satu pihak dan memilih solusi moderat.¹¹⁵ Mesir memilih kebijakan tersebut meskipun menerima bantuan ekonomi dari Arab Saudi.

¹¹³ *Ibid.* President of Russia Official Site. *Interview to Al-Ahram Daily*.

¹¹⁴ Flint. *Op. Cit.* Hal. 25.

¹¹⁵ Marc J. Sievers. 12 Januari 2015. *Questions About Egypt's Syria Policy*. Diakses dari <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/questions-about-egypts-syria-policy> pada tanggal 29 Mei 2015.



Gambar 4.1 Kawasan Mediterania Timur

Sumber: The University of Texas at Austin. *Middle East Maps*. Diakses dari http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html pada tanggal 12 Februari 2015.

Menurut Mackinder, kawasan *Heartland* atau Eropa dihuni oleh negara-negara ekspansif yang berusaha menguasai *World Island* atau Eurasia-Afrika.¹¹⁶ Gambar 4.1 Menunjukkan posisi geografis Mesir sangat strategis karena merupakan negara yang berada di *World Island* dan dekat dengan *Heartland*. Menurut Mahan, Laut Mediterania merupakan wilayah strategis karena merupakan jalur perdagangan yang ramai dan merupakan jalur lalu lintas bahan mentah dari luar Eropa dan hasil produksi dari Eropa.¹¹⁷ Posisi geografis Mesir memiliki wilayah laut di kawasan Mediterania Timur dan menguasai Terusan Suez. Jalur tersebut merupakan jalur perdagangan dan lalu lintas komoditas penting bagi industri di Eropa dan Asia. Rusia melihat kawasan laut Mediterania Timur dan Terusan Suez sebagai jalur strategis yang harus diamankan dengan kekuatan militer.

Gambar 4.1 Menunjukkan bahwa Laut Mediterania Timur merupakan kawasan yang menjadi batas beberapa negara di Timur Tengah dan menjadi arena pertarungan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara. Amerika Serikat memiliki armada keenam dan dua negara sekutu yaitu, Turki dan Israel yang memiliki armada laut di kawasan tersebut. Data dari media *Russian Today*, menyebutkan bahwa Amerika Serikat Bersama NATO pernah melakukan latihan militer gabungan dengan beberapa negara pada tahun 2012. Sebagai respon, Rusia kemudian melakukan latihan militer serupa di

¹¹⁶ Mackinder. *Op. Cit.* Hal 16.

¹¹⁷ Mahan. *Op. Cit.* Hal. 33.

kawasan pada bulan Januari 2013. Beberapa negara lain juga ikut menempatkan armada militernya. Israel mengerahkan kapal selam kelas *Dolphin* dengan kemampuan rudal nuklir. Langkah tersebut kemudian dibalas oleh Iran dengan mengerahkan armada angkatan laut ke 24. Perancis ikut mengerahkan angkatan udara berpatroli di kawasan. Cina sebagai kekuatan yang baru bangkit juga mengerahkan armada militernya di Mediterania Timur melalui Terusan Suez.¹¹⁸ Rusia dan Cina melakukan latihan militer bersama di Mediterania dan Teluk Aden dalam operasi *Joint Sea 2015* untuk meningkatkan kemampuan militer dan mengatasi pembajakan kapal.¹¹⁹ Rusia menempatkan armada lautnya di Mediterania Timur untuk melindungi kepentingannya di Timur Tengah. Salah satu yang terpenting adalah melindungi sekutunya, Suriah dari ancaman invasi Amerika Serikat. Rusia juga berusaha melindungi Iran dari ancaman serangan Israel karena program nuklir.

Dalam konteks hubungan Rusia dengan Mesir, pengerahan armada militer Rusia ke Mediterania merupakan usaha untuk meyakinkan Mesir bahwa Rusia merupakan negara dengan kekuatan militer yang kuat. Rusia berusaha meyakinkan Mesir agar tidak perlu khawatir meskipun tidak lagi hanya bergantung pada bantuan Amerika Serikat dan menjalin hubungan dengan Rusia sangat menguntungkan. Rusia juga berusaha melindungi kepentingan ekonominya di Mesir.

4.3 Kepentingan Jangka Panjang Rusia terhadap Mesir

Asumsi realisme menempatkan negara sebagai aktor yang mengeluarkan kebijakan untuk bertahan hidup dalam sistem internasional. Realita politik internasional yang anarki akan menghasilkan kebijakan negara yang berusaha menggunakan segala cara untuk bertahan hidup dan melindungi kepentingannya.

¹¹⁸ RT. 17 Mei 2013. *Russian Warships Enter Mediterranean to Form Permanent Task Force*. Diakses dari <http://rt.com/news/russian-pacific-fleet-mediterranean-374/> pada tanggal 1 Juni 2015.

¹¹⁹ James Holmes. 15 Mei 2015. *Why Are Chinese and Russian Ships Prowling the Mediterranean?* Diakses dari http://foreignpolicy.com/2015/05/15/china-russia-navy-joint-sea-2015-asia-pivot-blowback/?utm_content=buffer924ec&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer pada tanggal 1 Juni 2015.

Rusia berada dalam kawasan yang dihuni oleh negara dengan kekuatan besar dan kecil. Tiap negara saling berjuang memenuhi kepentingan nasional dengan menggunakan cara apapun. Negara-negara tersebut sering mengancam kepentingan nasional Rusia. Misalnya, perluasan anggota NATO hingga ke Eropa Timur dan peningkatan pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah yang mengancam melakukan intervensi militer ke negara sekutu Rusia. Dari perspektif realis, Rusia berusaha mempertahankan kepentingannya, yang utama adalah untuk memastikan kelangsungan hidup negara dan ketertiban sosial di dalam negeri. Kepentingan lain adalah melindungi dan mempertahankan wilayah pengaruh politik dan ekonomi terutama di kawasan Timur Tengah. Sebagai aktor rasional, Rusia berusaha membuat strategi untuk memaksimalkan peluang untuk mencapai kepentingan nasional.

Realis menganjurkan negara untuk selalu memanfaatkan peluang meraih lebih banyak kekuatan ketika ada kesempatan yang mungkin untuk dicapai. Negara harus memaksimalkan kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidup. kekuatan yang maksimal tidak hanya menjamin kelangsungan hidup negara tapi juga memberikan keuntungan bagi negara karena memiliki pengaruh terhadap negara lain yang dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi.¹²⁰ Strategi Rusia dalam memperbesar pengaruh politik dapat digambarkan misalnya, Rusia memiliki pengaruh politik di dua negara Timur Tengah yaitu Iran dan Suriah, sedangkan pihak yang dianggap musuh adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Rusia melihat Mesir sebagai negara potensial untuk dipengaruhi secara politik dalam mencapai kepentingannya. Agar dapat menandingi kekuatan Amerika Serikat maka Rusia harus memperkuat pengaruh atau menaklukkan negara yang dapat menjadi sekutu Amerika Serikat dan membahayakan Rusia. Negara biasa memperkuat pengaruh dengan cara mengadakan kesepakatan penjualan senjata, dari penjual berkekuatan besar ke pembeli dengan kekuatan lebih kecil. Rusia membangun hubungan dengan Mesir melalui penjualan senjata. Dalam hal kekuatan militer, Rusia memiliki kemampuan dan industri militer yang jauh lebih

¹²⁰ William. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge. Hal. 18.

kuat dibanding Mesir. Keunggulan tersebut menjadi salah satu hal yang menarik dan meyakinkan bagi Mesir untuk tunduk pada kekuatan politik Rusia.

Kedekatan hubungan Rusia dengan Mesir didukung oleh kondisi politik internal kedua negara. Rusia dan Mesir sama-sama memiliki rezim yang tidak demokratis dan mengarah pada otoriter meskipun terpilih melalui pemilu. Rusia dibawah pemerintahan Putin dan Mesir dibawah pemerintahan Sisi. Doktrin politik luar negeri Rusia pada masa pemerintahan Putin adalah menjadikan Rusia sebagai model alternatif pemerintahan dunia sebagai tandingan model pemerintahan demokratis ala Barat. Dengan doktrin ini, Rusia memiliki hubungan baik dengan negara-negara yang tidak demokratis seperti Kyrgystan, Vietnam, Cina, Suriah, Iran, dan Kuba. Pola kedekatan hubungan negara berdasarkan kesamaan gaya pemerintahan menjelaskan berakhirnya kedekatan Rusia dengan Libya dan Rusia dengan Irak. Rusia dan Libya memiliki hubungan baik ketika Libya pada masa pemerintahan Khaddafi dan Irak pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Kedua pemimpin tersebut memiliki karakter rezim tidak demokratis dan mengarah pada otoriter. Ketika kedua pemerintahan tersebut jatuh karena konflik internal dan intervensi Amerika Serikat dan sekutu maka berakhir pula hubungan Rusia dengan Libya dan Irak. Dalam kasus Mesir, naiknya Sisi menjadi presiden Mesir yang diawali kudeta militer mengakhiri hubungan Amerika Serikat dengan Mesir. Hal ini dapat dipahami sebagai ketidakcocokan Amerika Serikat terhadap rezim baru Mesir yang dianggap tidak demokratis. Perbedaan politik internal Amerika Serikat dan Mesir menghasilkan perpecahan bagi aliansi kedua negara.

Amerika Serikat merupakan dengan kekuatan besar di Timur Tengah. Kemampuan militer dan ekonomi yang besar membuat negara-negara di kawasan memilih untuk menjadi sekutunya. Sebagai aktor hegemon mampu menggerakkan kebijakan luar negeri sekutunya sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Gabungan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya membuat kebijakan mereka diikuti oleh negara lain.

Rusia meningkatkan kekuatan militer militer secara ofensif dibuktikan dengan pengerahan armada militer ke Laut Mediterania tahun 2013. Rusia

menambah pangkalan angkatan laut di Limasol dan angkatan udara, Siprus setelah berhasil mempengaruhi Siprus dengan kekuatan ekonomi.¹²¹ Putin melakukan kunjungan ke Siprus pada Februari 2015 dan membuat pernyataan resmi sebagai berikut:

*Today, you witnessed the signing of many documents concerning defence cooperation. For example, this pertains to our military ships' entry into Cyprus ports. These are primarily Russian ships participating in international efforts to fight terrorism, international piracy, etc.*¹²²

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Rusia mengincar perluasan area bagi kekuatan militer dalam mengamankan kepentingannya. Pangkalan angkatan laut di Siprus digunakan untuk memperkuat pangkalan angkatan laut di Tartus, Suriah yang sudah ada sebelumnya. Tujuan Rusia mengerahkan armada lautnya ke Laut Mediterania adalah menguasai wilayah laut tersebut, khususnya Laut Mediterania Timur. Kawasan Mediterania Timur adalah kawasan yang dihuni banyak negara termasuk Suriah yang merupakan sekutu Rusia. Kawasan tersebut juga menjadi ruang hidup bagi Mesir. Menguasai Laut Mediterania bagian Timur dengan kekuatan militer akan menjadikan Rusia sebagai hegemon dan mempermudah dalam merebut pengaruh negara-negara di kawasan.

Pengerahan militer merupakan cara untuk meyakinkan Mesir bahwa Rusia adalah kekuatan besar regional. Ketika Mesir mengakui kekuatan besar Rusia dan memilih menjalin hubungan bilateral yang mengarah pada aliansi maka akan mengamankan posisi Rusia. Hal ini mengingat Mesir sejak tahun 1973 telah meninggalkan Rusia dan memilih menjadi sekutu Amerika Serikat.

Rusia memandang Mesir sebagai negara yang mampu meningkatkan kekuatan nasional dan pengaruh Rusia di Timur Tengah. Hal ini karena Mesir adalah negara yang dihormati dan memiliki pengaruh dalam politik internasional di Timur Tengah. Pengaruh politik Mesir telah dimulai sejak era Nasser mengeluarkan kebijakan anti imperialisme Barat yang mendukung Israel. Pada

¹²¹ Elena Holodny. 9 Februari 2015. *Russia is Getting Military Bases in an EU State*. Diakses dari www.businessinsider.co.id/russia-military-agreement-in-cyprus-2015-2/#.VUDZkqKnpDA pada tanggal 29 April 2015.

¹²² President of Russia Official Website. *Press Statement and Replies to Journalists' Questions Following Russian-Cypriot Talks*. Diakses dari <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/47739> pada tanggal 25 Februari 2015.

saat itu, Mesir juga mengeluarkan kebijakan luar negeri pan-Arabisme yang menyerukan persatuan Arab. Agresifitas politik luar negeri Mesir menghasilkan citra tersendiri yang menjadikan negara tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap negara lain. pada saat Mesir mengalami konflik internal, negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Qatar tidak meninggalkan Mesir dan justru memberikan bantuan ekonomi. Hal ini membuktikan pentingnya Mesir bagi negara-negara Arab lain. Posisi Mesir yang memiliki pengaruh politik dimanfaatkan Rusia untuk mengembalikan pengaruhnya di Timur Tengah. Ketika Mesir mengakui bahwa menjalin hubungan Strategis dengan Rusia maka dapat mengembalikan citra Rusia sebagai negara besar. Hubungan strategis dengan Mesir adalah pijakan awal bagi Rusia untuk melakukan ekspansi strategis dengan negara lain di Timur Tengah.

Upaya Rusia meningkatkan kekuatan adalah untuk menguasai wilayah dan mempengaruhi kebijakan negara-negara di kawasan agar tidak membahayakan kepentingannya. Upaya tersebut juga sebagai bentuk akumulasi kekuatan dalam menghadapi Amerika Serikat. Rusia menganggap bahwa Amerika Serikat yang memiliki kekuatan besar sewaktu-waktu dapat mengancam kepentingannya di kawasan. Perimbangan kekuatan merupakan hasil dari kebijakan negara dalam mengakumulasi kekuatan untuk menyamai kekuatan negara lain yang terlebih dahulu ada atau *status quo*. Usaha tersebut dilakukan agar tidak ada satu negara atau blok negara yang memiliki kekuatan dominan. Dominasi kekuatan tunggal akan menghasilkan unipolarisme dan kekuatan tunggal tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup dan kepentingan negara dengan kekuatan yang lebih kecil. Dalam hal ini, kekuatan Rusia lebih kecil dibanding Amerika Serikat. Kepentingan dan kelangsungan hidup Rusia menjadi terancam karena jika Amerika Serikat menyerang kekuatan Rusia tidak cukup untuk melakukan perimbangan. Rusia berusaha mengimbangi kekuatan Amerika Serikat yang selama ini menjadi kekuatan dominan di kawasan. Dalam konteks ini, Rusia berperan sebagai *revisionist state*. Kawasan yang menjadi perebutan dan konsentrasi kekuatan Amerika Serikat dan Rusia adalah Timur Tengah, khususnya Mediterania.

Dalam konteks Timur Tengah, Amerika Serikat merupakan aktor paling berpengaruh karena memiliki kekuatan besar di kawasan. Amerika Serikat memiliki pengaruh besar karena menempatkan militernya di kawasan dengan adanya armada kelima di Bahrain dan armada keenam di Mediterania. Hal tersebut membuat banyak negara-negara Timur Tengah memilih menjadi sekutu Amerika Serikat untuk mendapatkan jaminan keamanan. Kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya yang besar membuat kepentingan Rusia terancam. Rusia berusaha melindungi rezim-rezim yang dianggap tidak demokratis oleh Barat seperti Assad di Suriah dan Khaddafi di Libya. Rusia gagal melindungi Libya dari serangan NATO yang akhirnya meruntuhkan rezim Khaddafi.

Kembali Rusia menjadi aktor regional di kawasan timur tengah merupakan respon terhadap pengaruh Amerika Serikat yang semakin kuat di negara tetangga Rusia. Untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat, Rusia meluncurkan *State Armament Program for 2011-2020* atau program pembangunan pertahanan nasional 2011-2020. Program tersebut bertujuan meningkatkan kekuatan militer dengan memperbarui dan menambah alat utama sistem persenjataan di semua armada. Dalam program tersebut, persenjataan yang diperbarui diantaranya kapal perang, kapal selam nuklir, pesawat, helikopter, misil nuklir strategis, setelit, senjata presisi tinggi, dan sistem pertahanan udara dengan total anggaran mencapai 770 miliar USD.¹²³ Program tersebut akan menambah kekuatan Armada laut Rusia menjadi 51 kapal perang dan 24 kapal selam dengan kemampuan nuklir yang menghabiskan dana 140 miliar USD.¹²⁴ Bagi angkatan udara, program tersebut menambah 86 pesawat tempur dan 100 helikopter pada tahun 2013, 120 pesawat tempur dan 90 helikopter pada tahun 2014. Program tersebut diproyeksikan akan memperkuat angkatan udara Rusia

¹²³ President of Russia Official Site. 29 November 2013. *Meeting with Defence Ministry Officials and Representatives of Defence Companies*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/36 pada tanggal 3 Juli 2015.

¹²⁴ RT. 31 Juli 2013. *Bid for Naval Dominance: Russia Significantly Boosts Nuclear Fleet*. Diakses dari <http://rt.com/news/russia-navy-nuclear-submarine-fleet-450/> pada tanggal 1 Juni 2015.

dengan total jumlah 1.591 alutsista udara terbaru pada tahun 2020.¹²⁵ Melalui program tersebut, kekuatan militer Rusia diperkuat dengan radar yang mampu mendeteksi serangan rudal dari kawasan Mediterania, pertahanan udara S-400, 28 sistem satelit navigasi global, dan 22 misil balistik antar benua basis darat.¹²⁶

Rusia melakukan upaya perimbangan kekuasaan menghadapi kekuatan Amerika Serikat khususnya di Mediterania. Agar dapat mencapai kekuatan yang cukup dalam membentuk perimbangan maka dibutuhkan anggaran militer yang besar. Sejak dimulainya konflik internal di beberapa negara Timur tengah yang mengancam kepentingannya, Rusia meningkatkan anggaran militer dari tahun 2010-2012. Tabel 4.4 menunjukkan peningkatan dari 53,3 miliar USD pada tahun 2010 menjadi 71,9 USD pada tahun 2011, dan meningkat menjadi 90,7 miliar USD pada tahun 2012. Serangkaian sanksi ekonomi yang diberikan barat kepada Rusia dan menurunnya penerimaan negara karena turunnya harga komoditas energi membuat anggaran militer Rusia menurun. Penurunan anggaran militer menjadi 87,8 miliar USD pada tahun 2013 dan 84,5 pada tahun 2014. Meskipun mengalami penurunan jumlah, anggaran militer Rusia tetap mempertahankan jumlah persentase pertahanan dari Produk Domestik Bruto (PDB) diatas empat persen. Data SIPRI menunjukkan anggaran militer Rusia sebesar 4,4 persen dari PDB tahun 2012, anggaran tahun 2013 sebesar 4,1 persen dari PDB tahun 2013, dan anggaran tahun 2014 sebesar 4,5 persen dari PDB 2014.¹²⁷

Asumsi realisme adalah struktur internasional yang anarki akan membuat negara memperkuat kekuatan militer untuk bertahan hidup dan mengamankan kepentingannya.¹²⁸ Peningkatan anggaran pertahanan dan program pembangunan pertahanan Rusia adalah upaya menjamin kelangsungan hidup dan menjaga kepentingannya terutama di Timur Tengah. Sebagai *revisionist state*, Rusia berusaha mengimbangi dominasi Amerika Serikat dengan menambah kekuatan

¹²⁵ President of Russia Official Site . 28 November 2013. *Meeting on developing the Air Force*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/36 pada tanggal 3 Juli 2015.

¹²⁶ Ibid. President of Russia Official Site. 29 November 2013.

¹²⁷ Perlo-Freeman *et al.* April 2015. Trends in World Military Expenditure, 2014. SIPRI.

¹²⁸ William. *Op. Cit.* Hal. 18.

militernya. Peningkatan anggaran pertahanan dan program pembangunan pertahanan 2011-2020.

Tabel 4.4 Anggaran Militer Rusia 2010-2014

Tahun	Anggaran Militer (dalam miliar USD)
2010	53,3
2011	71,9
2012	90,7
2013	87,8
2014	84,5

Sumber: Perlo-Freeman *et al.* April 2015. *Trends in World Military Expenditure, 2014*. SIPRI.

Dalam usaha mencapai perimbangan kekuatan, Rusia memanfaatkan potensi kekuatan Mesir untuk mengimbangi kekuatan militer dan hegemoni Amerika Serikat di kawasan. Upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan suplai senjata kepada Mesir. Tabel 4.5 menunjukkan Mesir memiliki 2.330 pertahanan darat, 2.844 pertahanan udara, 407 pertahanan laut, dan 1.268.500 personil militer aktif. Kekuatan militer Mesir adalah yang terbesar kedua setelah Israel, seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya.

Tabel 4.5 Kekuatan Militer Mesir Tahun 2015

Jenis Pertahanan	Jumlah
Pertahanan darat	2.330
Pertahanan udara	2.844
Pertahanan laut	407
Personil aktif	1.268.500
Anggaran pertahanan (miliar USD)	4,4

Sumber: Sumber: Globalfirepower. 17 Februari 2015. *Middle East Countries Ranked by Military Power (2015)*. Diakses dari <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-middle-east.asp> pada tanggal 26 Maret 2015.

Asumsi realisme menyebutkan bahwa negara harus mengakumulasi kekuatan militer sehingga nampak menjadi kekuatan besar yang mampu mempengaruhi negara dengan kekuatan yang lebih kecil tanpa melakukan serangan.¹²⁹ berdasarkan data pada Tabel 4.5, kekuatan militer Mesir jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan militer Rusia. Kekuatan yang lebih besar

¹²⁹ William. *Op. Cit.* Hal. 22.

memudahkan Rusia mempengaruhi perilaku Mesir sesuai kepentingannya. Pada sisi lain, dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa dengan bertambahnya kekuatan karena bergabungnya Mesir menjadi sekutu maka akan semakin memperkuat posisi hegemoni Rusia di Timur Tengah. Asumsi lain, kekuatan Mesir yang besar tersebut tidak akan menjadi ancaman bagi Rusia karena kedua negara telah terikat dalam hubungan strategis dan Rusia sebagai pihak yang dominan. Langkah Rusia terhadap Mesir akan menjamin kepentingan dan keamanan Rusia di kawasan Timur Tengah. Kondisi perimbangan kekuatan terjadi ketika Mesir yang sejak tahun 1973 menjadi sekutu Amerika Serikat merubah politik luar negerinya menjadi lebih terbuka dengan negara kekuatan besar lainnya seperti Rusia. Kesamaan sikap politik luar negeri Rusia dan Mesir untuk solusi dialog dalam penyelesaian konflik Suriah mengindikasikan bekerjanya pengaruh Rusia kepada Mesir. Kesamaan tersebut terjadi di tengah sikap Amerika Serikat yang berusaha melakukan intervensi militer.

Perimbangan kekuatan menurut Morgenthau adalah mencegah satu negara mengakumulasi kekuatan dominan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan perlawanan langsung dan persaingan.¹³⁰ Dalam hal perimbangan kekuasaan di Timur Tengah, kekuatan Rusia berhadapan langsung dengan kekuatan Amerika Serikat. Pengerahan armada militer Rusia dapat dibaca sebagai upaya untuk mencegah Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang dominan. Hal tersebut terjadi dalam konteks ekonomi dan politik, khususnya kekuatan militer.

Pada keadaan lain, perimbangan kekuatan terjadi dalam bentuk persaingan memperebutkan pengaruh di suatu negara yang kekuatannya lebih kecil namun dapat menjadi kekuatan tambahan. Hal ini dijelaskan dengan kebijakan Rusia mendekati Mesir dan berusaha membangun hubungan strategis. Mesir merupakan negara yang diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Rusia karena kekuatan Mesir mampu membantu negara besar menjadi kekuatan tunggal dominan di Timur Tengah. Strategi Rusia dalam menjadikan Mesir sebagai mitra strategis dapat menjadi pijakan untuk kembali sebagai aktor penting di kawasan. Langkah

¹³⁰ Morgenthau. *Op. Cit* Hal. 201.

tersebut juga dapat mengurangi kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat dalam politik internasional di Timur Tengah.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kepentingan Rusia dalam penjualan alat utama sistem persenjataan ke Mesir. Pertama, sebagai strategi jangka pendek untuk mengamankan kepentingannya. Kedua, sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kekuatan dan mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Kepentingan yang sangat besar ini membuat Rusia harus mengamankan posisinya dengan menjalin hubungan strategis dengan negara berpengaruh di kawasan yaitu Mesir.

Terdapat dua hal utama yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek Rusia di Timur Tengah yaitu pasar energi dan senjata. Rusia adalah negara yang wilayahnya memiliki cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Rusia juga mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadi negara eksportir minyak dan gas. Pada bidang industri teknologi, Rusia memiliki kapabilitas penguasaan industri teknologi yang canggih. Potensi tersebut dimanfaatkan dengan memproduksi alat-alat canggih dibidang transportasi dan pertahanan untuk meningkatkan kekuatan militer nasional dan ekspor ke berbagai negara. Dengan kemampuan industri tersebut, Rusia menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat dan negara penyuplai senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Rusia memanfaatkan industri energi dan industri teknologi militer sebagai alat mengakumulasi kekuatan nasional. Kekuatan besar tersebut digunakan sebagai instrumen politik luar negeri untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain agar sesuai dengan kepentingan Rusia. Kekuatan sebagai instrumen politik juga mampu menjaga kepentingan dan keamanan Rusia.

Dalam konteks strategi jangka panjang, kedekatan teritorial Rusia dengan Timur Tengah, mendorong Rusia selalu menjaga kelangsungan dan keamanan kepentingan jangka pendeknya. Agar dapat mengamankan kepentingannya di Timur Tengah, Rusia melakukan berbagai cara untuk menjadi negara yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah seperti mengirimkan armada militer dan

mengadakan hubungan strategis dengan negara-negara di kawasan. Pada sisi lain, Amerika Serikat adalah negara yang memiliki kepentingan di Timur Tengah dan mengerahkan armada militer dalam jumlah besar di kawasan. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan Rusia. Oleh karena itu, Rusia melakukan strategi perimbangan kekuasaan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Hubungan strategis Rusia dengan Mesir akan menciptakan kekuatan baru di kawasan dan mengurangi kekuatan Amerika Serikat.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Andersen, Roy, Robert F. Seibert, dan Jon G. Wagner. 2009. *Politics and Change in the Middle East: Source of Conflict and Accomodation*. New Jersey: Person Education, Inc.
- Barakat, Halim. 2012. *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Brezinski, Zbigniew. 1997. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperative*. New York: Basic Book.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 2012. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Flint, Colin. 2006. *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge.
- Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Holtom, Paul dan Christelle Rigual. 2015. *Small Arms Survey 2015: Weapons and the World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salmon, Trevor. C. 2000. *Issues in International Relations*. New York: Routledge.
- Ishiyama, John T. dan Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu: Sebuah Panduan Tematis, Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Kamrava, Mehran. 2005. *The Modern Middle East : A Political History Since the First World War*. California: University of California Press.
- Mahan, Alfred. T. 1890. *The Influence of Sea Power Upon History 1660 – 1783*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Mankoff, Jeffrey. 2009. *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Morgenthau, Hans. J. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia.
- Ochsenwald, William dan Sydney Nettleton Fisher. 2003. *The Middle East: a History*. New York: Mc Graw Hill.

Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.

Sakwa, Richard. 2002. *Russian Politics and Society*. New York: Routledge.

Dunne, Timme, Milja Kurki, dan Steve Smith. *International Relations Theories: Discipline and Diversity, 3rd Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Trenin, Dmitri. 2014. *Russia Breakout The Post Cold War System: The Drivers of Putin Course*. Moscow: Carnegie Endowment for International Peace.

William, Paul. D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.

Jurnal

Mackinder, Halford. 1904. Geographical Pivot Of History. *The Geographical Journal*. Volume. 23, No. 4. London: Blackwell Publishing.

Bagno-Moldavsky, Olena. 2013. Russian Foreign Policy in the Middle East: No Change in the Offing. *Strategic Assessment*. Volume 15, No. 4. Tel Aviv: The Institute for National Security Studies.

Laporan

Aron, Leon. 2013. *The Political Economy of Russian Oil and Gas*. American Enterprise Institute for Public Policy Research. Washington D.C.

Cohen, Ariel. *How US Should Respond to Russia's Unhelpful Role in the Middle East*. Backgrounder 8 Maret 2012. The Heritage Foundation.

Hamid, Hasan A. Hafidh. 2014. *Annual Report 2013*. Vienna. Organization of Exporting Countries Petroleum Public Relations and Information Department.

Malashenko, Alexey. Oktober 2013. *Russia and The Arab Spring*. Carnegie Moscow Center.

Monaghan, Andrew. 2013. *The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving Continuity*. Chatam House.

Perlo-Freeman, Sam and Pieter D. Wezeman. Januari 2014. *The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2012*. SIPRI.

Perlo-Freeman, Sam, Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman. April 2015. *Trends in World Military Expenditure, 2014*. SIPRI.

Sharp, Jeremy M. 2009. *Egypt: Backgroud and US Relations*. Congressional Research Service. CRS report to Congress.

Wezeman, Pieter D. and Siemon T. Wezeman. Maret 2015. *Trends in International Arms transfers, 2014*. SIPRI.

Website

Al-Arabiya. 17 September 2014. *Russia, Egypt Seal Preliminary Arms Deal Worth \$3.5 Billion*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/17/Report-Russia-Egypt-seal-preliminary-arms-deal-worth-3-5-billion.html> pada tanggal 28 Mei 2015.

Al-Khalidi, Suleiman. 2015. *Jordan Signs \$10 Billion Nuclear Power Plant Deal with Russia*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2015/03/24/us-jordan-nuclear-russia-idUSKBN0MK2QD20150324> pada tanggal 1 Juni 2015.

Almaz Antey. 2015. *Main Defense Product Range*. Diakses dari www.almaz-antey.ru/en/catalogue/military_catalogue/ pada tanggal 2 Juni 2015.

and Representatives of Defence Companies. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/36 pada tanggal 3 Juli 2015.

Andrew Trotman. 2014. *Vladimir Putin Signs Historic \$20bn Oil Deal with Iran to Bypass Western Sanctions*. Diakses dari www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11014604/Vladimir-Putin-signs-historic-20bn-oil-deal-with-Iran-to-bypass-Western-sanctions.html pada tanggal 1 Juni 2015.

Ari Yashar. 4 November 2013. *Russia Sends Most Powerful Ships to Mediterranean*. Diakses dari <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/173578> pada 8 Mei 2014.

Ariel Ben Solomon. 9 Februari 2014. *Russia And Egypt Complete 2 Billion Arms Deal Funded By Gulf State*. diakses dari <http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Russia-and-Egypt-complete-2-billion-arms-deal-funded-by-Gulf-states-340847> pada tanggal 12 Februari 2014.

Awad Mustafa. 24 November 2013. *Intrigue Deepens Over Egypt - Russia Arms Deal*. diakses dari <http://www.defensenews.com/article/20131124/DEFREG01/311240009/Intrigue-Deepens-Over-Egypt-Russia-Arms-Deals> pada tanggal 12 februari 2014.

Beehner, Lionel. 1 November 2006. *Russia-Iran Arms Trade*. Diakses dari <http://www.cfr.org/arms-industries-and-trade/russia-iran-arms-trade/p11869> pada tanggal 17 April 2015.

- Brad Plumer. 26 Agustus 2013. These Maps Show How Asia Is Taking Over The Oil Markets. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/26/these-maps-show-how-asia-is-taking-over-the-oil-markets/> pada tanggal 12 Februari 2015.
- Centre for Analysis of Strategic and Technologies (CAST). 2012. *Russia Arms Industry and Arms Trade: Fact and Figures*. Russia. Diakses dari http://www.cast.ru/files/all-stats_eng.pdf pada tanggal 8 Mei 2014.
- CIA. *The World Factbook*. 2014 Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html> pada tanggal 18 Februari 2015.
- Daily News Egypt. 24 Februari 2013. 'Suez Canal Axis' Development Plan Presented to Russian Investors at Arabia Expo. Diakses dari www.dailynewsegypt.com/2013/02/24/suez-canal-axis-development-man-presented-to-russian-investors-at-arabia-expo/ pada tanggal 1 Juni 2015.
- Dailycaller. 11 September 2012. *About that 'Navy Map of Ships Near Benghazi'*. diakses dari <http://dailycaller.com/2014/02/17/navy-map-ships-near-benghazi/> pada tanggal 26 Maret 2015.
- Defense Industry Daily. 2014. *Baby Come Back: Iraq is Buying, Fielding Russian Weapons Again*. Diakses dari <http://www.defenseindustrydaily.com/baby-come-back-iraq-is-buying-russian-weapons-again-07571/> pada tanggal 1 Juni 2015.
- Defense Industry Daily. 9 November 2014. *Syria's Russian Weapon Buys*. Diakses dari <http://www.defenseindustrydaily.com/syria-buying-mig31s-mig35s-for-1-billion-03391/> pada tanggal 2 Juni 2015.
- Embassy of the Russia Federation to the Arab Republic of Egypt. 2015. *Russian-Egyptian Relations*. Diakses dari www.egypt.mid.ru/eng/present/Index.html pada tanggal 22 Juni 2015.
- Evrpidou, Stefanos. 2014. *Cabinet gives OK for Russian use of Paphos base*. Diakses dari <http://cyprus-mail.com/2014/01/10/cabinet-gives-ok-for-russian-use-of-paphos-base/> pada 8 Mei 2014.
- Federation of American Scientists. 28 Juli 2011. *Numbered Fleets* diakses dari http://fas.org/man/dod-101/navy/unit/fleet_n.htm pada tanggal 2 Maret 2015.
- Global Research. 18 Juni 2013. *Russian Advanced Weapons for Syria: Unrevealed Secrets of Vladimir Putin's Recent Visit to London*. Diakses dari <http://www.globalresearch.ca/russian-advanced-weapons-for-syria-unrevealed-secrets-of-vladimir-putins-recent-visit-to-london/5339559> pada tanggal 17 April 2015.

- Global Security. 1 februari 2015. *Algeria - Air Force – Modernization*. Diakses dari www.globalsecurity.org/military/world/algeria/air-force-modernization.htm pada tanggal 2 Juni 2015.
- Global Security. 5 Juli 2011. *Sixth Fleet Naval Striking and Support Forces, Southern Europe (STRIKFORSOUTH)*. Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/c6f.htm> pada tanggal 26 Maret 2015.
- Global Security. 7 Januari 2015. *Where Are the Carriers?* Diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/ops/where.htm> pada tanggal 2 Maret 2015.
- Globalfirepower. 17 Februari 2015. *Middle East Countries Ranked by Military Power (2015)*. Diakses dari <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-middle-east.asp> pada tanggal 26 Maret 2015.
- Holmes, James. 15 Mei 2015. *Why Are Chinese and Russian Ships Prowling the Mediterranean?* Diakses dari http://foreignpolicy.com/2015/05/15/china-russia-navy-joint-sea-2015-asia-pivot-blowback/?utm_content=buffer924ec&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer pada tanggal 1 Juni 2015.
- Holodny, Elena. 9 Februari 2015. *Russia is Getting Military Bases in an EU State*. Diakses dari www.businessinsider.co.id/russia-military-agreement-in-cyprus-2015-2/#.VUDZkqKnpDA pada tanggal 29 April 2015.
- Itar-Tass. 28 November 2013. *Ships of Russian Black Sea Fleet to Remain on Duty in Mediterranean*. Diakses dari <http://tass.ru/en/russia/709389> pada tanggal 26 Maret 2015.
- Karasik, Theodore. 20 November 2013. *Arms to Egypt, From Russia With Love*. Diakses dari <http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2013/11/20/Arms-to-Egypt-from-Russia-with-love.html> pada tanggal 28 Mei 2015.
- Lamothe, Dan. 13 April 2015. *Examining The Power Russia's S-300 Missile System Will Give Iran*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/04/13/examining-the-power-russias-s-300-missile-system-will-give-iran/> pada tanggal 29 Mei 2015.
- Nuclear Threat Initiatives. April 2015. *Russia Nuclear*. Diakses dari www.nti.org/country-profiles/russia/nuclear/ pada tanggal 1 Juni 2015.
- Oboronprom. *Mass Production*. 2015. Diakses dari www.oboronprom.ru/en/catalog/helicopters pada tanggal 2 Juni 2015.

- Ozdemir, Volkan. 2014. *Moscow Gets Ready to Woo Ankara with Gas*. Diakses dari <http://www.russia-direct.org/opinion/moscow-gets-ready-woo-ankara-gas> pada tanggal 29 Mei 2015.
- Power of Data Visualization. 2011. *The Russian Navy*. Diakses dari <http://www.pdviz.com/tag/sea> pada tanggal 26 Maret 2015.
- President of Russia Official Site . 28 November 2013. *Meeting on developing the Air Force*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/36 pada tanggal 3 Juli 2015.
- President of Russia Official Site. 2013. *Interview to Al-Ahram Daily*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/47643 pada tanggal 30 Juni 2015.
- President of Russia Official Site. 24 November 2013. *Statement by Vladimir Putin Following the Conclusion of Talks on the Iranian Nuclear Programme*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/19685 pada tanggal 3 Juli 2015.
- President of Russia Official Site. 29 Juni 2015. *Meeting with Syrian Foreign Minister Walid al-Moualem*. Diakses dari en.kremlin.ru/events/president/transcripts/49781 pada tanggal 3 Juli 2015.
- President of Russia Official Site. 29 November 2013. *Meeting with Defence Ministry Officials*
- President of Russia Official Website. 2015. *Press Statement and Replies to Journalists' Questions Following Russian-Cypriot Talks*. Diakses dari <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/47739> pada tanggal 25 Februari 2015.
- Rosoboronexport. 2010. *Status*.diakses dari http://www.roe.ru/roe/eng_status.html pada tanggal 1 Juni 2015.
- RT. 17 Mei 2013. *Russian Warships Enter Mediterranean to Form Permanent Task Force*. Diakses dari <http://rt.com/news/russian-pacific-fleet-mediterranean-374/> pada tanggal 1 Juni 2015.
- RT. 31 Juli 2013. *Bid for Naval Dominance: Russia Significantly Boosts Nuclear Fleet*. Diakses dari <http://rt.com/news/russia-navy-nuclear-submarine-fleet-450/> pada tanggal 1 Juni 2015.
- RusNavy. 17 Februari 2012. *Structure of the Navy*. Diakses dari <http://rusnavy.com/nowadays/structure/> pada tanggal 2 Maret 2015.
- RusNavy. 25 September 2010. *Black Sea Fleet to Get 18 New Warships and Renew Naval Aviation Till 2020*. Diakses dari

- http://rusnavy.com/news/newsofday/index.php?ELEMENT_ID=10601
pada tanggal 26 Maret 2015.
- RussianShips.info. 4 Maret 2015. *List of Current Ships of the Russian Navy 2015*. Diakses dari <http://russian-ships.info/eng/today/> pada tanggal 26 Maret 2015.
- Saul, Jonathan. 17 Januari 2014. *Exclusive: Russia Steps Up Military Lifeline to Syria's Assad – Sources*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2014/01/17/us-syria-russia-arms-idUSBREA0G0MN20140117> pada tanggal 17 April 2015.
- Saunders, Paul J. 25 Maret 2015. *Algeria Buys Russian Arms but Keeps Moscow at Arm's Length*. Diakses dari www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/03/russia-algeria-weapons-gas-bouteflika-putin.html pada tanggal 2 Juni 2015.
- Sievers, Marc J. 12 Januari 2015. *Questions About Egypt's Syria Policy*. Diakses dari <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/questions-about-egypts-syria-policy> pada tanggal 29 Mei 2015.
- Standish, Reid. 2015 *Putin's Kalashnikov Diplomacy Gets a Win in Egypt* diakses dari <http://foreignpolicy.com/2015/02/10/putins-kalashnikov-diplomacy-gets-a-win-in-egypt-sisi-moscow-eurasian-union/> pada tanggal 13 Februari 2015.
- The International Institute for Strategic Studies. 11 Februari 2015. *Military Balance 2015 Press Statement*. Diakses dari <https://www.iiss.org/-/media/Images/Publications/The%20Military%20Balance/MilBal%202015/MB2015%20Defence%20budgets%20and%20expenditure.jpg> pada tanggal 1 Juni 2015.
- The International Institute for Strategic Studies. 7 Maret 2012. *Military Balance 2012 Press Statement*. Diakses dari <https://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2012-ebel/march-1290/military-balance-2012-press-statement-b956> pada tanggal 26 Maret 2015.
- The Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, Official Website. 2013. *Concept of the Foreign Policy of Russian Federation..* Diakses dari <http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument> pada tanggal 21 April 2014.
- The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2015. *Brief History*. Diakses dari http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm pada tanggal 12 Februari 2015.

- The University of Texas at Austin. 2015. *Middle East Maps*. Diakses dari http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html pada tanggal 12 Februari 2015.
- Tovrov, Daniel. 30 Mei 2012. *Russia Arms Deal with Syria: A Timeline*. Diakses dari www.ibtimes.com/russias-arms-deals-syria-timeline-705522 pada tanggal 2 Juni 2015.
- U.S. Energy Information Administration (EIA). 2013. *Oil and Natural Gas Sales Accounted for 68% of Russia's Total Export Revenues in 2013*. Diakses dari www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231 pada tanggal 1 Juni 2015.
- U.S. Energy Information Administration (EIA). 2014. *World Oil Transit Chokepoints*. Diakses dari http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf pada tanggal 16 April 2015.
- United Aircraft Corporation. 2015. *Aircraft Lineup*. Diakses dari www.uacrussia.ru/en/aircraft/lineup pada tanggal 2 Juni 2015.
- United Engine Corporation. 2015. *About The Company*. Diakses dari www.uk-odk.ru/eng/corporation/about/ pada tanggal 2 Juni 2015.
- United Shipbuilding Corporation. 2014. *FESRC Goals*. Diakses dari <http://dcss.ru/en/company/fesrc-goals.html> pada tanggal 2 Juni 2015.
- Uralvagonzavod. 2015. *About Corporation*. Diakses dari <http://uralvagonzavod.com/corporation/about/> pada tanggal 2 Juni 2015.
- Washington Post. 24 Februari 2013. *U.S. Strength in the Persian Gulf*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/military/usstrength.htm> pada tanggal 26 Maret 2015.
- Williamson, Rachel. 18 Maret 2015. *A Russian Role in Egypt's \$12 Billion BP Deal*. Diakses dari <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/a-russian-role-in-egypt-s-12-billion-bp-deal> pada tanggal 1 Juni 2015.
- World Energy Council. 2015. *Gas in Egypt*. Diakses dari <https://www.worldenergy.org/data/resources/country/egypt/gas/> pada tanggal 1 Juni 2015.
- World Nuclear News. 11 November 2014. *Russia to Build Eight More Reactors in Iran*. Diakses dari <http://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia-to-build-eight-more-reactors-in-Iran-11111401.html> pada tanggal 29 Mei 2015.

Lampiran 1: Konsep Politik Luar Negeri Federasi Rusia 2013¹³¹

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Официальный сайт

Unofficial translation

Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation

*Approved by President of the Russian Federation V. Putin
on 12 February 2013*

I. General Provisions

1. The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation (hereinafter 'the Concept') is a systemic description of basic principles, priorities, goals and objectives of the foreign policy of the Russian Federation.
2. The Concept is based on the Constitution of the Russian Federation, federal laws, the universally recognized principles and rules of international law, international treaties to which the Russian Federation is a party, the Decree by the President of the Russian Federation on measures to implement the foreign policy of the Russian Federation (No. 605 of 7 May 2012), as well as the National Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2020, the Military Doctrine of the Russian Federation, statutory acts of the Russian Federation regulating activities of federal authorities in the area of foreign policy, and other similar instruments.
3. Rapid acceleration of global processes in the first decade of the 21st century and growing new trends in global development require new approaches to key aspects of the rapidly changing situation in the world and a new vision of priorities in Russia's foreign policy, taking into account Russia's increased responsibility for setting the international agenda and shaping the system of international relations.
4. In accordance with the top priority objective of the national security policy, which is ensuring the protection of an individual, society and the state, the foreign policy should be focused primarily on pursuing the following basic goals:
 - a) ensuring the security of the country, protecting and strengthening its sovereignty and territorial integrity, and securing its high standing in the international community as one of the influential and competitive poles of the modern world;
 - b) creating favorable external conditions for a steady and dynamic growth of the Russian economy and its technological modernization with a view to putting it on the innovation-based development tracks, as well as for improving the quality of life, strengthening the rule of law and democratic institutions, and ensuring human rights and freedoms;
 - c) active promoting of international peace and universal security and stability for the purpose of establishing a just and democratic system of international relations based on collective decision-making in addressing global issues, on the primacy of international law, including, first of all, the UN Charter, as well as on equal,

¹³¹ Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2014. *Concept of the Foreign Policy of Russian Federation*. Diakses dari <http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument> pada tanggal 21 April 2014.

partnership relations among nations with the central coordinating role of the UN as the principal organization regulating international relations;

d) promoting good-neighborly relations with adjoining states and helping to overcome existing and prevent potential tensions and conflicts in regions adjacent to the Russian Federation;

e) developing mutually beneficial and equal bilateral and multilateral partnership relations with foreign states, interstate associations, international organizations and forums on the basis of respect for independence and sovereignty, pragmatism, transparency, multi-vector approach, predictability and non-confrontational protection of national interests; promoting broad international cooperation based on the principle of non-discrimination and facilitating the formation of flexible non-bloc network alliances with Russia's active involvement;

f) strengthening Russia's positions in the global trade and economic system, providing diplomatic support to national economic operators abroad, preventing discrimination against Russian goods, services or investments; making use of the potential of international and regional economic and financial institutions to that end;

g) ensuring comprehensive protection of rights and legitimate interests of Russian citizens and compatriots residing abroad, and promoting, in various international formats, Russia's approach to human rights issues;

h) promoting the Russian language and strengthening its positions in the world, disseminating information on the achievements of the peoples of Russia and consolidating the Russian diaspora abroad;

i) facilitating the development of a constructive dialogue and partnership relations between civilizations in the interests of enhancing accord among various cultures and confessions and ensuring their mutual enrichment.

II. Foreign Policy of the Russian Federation and the Modern World

5. The current stage of the world development is characterized by profound changes in the geopolitical landscape largely provoked or accelerated by the global financial and economic crisis. International relations are in the process of transition, the essence of which is the creation of a polycentric system of international relations. That process is not an easy one. It is accompanied by increased economic and political turbulence at the global and regional levels. International relations become increasingly complex and unpredictable.

6. The ability of the West to dominate world economy and politics continues to diminish. The global power and development potential is now more dispersed and is shifting to the East, primarily to the Asia-Pacific region. The emergence of new global economic and political actors with Western countries trying to preserve their traditional positions enhances global competition, which is manifested in growing instability in international relations.

7. With the reduced risk of a large-scale war, including a nuclear one, the balance of military power between states and groups of states is changing. Efforts to build up or modernize offensive potentials, to create and deploy new types of weapons erode the global security architecture based on international treaties and agreements in the area of arms control.

8. Global turbulences and growing interdependence of states and peoples frustrate the attempts to build individual "oases of peace and security"; the only reliable insurance against possible shocks is compliance with universal principles of equal and indivisible security in respect of the Euro-Atlantic, Eurasian and Asia-Pacific regions.

9. Today, traditional military and political alliances cannot protect against all the existing transborder challenges and threats. The bloc-based approach to addressing

international issues is being gradually replaced by network diplomacy based on flexible participation in multilateral mechanisms aimed at finding effective solutions to common challenges.

10. Economic, legal, scientific, environmental, demographic and IT factors become as important for states in influencing the world politics as the military power. Of increased relevance are issues related to sustainable development, spiritual and intellectual education of population, improving its well-being and promoting investment in human capital. A key factor of international stability is economic interdependence of states.

11. Financial and economic challenges become increasingly evident as negative trends build up in the world economy. Unsolved structural problems and lingering economic depression in the leading countries of the West affect global development in a negative way. Incomplete recovery amidst the European debt crisis and ongoing recession trends in the euro area pose serious risks for the future. International efforts to create a new, more balanced world trade and monetary system meeting the needs of the globalized world gain special significance.

12. Increased competition for strategic resources causes extreme volatility at the commodity market. Fundamental changes are taking place in the energy sector, which is related, *inter alia*, to the use of innovative technologies to develop hard-to-recover hydrocarbon reserves. At a time when it becomes increasingly important for the states to diversify their presence in the world markets in order to guarantee their economic security, we are witnessing imposition of various unjustified restrictions and other discriminatory measures.

13. For the first time in modern history, global competition takes place on a civilizational level, whereby various values and models of development based on the universal principles of democracy and market economy start to clash and compete against each other. Cultural and civilizational diversity of the world becomes more and more manifest.

14. The reverse side of the globalization processes is the increased emphasis on civilizational identity. Desire to go back to one's civilizational roots can be clearly seen in recent events in the Middle East and North Africa where political and socioeconomic renewal of society has been frequently carried out under the banner of asserting Islamic values. Similar processes can be observed in other regions as well, which makes it a priority for world politics to prevent civilizational fault line clashes and to intensify efforts to forge partnership of cultures, religions and civilizations in order to ensure a harmonious development of mankind. In these circumstances imposing one's own hierarchy of values can only provoke a rise in xenophobia, intolerance and tensions in international relations leading eventually to chaos in world affairs. Another factor which negatively affects global stability is the emerging trend towards international relations dominated, as in the past, by ideological factors.

15. Another risk to world peace and stability is presented by attempts to manage crises through unilateral sanctions and other coercive measures, including armed aggression, outside the framework of the UN Security Council. There are instances of blatant neglect of fundamental principles of international law, such as the non-use of force, and of the prerogatives of the UN Security Council when arbitrary interpretation of its resolutions is allowed. Some concepts that are being implemented are aimed at overthrowing legitimate authorities in sovereign states under the pretext of protecting civilian population. The use of coercive measures and military force bypassing the UN Charter and the UN Security Council is unable to eliminate profound socioeconomic, ethnic and other antagonisms that cause conflicts. Such measures only lead to the expansion of the conflict area, provoke

tensions and arms race, aggravates interstate controversies and incite ethnic and religious strife.

16. New transborder threats and challenges increasingly dominate the international agenda rising in proportions and becoming more diversified in form and geography. They include, in the first place, the risk of proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, international terrorism, uncontrolled traffic in arms and combatants, radicalization of public sentiment giving rise to religious extremism and ethnic and interconfessional tensions, illegal migration, maritime piracy, drug trafficking, corruption, regional and internal conflicts, scarcity of essential resources, demographic problems, global poverty, environmental, sanitary and epidemiological challenges, climate change and threats to information and food security.

17. Globalization processes have also transformed international organized crime which acquired a new, macroeconomic dimension leading to the emergence of new criminal "power poles" that accumulate considerable resources and progressively expand their influence, including by infiltrating government agencies of various countries and financial and economic institutions, as well as by establishing ties with terrorist and extremist organizations.

18. Global challenges and threats require an adequate response and joint efforts of the international community based on the central coordinating role of the UN and given the clear correlation of the issues of security, sustainable development and human rights.

19. With tendency for decentralization of the global system of governance, regional governance emerges as a basis for the polycentric model of the world (with the UN being another foundation), reflecting the world's diversity and variety. New centers of economic growth and political power increasingly take responsibility for their respective regions. Regional integration becomes an effective means to increase competitiveness of the participating states. Networks and associations, trade pacts and other economic agreements, as well as regional reserve currencies serve as instruments to enhance security and financial and economic stability.

20. "Soft power", a comprehensive toolkit for achieving foreign policy objectives building on civil society potential, information, cultural and other methods and technologies alternative to traditional diplomacy, is becoming an indispensable component of modern international relations. At the same time, increasing global competition and the growing crisis potential sometimes creates a risk of destructive and unlawful use of "soft power" and human rights concepts to exert political pressure on sovereign states, interfere in their internal affairs, destabilize their political situation, manipulate public opinion, including under the pretext of financing cultural and human rights projects abroad.

21. A true consolidation of efforts of the international community requires a set of common values as a foundation for joint action, a common moral denominator, which major world religions have always shared, including such principles and concepts as pursuit of peace and justice, dignity, freedom and responsibility, honesty, compassion, and work ethic.

22. Foreign policy is one of the most important tools to ensure the steady development of a country and guarantee its competitiveness in the globalizing world.

23. Being a permanent member of the UN Security Council and a participant in a whole range of influential international organizations, regional structures, and mechanisms for inter-state dialogue and cooperation, having considerable resources in every area, actively developing relations with leading states and alliances throughout the world in line with its multi-vector policy, and consistently integrating into the global economic and political system as a responsible and constructive member of the international community, the Russian Federation contributes to the

development of a positive, well-balanced and unifying international agenda and to the settlement of global and regional problems.

24. Fundamental and rapid changes not only create serious risks but also provide the Russian Federation with new opportunities. Russia pursues an independent foreign policy guided by its national interests and based on unconditional respect for international law.

25. Russia's foreign policy is transparent, predictable and pragmatic. It is consistent and continuous and reflects the unique role our country has been playing over centuries as a counterbalance in international affairs and the development of global civilization.

26. Russia is fully aware of its special responsibility for maintaining security in the world both on the global and regional levels and is determined to act jointly with all the interested states to address common challenges. Russia will work to anticipate and forestall events and remain prepared for any scenario in global affairs.

III. Priorities of the Russian Federation for Addressing Global Problems

27. Diverse and complex nature of international problems and crisis situations call for timely prioritization of each of them in the Russian Federation's foreign policy. The use of political and diplomatic, legal, military, economic, financial and other tools in resolving foreign policy issues should correspond to their actual significance for Russia's foreign policy interests; moreover, these tools should be applied with due coordination among all branches of power as well as appropriate agencies.

Emergence of a New World Order

28. Russia follows a policy aimed at creating a stable and sustainable system of international relations based on international law and principles of equality, mutual respect and non-interference in internal affairs of states. The system aims to provide reliable and equal security for each member of the international community in the political, military, economic, informational, humanitarian and other areas.

29. The United Nations should remain the center for regulation of international relations and coordination in world politics in the 21st century, as it has proven to have no alternative and also possesses unique legitimacy. Russia supports the efforts aimed at strengthening the UN's central and coordinating role. This implies:

a) ensuring the inviolability of key provisions and principles of the UN Charter, building the UN capacity in every possible way to allow for a reasonable streamlining of the UN with new world realities while preserving its inter-state nature;

b) further improving the effectiveness of the UN Security Council, which bears the primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and making this body more representative as part of reasonable reforms in the UN while ensuring due efficiency of its processes. Any decisions on the expansion of the Security Council should be based on a general consensus of the UN Member States. The status of the five permanent members of the Security Council should be preserved.

30. Russia attaches great importance to ensuring sustainable manageability of global development, which requires collective leadership by the major states of the world, which, in turn, should be representative in geographical and civilizational terms and fully respect the central and coordinating role of the UN. To these ends, Russia will increase its participation in such formats as the Group of Twenty, BRICS (Brazil, Russia, India, China and the Republic of South Africa), the Group of Eight, the Shanghai Cooperation Organization, the RIC (Russia, India and China) alongside other organizations and platforms for dialogue.

Rule of Law in International Relations

31. Russia consistently advocates the strengthening of the legal basis of international relations and complies with its international legal obligations in good faith. The maintenance and strengthening of the international rule of law is among its priorities in the international arena. The rule of law is intended to ensure peaceful and fruitful cooperation among states while preserving the balance of their often conflicting interests as well as safeguarding the stability of the global community in general. Russia intends to:

- a) support collective efforts to strengthen the legal basis of inter-state relations;
- b) counter the attempts of certain countries or groups of countries to revise the universally recognized norms of international law established in universal documents such as the UN Charter, the 1970 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the UN Charter, as well as in the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (Helsinki, 1 August 1975). Arbitrary and politically motivated interpretation of fundamental international legal norms and principles such as non-use of force or threat of force, peaceful settlement of international disputes, respect for sovereignty and territorial integrity of states, right of peoples to self-determination, in favor of certain countries pose particular danger to international peace, law and order. Likewise, attempts to represent violations of international law as its "creative" application are dangerous. It is unacceptable that military interventions and other forms of interference from without which undermine the foundations of international law based on the principle of sovereign equality of states, be carried out on the pretext of implementing the concept of "responsibility to protect";
- c) contribute to the codification and progressive development of international law, first of all under the auspices of the UN, help ensure the inclusiveness of the international UN treaties and their uniform interpretation and application;
- d) pursue efforts to improve the UN sanction mechanisms, work to ensure that decisions to impose sanctions be taken jointly by the UN Security Council following comprehensive discussions, first of all taking into consideration their effectiveness in achieving the tasks of maintaining international peace and security and ensuring the non-deterioration of the humanitarian situation;
- e) work to finalize the international legalization of the state border of the Russian Federation as well as boundaries of the maritime zone over which it exercises its sovereign rights and jurisdiction while ensuring the unconditional observance of Russian national interests, primarily those related to security and economy, with a view to build up trust and cooperation with adjoining states.

Strengthening International Security

32. Russia consistently advocates reducing the role of the use of force in international relations while enhancing strategic and regional stability. To these ends, the Russian Federation:

- a) fulfills in good faith its international obligations under international treaties on arms control and takes confidence-building measures in the military sphere encouraging its partners to do the same; participates in elaborating and concluding new agreements in these areas that meet its national interests and take into account each and every factor influencing strategic stability, building on the principles of equality and indivisibility of security;
- b) attaches primary importance to the implementation of the Treaty between the Russian Federation and the United States of America on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms;

- c) reaffirms its unwavering policy towards developing multilateral political and legal frameworks for a universal and stable regime of non-proliferation of nuclear weapons, other weapons of mass destruction and means of their delivery; stands for compliance with the Non-Proliferation Treaty, the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, as well as the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction; actively participates in multilateral export control regimes as well as in international efforts to control trafficking in dual-use materials and technologies; encourages an early entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; comes out in favor of establishing a global missile non-proliferation regime on the basis of a legally binding agreement, and universalizing obligations under the Treaty between the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles;
- d) supports the process aimed at *establishing zones free of nuclear and other weapons of mass destruction*;
- e) comes out in favor of strengthening nuclear safety and security worldwide, in particular supports strengthening international legal mechanism in the fields of nuclear safety and prevention of nuclear terrorist attacks;
- f) comes out in favor of the prevention of deployment of weapons in outer space and the conclusion of a relevant international treaty, the elaboration of transparency and confidence-building measures in outer space activities, the establishment of a system of collective response to potential missile challenges on an equal basis, and stands against unilateral arbitrary actions aimed at building up an anti-missile defense system by a state or a group of states that undermine strategic stability and international security;
- g) in the interests of addressing the issues of strategic stability, stands for the development of bilateral and multilateral cooperation among states, first of all those in possession of nuclear weapons, for the purpose of ensuring common security in the spirit of strategic openness, including in providing access to the benefits of the peaceful use of nuclear energy for all interested states;
- h) will take necessary measures to ensure national and international information security, prevent political, economic and social threats to the state's security that emerge in information space in order to combat terrorism and other criminal threats in the area of application of information and communication technologies, prevent them from being used for military and political purposes that run counter to international law, including actions aimed at interference in the internal affairs and constituting a threat to international peace, security and stability;
- i) will work, under the UN auspices, to develop an *international code of conduct for information security*;
- j) *supports international efforts to combat illicit trade in small arms and light weapons*;
- k) will work, in the context of efforts to strengthen regional stability in Europe, to ensure bringing the conventional arms control regime in Europe into line with the current reality, as well as strict compliance by all parties with the agreed confidence and security building measures;
- l) intends to participate in international peacemaking activities under the UN auspices and within the framework of collaboration with regional and international organizations, regarding international peacemaking as an effective instrument for settling armed conflicts and fulfilling post-crisis nation-building tasks; will actively contribute to improving the United Nations preventive anti-crisis capacities;
- m) strongly supports elaboration of precise peacekeeping mandates allowing for no arbitrary interpretation, particularly those implying the use of force, and the establishment of strict control over their implementation in the course of preparation

of UN Security Council decisions on international security, including the launch of new peacekeeping operations or the extension of current ones;

n) regards Article 51 of the UN Charter as an adequate legal basis not liable to revision for the use of force in self-defense, including in the face of existing threats to peace and security such as international terrorism and proliferation of weapons of mass destruction;

o) views combating international terrorism as a crucial domestic and foreign policy task, calls for systemic and comprehensive use of political and legal, awareness-raising, social and economic and special measures focusing on the preventive aspect of such counteraction on the basis of global and regional anti-terrorism conventions;

p) in accordance with international law and its domestic legislation, takes all necessary measures to repel and prevent terrorist attacks against Russia and its citizens, to protect them against terrorist acts, to prohibit activities within its territory aimed at committing such acts against citizens or interests of other countries, to deny safe haven or floor to terrorists and instigators of terrorism, to prevent and suppress the financing of terrorism;

q) will seek political and diplomatic solutions to regional conflicts through collective actions of the international community in strong belief that modern conflicts cannot be resolved through the use of force and their settlement should be sought through inclusive dialogue and negotiations of all parties rather than through isolation of some of them;

r) persistently counters drug trafficking and organized crime, cooperating with other states both multilaterally, first of all within the framework of specialized international bodies, and bilaterally, including for the purpose of maintaining and strengthening the international drug control system;

s) supports the establishment of efficient institutions under the auspices of the United Nations and other international and regional organizations to ensure cooperation in the area of responding to natural disasters and large-scale man-made disasters, as well as to other emergencies, including capacity building for disaster response and enhancement of early warning and forecast systems; with its unique expertise, technical and human resources, it constitutes an important and effective component of global and trans-European disaster risk management systems;

t) participates in international cooperation aimed at regulating migration processes and ensuring rights of migrant workers;

u) as a multinational and multiconfessional state with experience of harmonious coexistence of different nations, ethnic and religious groups, gained over centuries, facilitates dialogue and partnership between cultures, religions and civilizations, including within the UN system and other international and regional organizations; supports relevant initiatives of civil society and actively interacts with the Russian Orthodox Church and other main confessions of the country, counters extremism, radicalization, intolerance, discrimination and division for ethnic, confessional, linguistic, cultural and other reasons.

International Cooperation in the Sphere of Economy and Environment

33. Due to high rates of its economic growth based on steady external and growing internal demand, unique natural and accumulated financial resources, and responsible social and economic policy, Russia makes a considerable contribution to ensuring stability of the global economy and finances and participates in international efforts to prevent and address crisis developments. Russia intends to actively facilitate the creation of an equitable and democratic global trade, economic, monetary and financial architecture, definition of international development targets assuming that common modernization challenges provide new opportunities for strengthening international economic cooperation.

34. Russia's principal objectives in the area of international economic relations which are consistent with priorities of the innovation-based development of the country include ensuring its equal standing in the modern system of international economic relations, minimizing risks associated with its integration into the global economy, including those related to its membership in the World Trade Organization (WTO) and joining the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). To achieve these objectives, the Russian Federation:

a) takes trade policy measures to protect its interests in accordance with international rules while counteracting trade policy measures by other states infringing upon the rights of the Russian Federation and Russian enterprises;

b) works to ensure an adequate accommodation of Russian interests and approaches in building collective stands in the framework of major international forums on pressing issues related to the global development and functioning of the global economy, including determination of the global agenda in the areas of energy and food security, improvement of the trade and transport cooperation regime;

c) works to create favorable political environment to diversify Russia's presence in global markets through the broadening of its exports nomenclature and of the geography of its foreign economic and investment relations;

d) provides state support to Russian enterprises and companies in getting access to new markets and in development of traditional ones while counteracting discrimination against Russian investors and exporters;

e) facilitates the modernization and diversification of the Russian economy, as well as increasing the share of knowledge-intensive, innovative and other priority sectors in the structure of economy through the attraction to the country of advanced foreign scientific knowledge and economic and business expertise and technologies, as well as foreign investments;

f) strengthens its strategic partnership with major producers of energy resources while actively promoting dialogue with consumers and transit countries, based on the assumption that measures to ensure the security of energy supplies should be consistently complemented with reciprocal measures to ensure stable energy demand and reliable transit;

g) takes measures to secure the status of the Russian Federation as a key transit country in the context of trade and economic relations between Europe and the Asia-Pacific region, including through an increased participation in transcontinental transport corridors that are currently in the process of formation;

h) actively uses the capabilities of regional economic and financial organizations to pursue Russia's interests in the respective regions, with special emphasis on activities of organizations and entities promoting integration processes in the Commonwealth of Independent States.

35. The Russian Federation is in favor of widening international cooperation with a view to ensuring environmental security and addressing climate change on the planet, including through the use of advanced energy- and resource-saving technologies in the interests of the entire global community. Russia's priorities in this area include further development of scientifically sound approaches to the preservation of the natural environment and further strengthening of cooperation with all states on environment protection issues to provide for sustainable development in the interests of the current and future generations.

36. Russia views sustainable social and economic development of all countries as an indispensable element of the modern system of collective security, and believes that measures to facilitate international development should be aimed at finding effective ways to support efforts to eliminate imbalances in the development of various regions. To that end, Russia is using its donor potential to pursue active and targeted

policies in the area of international development both at the multilateral and bilateral levels.

37. Russia supports international cooperation in the area of health protection with the leading role of the World Health Organization as one of the priorities of the global agenda and an integral part of efforts to ensure sustainable development.

38. Another priority is an effective use of sea and ocean spaces in view of their growing importance in terms of ensuring both economic development and security. The Russian Federation will work to promote relevant regimes in the areas of safe navigation, including maritime piracy control, responsible fisheries and ocean-related scientific research, in combination with measures to protect maritime environment and combat international terrorism. It is going to establish, in accordance with international law, outer limits of its continental shelf to provide additional opportunities for the exploration and development of its mineral resources.

International Humanitarian Cooperation and Human Rights

39. As a country committed to universal democratic values, including human rights and freedoms, Russia views its objectives as:

a) working to ensure respect for human rights and freedoms in the world through an equal and constructive international dialogue with due regard for ethnic, cultural and historical characteristics of each state; monitor the human rights situation in the world; facilitating involvement of Russian civil society institutions, such as the Civic Chamber of the Russian Federation and non-governmental organizations involved in the field of foreign policy, encouraging their active participation in the relevant global forums and international humanitarian cooperation;

b) facilitating humanization of social systems worldwide with a view to ensuring human rights and fundamental freedoms in political, economic, social and cultural areas;

c) providing for the further integrated development of the system of diplomatic and consular protection of Russian nationals abroad subject to international law and international treaties concluded by the Russian Federation with a view to enhancing its effectiveness, including through the expansion of the network of Russian consular offices abroad;

d) protecting rights and legitimate interests of compatriots living abroad on the basis of international law and treaties concluded by the Russian Federation while considering the numerous Russian diaspora as a partner, including in expanding and strengthening the space of the Russian language and culture;

e) supporting consolidation of organizations of compatriots to enable them to effectively uphold their rights in the countries of residence while preserving the cultural and ethnic identity of the Russian diaspora and its ties with the historical homeland, and provide conditions for facilitating voluntary relocation to the Russian Federation of compatriots willing to do so;

f) facilitating the learning and wider use of the Russian language as an integral part of the world culture and an instrument of international and interethnic communication;

g) promoting interstate cultural and humanitarian relations between Slavic peoples;

h) strongly counteracting manifestations of extremism, neo-Nazism, any forms of racial discrimination, aggressive nationalism, anti-Semitism and xenophobia, as well as attempts to rewrite history using it to build confrontation and provoke revanchism in global politics and to revise the outcomes of World War II; contributing to the depoliticization of historical discussions to ensure their exclusively academic character;

i) facilitating the involvement of civil society institutions in addressing international issues in order to enhance the effectiveness of the Russian foreign policy;

- j) contributing, including through the use of public diplomacy, the potential of civil society institutions, to the development of international cultural and humanitarian cooperation as a means to promote dialogue among civilizations, build consensus and ensure understanding among peoples placing a particular emphasis on inter-religious dialogue;
- k) building up interaction with international and non-governmental human rights organizations in order to strengthen universal norms on human rights protection free of double standards, to balance them with the responsibility of persons for their actions, first of all in terms of preventing contempt for the feelings of believers, promoting tolerance and strengthening moral foundations of the human rights dialogue;
- l) expanding participation of the Russian Federation in international human rights agreements;
- m) extending the legal framework of international cooperation in order to improve the level of protection of rights and legitimate interests of Russian children living abroad;
- n) working to establish Russia's positive image worthy of the high status of its culture, education, science, sports achievements, the level of civil society development, as well as participation in programs of assistance to developing countries; molding tools to better its perception throughout the world; improving the application of "soft power" and identifying the best forms of activities in this area that would take into account both international experience and national peculiarities and build on mechanisms of interaction with civil society and experts; further developing the regulatory framework in the above-mentioned area.

Information Support for Foreign Policy Activities

40. An important element of the foreign policy activities of the Russian Federation is providing the broad world public with full and accurate information about its stand on major international issues, foreign policy initiatives and actions of the Russian Federation, its domestic social and economic development processes and plans, as well as on the achievements of Russian culture and science.

41. In its public diplomacy, Russia will seek to ensure its objective perception in the world, develop its own effective means of information influence on public opinion abroad, strengthen the role of Russian mass media in the international information environment providing them with essential state support, as well as actively participate in international information cooperation, and take necessary measures to counteract information threats to its sovereignty and security. Possibilities offered by new information and communications technologies will be widely used in these activities. Russia will seek to develop a set of legal and ethical norms for the safe use of such technologies.

IV. Regional Priorities

42. Priority areas of Russian foreign policy include the development of bilateral and multilateral cooperation with the CIS Member States, further strengthening of the CIS as a basis for enhancing regional interaction among its participants who not only share common historical background but also have great capacity for integration in various spheres.

43. Russia forges friendly relations with each of the CIS Member States on the basis of equality, mutual benefit, respect for and consideration of each other's interests, seeking to spur up integration processes in the CIS space. Relations of strategic partnership and alliance are developed with those states that show willingness to engage in them.

44. Russia sees as a priority the task of establishing the Eurasian Economic Union aiming not only to make the best use of mutually beneficial economic ties in the CIS space but also to become a model of association open to other states, a model that would determine the future of the Commonwealth states. The new union that is being formed on the basis of universal integration principles is designed to serve as an effective link between Europe and the Asia-Pacific region.

45. Russia intends to actively contribute to the development of interaction among CIS Member States in the humanitarian sphere on the ground of preserving and increasing common cultural and civilizational heritage which is an essential resource for the CIS as a whole and for each of the Commonwealth's Member States in the context of globalization. Particular attention will be paid to providing support to compatriots living in the CIS Member States, as well as to negotiating agreements on the protection of their educational, linguistic, social, labor, humanitarian and other rights and freedoms.

46. Russia will build up cooperation with the CIS Member States in ensuring mutual security, including joint efforts to combat common challenges and threats, primarily international terrorism, extremism, drug trafficking, transnational crime, and illegal migration. Priorities here are the neutralization of the above-mentioned threats coming from the territory of Afghanistan and the prevention of destabilization of the situation in Central Asia and Transcaucasia.

47. Russia regards the Collective Security Treaty Organization (CSTO) as one of the key elements of the modern security system in the post-Soviet space. The task of transforming the CSTO into a universal international organization capable of counteracting current challenges and threats under the growing pressure of diverse global and regional factors in the area of its responsibility and the adjoining regions remains relevant.

48. To these ends, Russia will:

a) work to further fulfill the potential of the CIS and to strengthen it as an influential regional organization, a forum for multilateral political dialogue and a mechanism of diversified cooperation in economy, humanitarian interaction, combating traditional and new challenges and threats;

b) contribute to the implementation of the Free Trade Zone Treaty designed to substantially update the existing legal and regulatory framework of trade and economic cooperation among the CIS Member States;

c) increase interaction with Belarus within the Union State to extend integration processes in all areas;

d) actively support the Eurasian economic integration process, working together with Belarus and Kazakhstan towards the transformation of the Eurasian Economic Community (EurAsEC) and the establishment of the Eurasian Economic Union, contribute to engagement of other EurAsEC Member States in this process, take steps to further develop and improve mechanisms and the legal and regulatory framework of the Customs Union and the Common Economic Space, help strengthen the Eurasian Economic Commission as a common standing regulatory body of the Customs Union and the Common Economic Space;

e) build up relations with Ukraine as a priority partner within the CIS, contribute to its participation in extended integration processes;

f) contribute to the development of the CSTO as a key instrument to maintain stability and ensure security in the Organization's area of responsibility, focusing on enhancing its prompt response mechanisms, its peacekeeping potential, as well as improving foreign policy coordination among the CSTO Member States.

49. Russia will maintain its active role in the political and diplomatic conflict settlement in the CIS space; it will participate, in particular, in the settlement of the Transdniestria problem on the basis of respect for the sovereignty, territorial integrity

and neutral status of the Republic of Moldova while providing a special status for Transdniestria, contribute to the settlement of the Nagorny Karabakh conflict in collaboration with other OSCE Minsk Group Co-Chairs, building on the principles contained in the joint statements made by the Presidents of Russia, the USA, and France in 2009-2011.

50. While respecting its Commonwealth partners' right to build relations with other international actors, Russia stands for the full implementation by the CIS Member States of their commitments within regional integration structures with Russian participation, ensuring further development of integration processes and mutually beneficial cooperation in the CIS space.

51. Assistance to the formation of the Republic of Abkhazia and the Republic of South Ossetia as modern democratic states, strengthening of their international positions, ensuring sustainable security and their social and economic recovery remains among Russia's priorities.

52. Russia is interested in the normalization of relations with Georgia in the areas in which the Georgian side shows its willingness, while taking into account the existing political environment in Transcaucasia.

53. Russia's approach to comprehensive interaction with its partners in the Black Sea and Caspian Sea regions is based on goals and principles of the Charter of the Black Sea Economic Cooperation Organization and takes into account the need to strengthen the mechanism of cooperation among five Caspian states on the basis of collectively taken decisions.

54. Priority is given to relations with the Euro-Atlantic states which, besides geography, economy and history, have common deep-rooted civilizational ties with Russia. In light of the increased importance of combining efforts of all the states in the face of transborder challenges and threats, Russia stands for building up a truly unified region without dividing lines through developing genuine partnership relations between Russia, the European Union and the United States.

55. The Euro-Atlantic dimension of the Russian foreign policy is aimed at creating a common space of peace, security and stability based on the principles of indivisible security, equal cooperation and mutual trust. Russia stands consistently for converting political declarations regarding indivisibility of security into legally binding obligations, irrespective of states' affiliation with political and military alliances.

56. In its relations with the European Union, the main task for Russia as an integral and inseparable part of European civilization is to promote creating a common economic and humanitarian space from the Atlantic to the Pacific.

57. Russia is interested in enhancing cooperation with the European Union as its principal trade and economic counterpart and important foreign policy partner, looks forward to strengthening mutual interaction, emphasizes the importance of establishment of four common spaces in the areas of economy; freedom, security and justice; external security; and scientific research and education, including cultural aspects. Russia stands for signing a new Russia-EU framework agreement on strategic partnership based on the principles of equality and mutual benefit. Russia will contribute to successful implementation of the Russia-EU joint initiative "Partnership for Modernization" and promotion of mutually beneficial energy cooperation aimed at creating an integrated European energy system on the basis of strict adherence to existing bilateral and multilateral treaty obligations. A long-term objective in that area is to establish a common Russia-EU market.

58. The issue of providing reciprocal abolition of short-term trip visas is of special importance in Russia-EU relations. The visa regime remains one of the main barriers for expanding personal and economic contacts between Russia and the European Union. Its elimination will greatly facilitate genuine Russia-EU integration.

59. Considering the significant role the European Union plays in international affairs, Russia intends to maintain intensive and mutually beneficial dialogue with the EU partners on the key issues of the foreign policy agenda, to further practical interaction in political and military areas, to shape relevant foreign policy and security cooperation mechanisms in order to ensure taking common decisions followed by joint implementation.

60. Boosting mutually beneficial bilateral relations with Germany, France, Italy, the Netherlands and other European states is a considerable resource for advancing Russia's national interests in European and world affairs, as well as for putting the Russian economy on the innovative development track. Russia would like the potential of interaction with the UK to be used similarly.

61. Russia will continue its efforts to strengthen the Council of Europe as an independent universal European organization with the mandate which ensures, through its unique convention mechanisms, the unity of the legal and humanitarian space on the continent.

62. Russia views the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) as an important instrument for building an equitable and indivisible system of pan-European security, and is interested in strengthening its role and authority. For the relevance of the OSCE to increase, its activities should be focused on truly urgent issues, especially those related to transnational challenges and security threats, and on elaboration of its Charter and reform of its executive mechanisms in view to ensure appropriate prerogatives of the collective intergovernmental bodies.

63. Russia will build up its relations with NATO taking into account the degree of its readiness for equitable partnership, strict adherence to the norms and principles of international law, real progress towards a common space of peace, security and stability in the Euro-Atlantic region based on the principles of mutual trust, transparency and predictability and compliance with the commitments undertaken by all its members at the Russia-NATO Council meetings not to provide one's security at the expense of the security of others, and with the military restraint obligations. Russia maintains a negative attitude towards NATO's expansion and to the approaching of NATO military infrastructure to Russia's borders in general as to actions that violate the principle of equal security and lead to the emergence of new dividing lines in Europe.

64. Russia believes that Russia and all Euro-Atlantic states, including NATO member states, have common strategic goals which consist in maintaining peace and stability, countering common security threats, namely international terrorism, WMD proliferation, maritime piracy, drug trafficking, and natural and man-made disasters.

65. Russia develops progressive practical cooperation with North European countries, including the implementation of joint cooperation projects for the Barents/Euro-Arctic Region and the Arctic as a whole within multilateral structures while taking into consideration the interests of indigenous peoples. Russia's participation in the activities of the Council of the Baltic Sea States plays an important role. Russia stands for the further fulfillment of the Northern Dimension project potential as well as that of its Partnerships as a platform for regional collaboration in Northern Europe.

66. Russia aims to develop comprehensive pragmatic and equitable cooperation with Southeast European countries. The Balkan region is of great strategic importance to Russia, including its role as a major transportation and infrastructure hub used for supplying gas and oil to European countries.

67. The Russian Federation builds its relations with the USA taking into consideration the vast potential for developing mutually beneficial cooperation in trade, investment, science, technology and other areas as well as the particular responsibility of both states for global strategic stability and international security as a whole.

68. A long-term Russian priority is to provide solid economic foundation for the dialogue with the USA, strengthen ties in all areas, improve the quality of equitable, non-discriminatory trade and economic cooperation on a permanent basis, work jointly in order to develop a controversy management culture based on pragmatism and observance of the balance of interests, which will help to impart more stability and predictability to the relations between the two countries and to strengthen bilateral interaction based on the principles of equality, non-interference into domestic affairs and respect for each other's interests.

69. Russia will work actively in order to prevent the USA from imposing unilateral extraterritorial sanctions against Russian citizens and legal entities, and to promote initiatives aimed at further liberalization of the visa regime between the two countries.

70. Russia firmly supports constructive cooperation with the USA in arms control, taking into account, *inter alia*, an unbreakable link between strategic offensive and defensive warfare and the necessity to transform nuclear disarmament into a multilateral process, and considers that the possibility of further reduction of strategic offensive armaments can only be examined with due account for all factors influencing global strategic stability. In the context of the creation of a global missile defense system by the USA, Russia will consistently seek legal guarantees that it will not be directed against Russian nuclear deterrent forces.

71. Russia expects that US actions in the international arena will be strictly guided by international legal norms, primarily the UN Charter, including the principle of non-interference in domestic affairs of other states.

72. Progressive development of relations between Russia and Canada is an important element of Russia's balanced North American policy. Russia is interested in strengthening bilateral cooperation on relevant international issues and boosting trade, investment, scientific and technological ties.

73. Russia pursues a proactive and constructive policy of strengthening multi-format international cooperation in the Arctic. Consistently following its national interests, Russia believes that the existing international legal framework is sufficient to successfully settle all regional issues through negotiations, including the issue of defining the external boundaries of the continental shelf in the Arctic Ocean. Placing priority on interaction with Arctic states, including within the framework of the Arctic Council as a key regional forum, the coastal Arctic Five, the Barents Euro-Arctic Council and other multilateral formats, Russia is open to mutually beneficial cooperation with non-Arctic actors as long as they respect independence, sovereign rights and jurisdiction of Arctic states in the Arctic region. Using the Northern Sea Route – a Russian national transportation line in the Arctic which is open to international shipping on a mutually beneficial basis – is of great importance for the development of the region.

74. We will continue our efforts aimed at preserving and expanding Russian presence in Antarctica, including the effective use of mechanisms and procedures provided for in the Antarctic Treaty.

75. Strengthening Russia's presence in the Asia-Pacific region (APR) is becoming increasingly important since Russia is an integral part of this fastest-developing geopolitical zone, toward which the center of world economy and politics is gradually shifting. Russia is interested in participating actively in APR integration processes, using the possibilities offered by the APR to implement programs meant to boost Siberian and Far Eastern economy, creating a transparent and equitable security architecture in the APR and cooperation on a collective basis.

76. Improving political and security environment in Asia is of fundamental importance for Russia as the potential for conflict in the region remains significant, military arsenals are built up, and the risk of WMD proliferation is increasing. Russia consistently comes out in favor of settling all differences among the stakeholders

through political and diplomatic means with strict adherence to the fundamental principles of international law.

77. Russia considers it vital to create and promote a partner network of regional associations in the APR. In this context, special emphasis is placed on enhancing the role in regional and global affairs of the SCO whose constructive influence on the situation in the region as a whole has significantly increased.

78. Russia views the East Asia Summits (EAS) mechanism as the main platform for strategic dialogue between leaders on key APR security and cooperation issues. Efforts in this area will be supported by activities in other formats such as APEC Forum, ASEAN-Russia Dialogue, ASEAN Regional Forum on security, Asia-Europe Forum, Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, ASEAN Defense Ministers' Meeting with dialogue partners, and Asia Cooperation Dialogue forum.

79. Developing friendly relations with China and India is one of the priorities of Russian foreign policy.

80. Russia will further build up comprehensive, equal and trustful partnership and strategic collaboration with China and actively develop cooperation in all the spheres. Russia regards the fact that the two countries share the same fundamental positions on key global issues as one of the core elements of regional and global stability. Thereupon Russia will promote foreign policy cooperation with China in various areas, including in seeking ways to address new threats and challenges, finding solutions to urgent regional and international problems, cooperating within the UN Security Council, G20, BRICS, EAS, SCO and other multilateral formats.

81. Russia is committed to strengthening privileged strategic partnership with India, improving collaboration on relevant international issues and enhancing mutually beneficial bilateral ties in all areas, primarily in trade, bearing in mind the implementation of long-term cooperation programs approved by the countries.

82. Russia considers that it is important to further develop the mechanism of effective and mutually beneficial cooperation in foreign policy and economy between Russia, India and China.

83. Russia is ready to actively contribute to the efforts to establish effective mechanisms for strengthening peace, security, mutual trust and mutually beneficial cooperation in Northeast Asia as a regional element of the new security architecture in Asia-Pacific.

84. Russia seeks to maintain friendly and neighborly relations with the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea on the basis of mutually beneficial cooperation and to better use the potential of those relationships to speed up regional development and support inter-Korean political dialogue and economic cooperation, which are fundamental to peace, stability and security in the region. Russia has always been in favor of the non-nuclear status of the Korean Peninsula and will fully support a step-by-step progress in the area based on the relevant UN Security Council resolutions, including within the framework of the six-party talks.

85. The Russian Federation is willing to promote dynamic development of good-neighborly and multidimensional relations with Japan. In parallel with progress on the whole range of bilateral and international cooperation issues, Russia will continue the dialogue to find a mutually acceptable solution to unsettled issues.

86. Russia intends to strengthen its traditionally friendly relationship with Mongolia.

87. Russia seeks to consistently deepen its strategic partnership with Viet Nam and increase its cooperation with other ASEAN member states. It will continue to intensify its relations with Australia and New Zealand and maintain regular contacts and forge relationships with South Pacific island states.

88. Russia will be making a meaningful contribution to the stabilization of the situation in the Middle East and North Africa and will consistently promote peace and

concord among the peoples of all the Middle East and North Africa countries on the basis of respect for sovereignty, territorial integrity of states and non-interference in their internal affairs. Using its status as a permanent member of the UN Security Council and a member of the Quartet of international mediators, Russia will further mobilize collective efforts to achieve, on an internationally acceptable basis, a comprehensive and long-term settlement of the Arab-Israeli conflict in all its aspects, including the establishment of an independent Palestinian State living in peace and security side by side with Israel. The settlement should be reached through negotiation with the assistance of the international community, involving the potential of the League of Arab States and other parties concerned. Russia will promote the establishment of a zone free from weapons of mass destruction and their delivery means in the Middle East.

89. Russia will continue its balanced policy in favor of a comprehensive political and diplomatic settlement of the situation with Iranian nuclear program through dialogue based on a step-by-step and mutual interest approach and in strict compliance with nuclear non-proliferation requirements.

90. To further enhance its interaction with the Islamic states, Russia will take advantage of its participation as an observer in the work of the Organization of Islamic Cooperation and its contacts with the League of Arab States and the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. Russia is willing to further develop its bilateral relations with the states in the Middle East and North Africa.

91. The ongoing crisis in Afghanistan and the forthcoming withdrawal of international military contingents from the country pose a great security threat to Russia and other CIS members. The Russian Federation together with Afghanistan and concerned countries, the United Nations, the CIS, the CSTO, the SCO and other multilateral institutions including Russia-NATO projects, will make consistent efforts to find a just and lasting political solution to the problems faced by this country with due respect for the rights and interests of all its ethnic groups and achieve a post-conflict recovery of Afghanistan as a peace-loving sovereign neutral state with stable economy. Comprehensive measures to reduce terrorist threat from Afghanistan and eliminate or reduce illicit drug production and traffic in a significant and measurable manner will be an integral part of those efforts. Russia is committed to further intensifying international efforts under the auspices of the UN aimed at helping Afghanistan and its neighboring states to meet these challenges.

92. Russia will continue to comprehensively strengthen relations with the Latin American and Caribbean countries, given the region's growing role in world affairs. The development of strategic cooperation with Brazil, including within the framework of BRICS, as well as partnership relations with Argentina, Venezuela, Cuba, Mexico, Nicaragua and other Latin American and Caribbean states will be focused on expanding political interaction, promoting trade, economic, investment, innovation, cultural and humanitarian cooperation, combined responses to new threats and challenges, securing the position of Russian companies in dynamically developing industrial, energy, communications and transport sectors of the region's economies.

93. Russia will seek to consolidate its ties with Latin American partners at international and regional forums, expand cooperation with multilateral organizations in Latin America and the Caribbean, in particular with the Community of Latin American and Caribbean States and the Southern Common Market.

94. Russia will enhance multifaceted interaction with African states on a bilateral and multilateral basis with a focus on improving political dialogue and promoting mutually beneficial trade and economic cooperation and contribute to settling and preventing regional conflicts and crises in Africa. Developing partnership with the African Union and other regional organizations is an important element of this policy.

V. Development and Implementation of the Foreign Policy of the Russian Federation

95. The President of the Russian Federation in accordance with his constitutional powers directs the foreign policy of the country and as a Head of State represents the Russian Federation in international relations.

96. Within the limits of their constitutional powers, the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation provide legislative frameworks for the country's foreign policy and fulfillment of its international obligations. They also contribute to enhancing the effectiveness of parliamentary diplomacy.

97. The Government of the Russian Federation carries out measures to implement the country's foreign policy.

98. The Security Council of the Russian Federation works to develop the main elements of the state's foreign and military policy and assess challenges and threats to national interests and security of Russia in the international sphere, prepares proposals to the President of the Russian Federation in order to assist the Head of State in making decisions on the foreign policy of the Russian Federation in the field of ensuring national security and coordinating the activities of federal executive authorities and executive authorities of constituent entities of the Russian Federation when implementing their decisions in the area of ensuring national security, and assesses the effectiveness of these decisions.

99. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation develops a general strategy of the foreign policy of the Russian Federation, presents relevant proposals to the President of the Russian Federation, works to implement the foreign policy of the Russian Federation in accordance with the Concept and the Decree of the President of the Russian Federation No. 605 of May 7, 2012 "Measures to Implement the Foreign Policy of the Russian Federation" and coordinates foreign policy activities of federal executive authorities in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation No. 1478 of November 8, 2011 "Coordinating Role of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in Implementing a Common Foreign Policy of the Russian Federation."

100. The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation participates in elaborating proposals and implementing the foreign policy of the Russian Federation in the field of assisting to international development, providing international humanitarian cooperation, supporting Russian compatriots living abroad, strengthening the position of the Russian language in the world, and developing a network of Russian scientific and cultural centers abroad.

101. The constituent entities of the Russian Federation develop their international relations in accordance with the Constitution of the Russian Federation, Federal Law No. 4-FZ of January 4, 1999, "On Coordination of International and Foreign Economic Relations of the Constituent Entities of the Russian Federation," and other legislative acts. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and other federal executive bodies provide assistance to the constituent entities of the Russian Federation in implementing international and foreign economic cooperation in strict compliance with sovereignty and territorial integrity of Russia and making use of the capabilities of the Council of the Heads of the Russian constituent entities, which operates under the Ministry of the Foreign Affairs of the Russian Federation. The development of cooperation in regions and border areas is an important source for bilateral relations with relevant countries and regions in the trade, economic, humanitarian and other fields.

102. In working out foreign policy decisions, the federal executive bodies cooperate on a permanent basis with the Chambers of the Federal Assembly of the Russian Federation, Russian political parties, non-governmental organizations, the academic community, cultural and humanitarian associations, as well as business associations and mass media, encouraging their participation in international cooperation. Broad involvement of civil society in the foreign policy process is consistent with international practice and the trends of Russia's internal development, meets the goal of ensuring the consensus-based nature of Russia's foreign policy and increasing its effectiveness, and contributes to its efficient implementation.

103. In financing foreign policy activities, private funds may be attracted on a voluntary basis through public-private partnership.

104. The consistent implementation of Russia's foreign policy aims to create favorable conditions for the realization of the historic choice of the peoples of the Russian Federation in favor of the rule of law, democratic society and social market economy.



Lampiran 2: Konsep Kepentingan Nasional Federasi Rusia¹³²**МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ***Официальный сайт***NATIONAL SECURITY CONCEPT OF THE RUSSIAN FEDERATION***Approved by Presidential Decree No. 24 of 10 January 2000*

The National Security Concept of the Russian Federation (hereinafter referred to as the “Concept”) is a system of views on how to secure the individual, society and the state against external and internal threats in every sphere of national life. It articulates the major thrusts of the Russian Federation’s foreign policy.

By Russian Federation national security is meant the security of its multinational people as the bearer of sovereignty and as the only source of power in the Russian Federation.

I. Russia in the world community

The world situation is characterized by a system of international relations undergoing dynamic transformation. Following the end of the bipolar confrontation era, two mutually exclusive tendencies came to prevail.

The first of these tendencies manifests itself in the strengthened economic and political positions of a significant number of states and of their integrative associations and in improved mechanisms for multilateral governance of international processes. Economic, political, science and technological, environmental and information factors are playing an ever-increasing role. Russia will help shape the ideology behind the rise of a multipolar world on this basis.

The second tendency manifests itself in attempts to create an international relations structure based on domination by developed Western countries in the international community, under US leadership and designed for unilateral solutions (primarily by the use of military force) to key issues in world politics in circumvention of the fundamental rules of international law.

The formation of international relations is accompanied by competition and by the striving of a number of states to increase their influence on global politics, including by creating weapons of mass destruction. The significance of the military and security aspects of international relations continues to remain substantial.

Russia is one of the world’s major countries, with a centuries-old history and rich cultural traditions. Despite the complicated international situation and difficulties of a domestic nature, Russia objectively continues to play an important role in global processes by virtue of its great economic, science- technological and military potential and its unique strategic location on the Eurasian continent.

¹³² Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2014. *National Security Concept of the Russian Federation*. Diakses dari <http://archive.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31!OpenDocument> pada tanggal 21 April 2014.

There are prospects for the Russian Federation's broader integration into the world economy and for expanded cooperation with international economic and financial institutions. Objectively, the commonality of interests between Russia and other states persists with regard to many international security problems, particularly opposing the proliferation of mass destruction weapons, settling and preventing regional conflicts, fighting international terrorism and the drug business, and resolving acute ecological problems of a global nature, including nuclear and radiation safety.

At the same time, a number of states are stepping up efforts to weaken Russia politically, economically, militarily and in other ways. Attempts to ignore Russia's interests when resolving major issues in international relations, including conflict situations, are capable of undermining international security and stability and of inhibiting the positive changes occurring in international relations.

In many countries, including the Russian Federation, the acuteness of the problem of terrorism, having a transnational character and threatening world stability, has sharply increased, which calls for the unification of efforts by the entire international community, increased effectiveness of existing forms and methods of countering this threat, and urgent action to neutralize it.

II. Russia's national interests

Russia's national interests are a totality of balanced interests of the individual, society and the state in economic; domestic political, social, international, informational, military, border, environmental and other fields. They are long-term and define the principal goals and strategic and current objectives of the state's domestic and foreign policy. The national interests are secured by institutions of state authority, which, inter alia, perform their functions in concert with public organizations operating under the Russian Federation Constitution and laws.

The interests of the individual lie in exercise of constitutional rights and freedoms and in provision of personal security; in an improved quality and standard of living; and in physical, spiritual and intellectual development as a person and citizen.

The interests of society lie in strengthening democracy; in creating a rule-of-law, social state; in achieving and maintaining public harmony, and in the spiritual renewal of Russia.

The interests of the state lie in the inviolability of the constitutional system and of Russia's sovereignty and territorial integrity; in political, economic and social stability; in unconditional assurance of lawfulness and maintenance of law and order; and in the promotion of equal and mutually advantageous international cooperation.

Russia's national interests may only be realized based on sustainable economic development. Therefore Russia's national interests in this sphere are of key importance.

Russia's national interests in the domestic political sphere lie in stability of the constitutional system and the institutions of state authority; in ensuring civil peace and national harmony, territorial integrity, the unity of the legal space, and law and order; in completing the formation of a democratic society; and in neutralizing the causes and conducive conditions for political and religious extremism and ethno-separatism, along with their consequences – social, interethnic and religious conflicts, and terrorism.

Russia's national interests in the social sphere lie in assurance of a high standard of living for its people.

The national interests in the spiritual sphere lie in preservation and strengthening of society's moral values, traditions of patriotism and humanism, and the cultural and scientific potential of the country.

Russia's national interests in the international sphere lie in upholding its sovereignty and strengthening its positions as a great power and as one of the influential centers of a multipolar world, in development of equal and mutually advantageous relations with all countries and integrative associations and primarily with the members of the Commonwealth of Independent States and Russia's traditional partners, in universal observance of human rights and freedoms and the impermissibility of double standards in this respect.

Russia's national interests in the information sphere lie in observance of its citizens' constitutional rights and freedoms to receive and make use of information, in the development of modern telecommunication technologies, and in protecting the state's information resources from unsanctioned access.

Russia's national interests in the military sphere lie in protection of its independence, sovereignty and state and territorial integrity, in the prevention of military aggression against Russia and its allies and in ensuring the conditions for peaceful and democratic development of the state.

Russia's national interests in the border sphere lie in the establishment of political, legal, organizational and other conditions for ensuring reliable protection of the state border of the Russian Federation, and in observance of the procedure and rules laid down by Russian Federation legislation for the carrying on of economic and other activities within the border space of the Russian Federation.

Russia's national interests in the ecological sphere lie in the preservation and improvement of the environment.

A vital component of Russia's national interests is protection of the individual, society and the state from terrorism, including international terrorism, as well as from natural and man-made emergency situations and their consequences, and in times of war – from dangers arising from hostilities or as a consequence thereof.

III. Threats to the Russian Federation's national security

The state of the economy, an imperfect system of government and civil society, the social and political polarization of Russian society and the criminalization of social relations, the growth of organized crime and increase in the scale of terrorism, the exacerbation of interethnic and aggravation of international relations all combine to create a broad spectrum of internal and external threats to the country's national security.

In the sphere of economy, these threats have a comprehensive character and are due primarily to a substantial contraction in the gross domestic product; a drop in investment and innovation activity; the dwindled scientific and technological potential; agricultural stagnation; the state of imbalance in the banking system; a rising external and internal national debt, and the tendency for the prevalence in export supplies of fuel, raw material and energy components, and in import supplies – of food and consumer items, including articles of prime necessity.

The weakening of the scientific, technical and technological potential of the country, curtailed research in strategically important areas of science and technology and the outflow of specialists and intellectual property abroad mean that Russia is faced with the threat of loss of its leading world positions, decay of its high-technology industries, increased dependence on foreign technology and the undermining of its defense capability.

The negative economic tendencies lie at the root of separatist aspirations by a number of constituent parts of the Russian Federation. This leads to increased political instability and a weakening of Russia's unified economic space and its major components – production, technological and transportation ties, and the banking and financial, credit and tax systems.

Economic disintegration, the social differentiation in society, and the depreciation of spiritual values promote tension in relations between regions and the center and represent a threat to the federal structure and the socioeconomic fabric of the Russian Federation.

Ethno-egoism, ethnocentrism and chauvinism as manifested in the activity of a number of public associations, and uncontrolled migration contribute to the growth of nationalism, political and religious extremism and ethno-separatism, and create a breeding ground for conflicts.

The country's unified legal space is being eroded by nonobservance of the principle of the primacy of the norms of the Russian Federation Constitution over other legal norms, and for that matter, federal legal norms over those of the constituent parts of the Russian Federation, and by insufficient fine tuning between different state administrative levels.

The threat of criminalization of social relations taking shape in the process of the reformation of the sociopolitical system and economic activity is becoming especially acute. Serious miscalculations made in the initial stages of economic, military, law-enforcement and other reform, weakened state regulation and control, an imperfect legal base, the absence of a strong state social policy, and a decline in society's spiritual and moral potential are the main factors aiding growth in crime, especially organized crime, and corruption.

The consequences of these miscalculations are manifest in weakened legislative supervision of the situation in the country; in the coalescence of certain elements of executive and legislative authority with criminal structures; and in their penetration into the sphere of management of the banking business, large enterprises, trade organizations, and commodity-distribution networks. In this connection the fight against organized crime and corruption is not only legal but also political in nature.

The scale of terrorism and organized crime is growing because of the conflicts that frequently accompany changes of ownership and due to the exacerbation of power struggles along group or ethno-nationalistic interest lines. The lack of an effective system of social prevention of law violations, inadequate legal and logistic support for activities to prevent terrorism and organized crime, legal nihilism and the outflow of qualified personnel from law-enforcement agencies are all increasing the degree of impact of this threat on the individual, society and the state.

The profound stratification of society into a narrow bunch of rich people and a preponderant mass of low-income citizens, the rise in the proportion of population living below poverty line, and growing unemployment pose a threat to Russia's national security in the social sphere.

A threat to the nation's physical health is the crisis in the systems of public health and social protection of the population and the rise in alcohol and drug consumption.

The consequences of this profound social crisis are a sharp drop in the birth rate and average life expectancy, the deformation of the demographic and social composition of society, a dwindling of the labor resources as the foundation for industrial development, a weakening of the fundamental cell of society, the family, and a lowering of the spiritual, moral and creative potential of the population.

A deepening crisis in the domestic political, social and spiritual spheres could lead to the loss of democratic gains.

The main threats in the international sphere are due to the following factors:

- the striving of particular states and intergovernmental associations to belittle the role of existing mechanisms for ensuring international security, above all the United Nations and the OSCE;
- the danger of a weakening of Russia's political, economic and military influence in the world;

- the strengthening of military-political blocs and alliances, above all NATO's eastward expansion;
- possible appearance of foreign military bases and large troop contingents in direct proximity to Russia's borders;
- proliferation of weapons of mass destruction and their delivery vehicles;
- a weakening of the integration processes in the Commonwealth of Independent States;
- outbreak and escalation of conflicts near the state border of the Russian Federation and the external borders of the member states of the Commonwealth of Independent States;
- territorial claims against Russia.

Internationally, threats to Russian national security are manifested in attempts by other states to counteract its strengthening as one of the centers of influence in a multipolar world, to hinder realization of its national interests and to weaken its positions in Europe, the Middle East, Transcaucasia, Central Asia and the Asia-Pacific Region.

Terrorism represents a serious threat to Russian national security. International terrorism has unleashed the overt campaign aimed at destabilizing the situation in Russia.

There is an increasing threat to national security in the information sphere. The striving of a number of countries to dominate the global information space and oust Russia from the external and internal information market poses a serious danger, as do the elaboration by a number of states of a concept of information wars that envisages creation of means of dangerous influence on the information spheres of other countries of the world; disruption of the normal functioning of information and telecommunication systems and of storage reliability for information resources; and gaining of unsanctioned access to them.

The level and scope of threats in the military sphere are growing.

Elevated to the rank of strategic doctrine, NATO's shift to the practice of using military force outside its zone of responsibility and without UN Security Council authorization is fraught with the danger of destabilizing the entire strategic situation in the world.

The growing technological edge of a number of leading powers and the buildup of their capabilities to develop new-generation weapons and military equipment create the prerequisites for a qualitatively new phase of the arms race and for a radical alteration of the forms and methods of warfare.

Foreign special services and the organizations they use are increasingly active on the territory of the Russian Federation.

Adding to the negative tendencies in the military domain is the protracted reform process in the Russian military organization and defense industrial complex, along with inadequate funding for national defense and the imperfections of the legal and regulatory base. This currently shows itself in the critically low level of operational and combat training in the Russian Armed Forces and in other forces, troop units and agencies, in the impermissible drop in the level of provision of modern weapons, military and special equipment for the troops (forces), in the extreme acuteness of social problems and leads to a weakening of the military security of the Russian Federation as a whole.

Threats to the national security and interests of the Russian Federation in the border sphere are due to the following causes:

- adjacent states' economic, demographic and cultural-religious expansion into Russian territory;
- stepped-up activity by transfrontier organized crime as well as by foreign terrorist organizations.

The threat of a deteriorating environmental situation in the country and depletion of its natural resources hinges directly on the state of the economy and society's willingness to grasp the globality and importance of these issues. For Russia this threat is particularly great because of the preferential development of fuel and energy industries, the lack of development in legislative framework for environmental activities, the absence or limited use of resource conservation technologies, and low environmental awareness. There is a tendency for Russia to be used as a place for reprocessing and burying environmentally dangerous materials and substances. In these circumstances, the erosion of state oversight and the insufficient effectiveness of the legal and economic mechanisms for averting and relieving emergencies are bound to increase the risk of man-made disasters in all sectors of economic activity.

IV. Ensuring the national security of the Russian Federation

Ensuring the Russian Federation's national security involves the following principal tasks:

- forecasting and identifying external and internal threats to national security in a timely manner;
- implementing operational and long-term measures for preventing and neutralizing internal and domestic threats;
- ensuring the sovereignty and territorial integrity of the Russian Federation and the security of its border space;
- developing the country's economy and pursuing an independent and socially oriented economic policy;
- overcoming the scientific, technical and technological dependence of the Russian Federation on external sources;
- ensuring within Russia the personal security of individuals and citizens and their constitutional rights and freedoms;
- streamlining the system of state authority in the Russian Federation, federal relations, local self-government and the country's laws, shaping harmonious interethnic relations, strengthening law and order and preserving the social and political stability of society;
- ensuring strict observance of the legislation of the Russian Federation by all citizens, officials, state bodies, political parties, and public and religious organizations;
- ensuring Russia's equal and mutually advantageous cooperation primarily with leading states of the world;
- raising and maintaining the state's military potential on a sufficiently high level;
- strengthening the regime of nonproliferation of weapons of mass destruction and their delivery vehicles;
- taking effective measures to detect, prevent and suppress espionage and subversive activities of foreign states, directed against the Russian Federation;
- radically improving the ecological situation in the country.

Ensuring national security and protecting the interests of Russia in the economic sphere are the priority thrusts of state policy.

The major objectives in foreign economic activity are:

- establishing favorable conditions for the international integration of the Russian economy;
- expanding the sales markets for Russian products;
- creating a single economic space with members of the Commonwealth of Independent States.

In conditions of the liberalization of Russian foreign trade and the toughening of competition in the world market of goods and services, protection of the interests of domestic commodity producers must be enhanced.

The pursuit of well-balanced financial and credit policies, aimed at gradually reducing Russia's dependence on external credit borrowings and at consolidating its positions in international economic and financial organizations, takes on great significance.

It is necessary to enhance the role of the state in regulating the activities of foreign banking, insurance and investment companies and to introduce definite and justified restrictions on the transfer of exploitation of deposits of strategic natural resources, telecommunications, and transport and commodity-distribution networks to foreign companies.

Effective measures should be taken in the area of currency regulation and control in order to create conditions for the termination of settlements in foreign currency on the domestic market and prevention of the uncontrolled export of capital.

The main thrusts of national security assurance in the internal economic activities of the state are:

- legal support of reforms and the creation of an effective mechanism of control over the observance of the legislation of the Russian Federation;
- increasing government regulation of the economy;
- taking necessary measures to surmount the consequences of economic crisis, to preserve and develop scientific, technical, technological and industrial potential, to shift to economic growth with a reduced likelihood of man-made disasters, to improve the competitiveness of domestic industrial goods and to raise the well-being of the people.

The shift to a highly efficient and socially oriented market economy must occur via the gradual creation of optimal mechanisms of production organization and the distribution of goods and services with a view to the largest possible growth of the well-being of society and each citizen.

The tasks involving removal of structural deformations of the Russian economy, faster growth of science-intensive and highly processed goods production, support of industries that form the basis of extended reproduction, and employment assurance have moved to the fore.

Increasing government support of investment and innovation activity, taking measures to create a sustainable banking system that meets the interests of the real economy, facilitating enterprises' access to long-term credits for the financing of capital investments, and providing real government support of purpose-oriented industrial restructuring programs are of substantial importance.

Ensuring faster development of competitive industries and enterprises and expanding the science-intensive goods market is a hugely important task. Its accomplishment calls for adopting measures to stimulate the transfer of new military technologies to civilian production and introducing a mechanism to identify and develop progressive technologies, the mastering of which will ensure the competitiveness of Russian enterprises in the world market.

Tackling the above tasks presupposes concentration of financial and material resources in priority areas of science and technology development; support for leading scientific schools; the accelerated formation of advanced developments and a national technological base; the attraction of private capital, including by the creation of funds and use of grants; the realization of development programs for areas having a high scientific and technical potential; the creation, with government support, of an infrastructure to ensure research commercialization with the simultaneous protection of intellectual property at home and abroad; and the development of a public network of scientific, technical and commercial information.

Government must assist the establishment of equal conditions for developing and increasing the competitiveness of enterprises under whatever form of ownership, including the rise and development of private business in all spheres where this contributes to the growth of public well-being, science and education progress, the spiritual and moral development of society and the protection of consumer rights.

Mechanisms to support the functioning and economic development of singular crisis Far Northern regions and areas, as well as a tariff policy to ensure the unified Russian economic space must be developed in the shortest possible time.

The priority of economic factors in the social sphere is crucial for strengthening the state, for the real government provision of social guarantees and for developing mechanisms of collective responsibility, democratic decision making and social partnership. In this case it is important to pursue a socially just and economically effective income distribution policy.

Organizing the work of the federal executive bodies and those of the subjects of the Russian Federation to implement concrete measures, aimed at preventing and overcoming the threats to the national interests of Russia in the field of economy, also requires further perfecting the legislation of the Russian Federation in the said field and ensuring its strict observance by all business entities.

Bringing the interests of the peoples inhabiting the country closer together, fostering their all-round cooperation and pursuing a responsible and well-balanced government policy toward the nationalities and regions will help ensure internal political stability in Russia. A comprehensive approach to tackling these tasks must form the basis of an internal public policy ensuring the development of the Russian Federation as a multinational democratic federative state.

The reinforcement of Russian statehood and the perfecting of federal relations and local self-government must help ensure the national security of the Russian Federation. There is a need for a comprehensive approach to dealing with legal, economic, social and ethno-political problems with the balanced observance of the interests of the Russian Federation and of its constituent parts.

The implementation of the constitutional principle of popular government calls for the coordinated functioning and interaction of all bodies of state authority, a rigid vertical hierarchy of executive power and the unity of the Russian judicial system. This is ensured by the constitutional principle of separation of powers, by the establishment of a more clear-cut functional distribution of authorities between state institutions and by the strengthening of the federal arrangement of Russia through the improvement of its relations with the constituent parts of the Russian Federation within the framework of their constitutional status.

The basic guidelines for protection of the constitutional system in Russia are:

- ensuring the priority of federal legislation and streamlining the legislation of the constituent parts of the Russian Federation on this basis;
- developing the organizational and legal mechanisms to protect state integrity and ensuring the unity of the legal space and national interests of Russia;
- crafting and implementing a regional policy that will allow federal and regional interests to be optimally balanced;
- streamlining the mechanism that prevents the creation and suppresses the activities of political parties and public associations pursuing separatist and anti-constitutional aims.

The consolidation of efforts must be called on to fight crime and corruption. Russia is extremely interested in eradicating the economic, social and political base of these socially dangerous phenomena and in working out a comprehensive system of measures to effectively protect the individual, society and the state against criminal encroachments.

The formation of a system of measures for effective social prophylaxis and the education of law-abiding citizens is of primary importance. These measures must be aimed at protecting the rights and freedoms, morality, health and property of each individual without regard to race, nationality, language, origin, property or official status, residence, religion or belief, affiliation with public associations and other circumstances.

The major tasks in anti-crime effort are:

- identifying, removing and preventing the causes and conditions giving rise to crime;
- enhancing the role of the state as a guarantor of the security of the individual and society and creating a necessary legal base for that, along with an enforcement mechanism;
- reinforcing the system of law enforcement bodies, primarily units that counter organized crime and terrorism, and establishing conditions for their effective activity;
- enlisting government bodies within their scope of authority in activities for preventing unlawful acts;
- expanding mutually advantageous international cooperation in the law enforcement sphere, primarily with the countries of the Commonwealth of Independent States.

Anti-crime decisions and measures taken by bodies of state authority must be overt, concrete and understandable to each citizen, bear a preemptive character, ensure equality before the law for all and the inevitability of punishment and rely upon the support of society.

In order to prevent and combat crime, it is first necessary to develop the legal base as the foundation of reliable protection of the rights and lawful interests of citizens and to observe the international legal obligations of the Russian Federation in the fields of anti-crime action and human rights observance. It is important to deprive crime of a breeding ground provided by legislation drawbacks and crisis in the economy and the social sphere.

For the purpose of preventing corruption and eliminating the conditions for legalizing illegal capital it is necessary to create an effective system of financial control, to improve the measures of administrative, civil and criminal-law influence and to perfect the mechanism of checks on the property status and sources of income of officials and employees of organizations and institutions under whatever form of ownership, as well as on correspondence between their expenditures and these incomes.

Terrorism, the drug business and contraband must be fought on the basis of a nationwide complex of countermeasures to suppress these kinds of criminal activity.. Based on international agreements, it is necessary to effectively cooperate with foreign states, their law-enforcement bodies and special services and with international organizations tasked with combating terrorism. It is also necessary to draw more widely on the international experience in fighting this phenomenon, to establish a coordinated mechanism for countering international terrorism and to reliably shut off all possible channels of illicit trade in arms and explosives within the country and of their inflow from abroad.

Federal bodies of state authority must prosecute within the country persons involved in terrorist activities regardless of where the terrorist actions inflicting harm upon the Russian Federation were planned or carried out.

Ensuring the national security of the Russian Federation also includes protection of the cultural, spiritual and moral legacy, historical traditions and the norms of social life, the preservation of the cultural wealth of all the peoples of Russia, the formation of government policy in the field of the spiritual and moral education of the population, and the imposition of a ban on use of air time in electronic mass media for distribution of programs propagandizing violence and exploiting low instincts,

along with counteraction against the negative influence of foreign religious organizations and missionaries.

The spiritual renewal of society is impossible without the preservation of the role of the Russian language as a factor of the spiritual unity of the peoples of multinational Russia and as the language of interstate communication between the peoples of the member states of the Commonwealth of Independent States.

In order to ensure the preservation and development of our cultural and spiritual legacy, it is necessary to establish economic and social conditions for the creative activity and functioning of cultural establishments.

In the field of citizens health protection and improvement, the heightened attention of society and the bodies of state authority of the Russian Federation to the development of state (federal and municipal) and private medical services is called for, along with government protectionism in domestic medical and pharmaceutical industries and implementation of federal programs in the fields of sanitation and epidemiology, the protection of children's health, urgent and emergency medical aid, and disaster medicine.

Among the priority areas of government environmental activity are:

- rational utilization of natural resources and the inculcation of an ecological culture among the population;
- preventing environment pollution by increasing the degree of safety of the technologies connected with the burial and utilization of toxic industrial and domestic wastes;
- preventing radioactive pollution of the environment and minimizing the consequences of previous radiation accidents and disasters;
- the ecologically safe burial and utilization of decommissioned arms, primarily atomic submarines, nuclear-powered ships and vessels, nuclear ammunition, liquid rocket fuel, and atomic power plant fuel;
- the environmentally safe and non-hazardous storage and destruction of chemical weapon stocks;
- development and introduction of safe production technologies, a search for methods of practical use of ecologically clean energy sources and the adoption of urgent environmental protection measures in ecologically dangerous regions of the Russian Federation.

A new approach to the organization and conduct of civil defense on the territory of the Russian Federation is requisite, along with the qualitative improvement of the unified state system of disaster warning and relief, including its further integration with similar systems of foreign states.

The foreign policy of the Russian Federation must be aimed at:

- pursuing a vigorous foreign policy course;
- strengthening the key mechanisms of multilateral governance of world political and economic processes, primarily under the aegis of the UN Security Council;
- providing favorable conditions for economic and social development of the country and for preserving global and regional stability;
- protecting the lawful rights and interests of Russian citizens abroad, particularly with the use of political, economic and other measures for these purposes;
- developing relations with the member states of the Commonwealth of Independent States according to the principles of international law and developing integration processes within the Commonwealth of Independent States that meet the interests of Russia;
- the full-fledged participation of Russia in global and regional economic and political entities;
- facilitating conflict resolution, including peacekeeping activities under the aegis of the UN and other international organizations;

- achieving progress in nuclear arms control, and maintaining strategic stability in the world on the basis of states' compliance with their international obligations in this sphere;
- fulfilling mutual obligations in the area of reduction and elimination of mass destruction weapons and conventional arms, carrying out confidence and stability building measures, and ensuring international control over the export of military and dual-purpose goods and technologies and over the rendering of this kind of services;
- adapting the existing arms control and disarmament agreements to the new conditions of international relations, and developing where necessary new agreements, primarily on confidence and security building measures;
- promoting the establishment of zones free of weapons of mass destruction;
- developing international cooperation in the field of combating transnational crime and terrorism.

Ensuring the military security of the Russian Federation is a major thrust area of the state. The chief objective in this field is to provide the capability to respond adequately to any threats that may arise in the 21st century, with rational expenditures on national defense.

In the prevention of wars and armed conflicts the Russian Federation gives preference to political, diplomatic, economic, and other nonmilitary means. But the national interests of the Russian Federation require sufficient military power for its defense. The Russian Armed Forces play the chief role in ensuring the military security of the Russian Federation.

It is one of the major tasks of the Russian Federation to exercise deterrence in the interest of preventing aggression on any scale, nuclear or otherwise against Russia and its allies.

The Russian Federation must possess nuclear forces capable of assuredly inflicting the desired extent of damage against any aggressor state or coalition of states in any conditions and circumstances.

The Russian Armed Forces in their peacetime fighting strength must be capable to reliably protect the country against air attack and accomplish jointly with other forces, troop units and agencies the tasks in repulsing aggression in a local war (armed conflict) as well as to deploy strategically to perform missions in a large-scale war. The Armed Forces must enable the Russian Federation to engage in peacekeeping activities.

One of the major strategic thrusts in ensuring the military security of the Russian Federation is effective coordination and cooperation with the member states of the Commonwealth of Independent States.

The interests of ensuring the national security of the Russian Federation predetermine necessity of a Russian military presence in certain strategically important regions of the world in appropriate circumstances. Deploying limited troop contingents (military bases, Navy forces) in them on a treaty or international legal basis, as also on the principles of partnership must ensure the readiness of Russia to fulfill its obligations, contribute to shaping a sustainable military-strategic balance of forces in the regions, allow for the Russian Federation's response to a crisis situation at its initial stage, as well as facilitate carrying out the foreign policy aims of the state.

The Russian Federation considers the possibility of using military force to ensure its national security based on the following principles:

- employing all the manpower and resources, including nuclear weapons, in its possession in the event of need to repulse armed aggression, if all other measures of resolving the crisis situation have been exhausted or proven ineffective;
- use of military force within the country would be possible in strict conformity with the Russian Federation Constitution and federal laws in such contingencies as a threat to

the life of citizens or territorial integrity of the country or the menace of a forcible change of the constitutional system.

An important role in securing the national interests of Russia belongs to the defense industrial complex. Restructuring and conversion of the defense industrial complex must be accomplished without detriment to the development of new technologies and scientific-technical capabilities, the modernization of weapons, military and special equipment and the strengthening of the positions of Russian producers in the world arms market.

There is a need to create all requisite conditions for organizing priority fundamental, projected, and exploratory research leading to promising and advanced developments in the defense and security interests of the state.

The major tasks of the Russian Federation in the border sphere are:

- establishing a necessary legal and regulatory base;
- promoting the related interstate cooperation;
- countering economic, demographic and cultural-religious expansion into the territory of Russia by other states;
- suppressing the activities of transnational organized crime, and illegal migration;
- carrying out collective measures to ensure the security of the border space of the member states of the Commonwealth of Independent States.

The major tasks in ensuring the information security of the Russian Federation are:

- realization of the constitutional rights and freedoms of the citizens of the Russian Federation in the sphere of information activities;
- improvement and protection of the national information infrastructure and the integration of Russia into the world information space;
- counteraction against the threat of rivalry in the information sphere.

Effective use and all-round development of intelligence and counterintelligence capabilities with a view to the timely detection of threats and determination of their sources has a special significance for ensuring the national security of the Russian Federation.

The national security system of the Russian Federation is created and developed in accordance with the Constitution, federal laws, Presidential decrees and orders, Government resolutions and orders, and federal programs in this field.

At the heart of the national security system of the Russian Federation are the agencies, manpower and resources involved in national security arrangements that carry out measures of a political, legal, organizational, economic, military and other nature, aimed at ensuring the security of the individual, society and the state.

The powers of Russian national security agencies and forces, their composition, and principles and rules of action are defined by appropriate legislative acts of the Russian Federation.

Those taking part in shaping and pursuing the national security policy of the Russian Federation are:

the President of the Russian Federation, who directs within his Constitutional remit the national security agencies and forces of the Russian Federation; authorizes national security actions; in accordance with Russian Federation legislation forms, reorganizes and abolishes national security agencies and forces subordinate to him; issues messages, appeals and directives on national security issues; in his annual addresses to the Federal Assembly specifies individual provisions of the National Security Concept of the Russian Federation, and determines guidelines for current domestic and foreign policy of the country;

the Federal Assembly of the Russian Federation – based on the Russian Federation Constitution and upon submission from the President or Government, it forms a legislative base in the field of ensuring the national security of the Russian Federation;

the Government of the Russian Federation – within its scope of authority and with regard for the national security priorities articulated in the President's annual addresses to the Federal Assembly, it coordinates the activities of federal executive bodies and those of the constituent parts of the Russian Federation, and shapes in a prescribed manner the federal budget items for implementing concrete goal-oriented programs in this field;

the Security Council of the Russian Federation: conducts work on the preemptive identification and assessment of threats to the national security of the Russian Federation, operationally prepares for the President draft decisions on their prevention, works out proposals for national security arrangements, and proposals to specify individual National Security Concept provisions, coordinates the activities of national security forces and agencies, and oversees implementation by federal executive bodies and those of the constituent parts of the Russian Federation of the decisions made in this field;

the federal executive bodies: see to it that Russian Federation legislation and the decisions by the President and Government of the Russian Federation with respect to national security are complied with; within their remit, develop normative legal acts in this field and submit them to the President and Government of the Russian Federation;

the executive bodies of the constituent parts of the Russian Federation: interact with federal executive bodies on the issues of compliance with the legislation of the Russian Federation and with the decisions of the Russian Federation President and Government relating to national security, as well as with federal programs, plans and directives issued by the Supreme Commander in Chief of the Armed Forces with respect to the Federation's military security; carry out measures in conjunction with bodies of local self-government to engage citizens, public associations and organizations in helping solve national security problems according to Russian Federation legislation; and submit to federal executive bodies their proposals for streamlining the national security system of the Russian Federation.

* * *

It is the firm and resolute intention of the Russian Federation to sustain its national security. The democratic legal institutions that have been created, the established structure of bodies of state authority and broad participation by political parties and public associations in implementing the National Security Concept are a guarantee for the dynamic development of Russia in the 21st century.